

2025



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N M A L I N A U

ANTOR BUPATI MALINAU

LKJIP TAHUN 2024

**# bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Kata Pengantar

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Malinau Tahun 2024 dapat diselesaikan. LKjIP Kabupaten Malinau Tahun 2024 disusun berdasarkan dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021–2026. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta menciptakan Good Governance dan Clean Government dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Malinau **“Terwujudnya Kabupaten Malinau Yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan Yang Profesional”**.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Malinau Tahun 2024 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan potret terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2024 serta sekaligus sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berkesinambungan.

Malinau, 27 Maret 2025

Bupati Malinau

WEMPI W. MAWA, SE., M.H

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2024 menyajikan informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau ditahun 2024 yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau terdiri atas:



Capaian kinerja indikator kinerja utama tahun 2024 memberikan gambaran keberhasilan kinerja dalam pencapaian misi pembangunan Kabupaten Malinau. Ukuran tingkat tercapainya dan tidak tercapainya indikator akan lebih detail diuraikan pada Bab III.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka usia harapan hidup (Tahun)	72,16	73,27	101,53%
2	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,97	9,63	96,58%
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran perkapita (Ribu Rupiah)	10.450,00	11,190,00	107,08%
4	Terciptanya Kehidupan Yang	Angka Kriminalitas (%)	0,45%	0.09%	0,20%



	Aman, Tenteram dan Harmonis Serta Bebas Bencana	Indeks Resiko Bencana (Poin)	124,4	126,17	101,42%
5	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	85,36	82,86	97,07%
6	Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter dan Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama (Poin)	81,7	80,18	98,13%
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)	80,5	55,4	67,81%
7	Meningkatnya produktifitas sektor-sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB (%)	4,92%	9,26%	188%
8	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB (%)	2,80%	2,31%	82,5%
		Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%)	1,85%	1,85%	100%
9	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil dan Mikro Yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas (%)	74%	6,62%	9,2%
		Persentase Peningkatan Usaha Mikro Dan Kecil (%)	76,60%	10,94%	14,28%
10	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Poin)	76,52	74,67	97,93%
11	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,09%	3,10%	124,20%
12	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah (Rp Milyar)	92.000.000.000	2.262.423.698.665	2.459%
13	Meningkatnya Kualitas Dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)	54,80%	30,46%	55,58%
		Persentase Pemukiman Yang Layak (%)	80%	82,07%	102,58%
		Rasio Rumah Layak Huni (Rasio)	1:1,068	1:405,1	37,93%



		Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi (%)	75%	75,22%	100%
		Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	77%	76,83%	99,77%
		Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi (%)	32,46%	75,06%	231%
14	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisoliran Daerah	Persentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi (%)	98,17%	100%	101,86%
15	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air Dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0 – 100)	100	100	100%
		Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0 – 100)	53,85	51,08	94,86%
		Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0 – 100)	91,47	94,38	103,18%
16	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	69,15	70,12	101,40%
		Nilai LPPD	2,960	3,012	101,76
17	Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN	Opini BPK	WTP	WTP	100%
18	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	6%	4,28%	71,33%
19	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	88	82,30	93,52%
20	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri (%)	17,74%	6,76%	38,10%



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Pernyataan Reviu	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MALINAU	2
C. ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU	8
D. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>)	11
E. MAKSUD DAN TUJUAN	17
F. SUMBER DAYA MANUSIA	19
G. SISTEMATIKA PENYAJIAN	20

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026	23
1. VISI	23
2. MISI	25
3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	28
4. INDIKATOR KINERJA	30
5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
6. PROGRAM	52
B. RENCANA KERJA TAHUNAN	62
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	65

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	74
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	76
C. REALISASI ANGGARAN	274

BAB IV PENUTUP	277
-----------------------------	-----

LAMPIRAN



Daftar Tabel

Tabel 1.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Malinau	7
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024	8
Tabel 1.3	Rekomendasi Program dan Kegiatan Kabupaten Malinau KLHS RPJMD 2021-2026	12
Tabel 1.4	Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2022-2026 Berdasarkan Isu Strategis	16
Tabel 1.5	Data ASN Daerah Kabupaten Malinau berdasarkan Golongan	19
Tabel 2.1	Nilai-nilai atau Pokok-pokok Visa dan Penjabarannya	24
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Malinau	49
Tabel 2.3	Program-Program Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau ..	53
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja	74
Tabel 3.2	Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Kesehatan.....	77
Tabel 3.2.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	78
Tabel 3.2.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	78
Tabel 3.2.3	Perbandingan antara realisasi Kinerja dengan Nasional	79
Tabel 3.2.4	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024.....	85
Tabel 3.3	Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 Meningkatkan Kesempatan pendidikan Masyarakat	87
Tabel 3.3.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	87
Tabel 3.3.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	88
Tabel 3.3.3	Perbandingan antara realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	88
Tabel 3.3.4	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024.....	93
Tabel 3.4	Evaluasi Pencapaian Sasaran 3 meningkatnya daya beli masyarakat	94
Tabel 3.4.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	95
Tabel 3.4.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	96
Tabel 3.4.3	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024.....	99
Tabel 3.5	Evaluasi Pencapaian Sasaran 4 terciptanya Kehidupan	



	Yang Aman, Tentram dan Harmonis Serta Bebas Bencana	99
Tabel 3.5.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	99
Tabel 3.5.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	100
Tabel 3.4.3	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024.....	103
Tabel 3.5.4	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	103
Tabel 3.5.5	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Dengan Target Jangka Menengah	104
Tabel 3.5.6	Perbandingan antara realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	105
Tabel 3.5.7	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024.....	108
Tabel 3.6	Evaluasi Pencapaian Sasaran 5 Meningkatnya Kesenjangan Gender	109
Tabel 3.6.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	110
Tabel 3.6.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	110
Tabel 3.6.3	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024	112
Tabel 3.7	Evaluasi Pencapaian Sasaran 6 Mantapnya Kehidupan Keagamaan serta karakter dan budaya masyarakat	113
Tabel 3.7.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	114
Tabel 3.7.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	115
Tabel 3.7.3	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024	118
Tabel 3.7.4	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	118
Tabel 3.7.5	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	119
Tabel 3.7.6	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024	122
Tabel 3.8	Evaluasi Pencapaian Sasaran 7 Meningkatnya Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Primer Berorientasi Pada Potensi dan Karakteristik Lokal	123
Tabel 3.8.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	124
Tabel 3.8.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	125
Tabel 3.8.3	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024	128



Tabel 3.9	Evaluasi Pencapaian Sasaran 8 Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi dan Karakteristik Lokal	129
Tabel 3.9.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	130
Tabel 3.9.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	130
Tabel 3.9.3	Jenis dan Kelompok Usaha Industri Di Kabupaten Malinau Tahun 2024.....	132
Tabel 3.9.4	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024	136
Tabel 3.9.5	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	136
Tabel 3.9.6	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	137
Tabel 3.9.7	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024	140
Tabel 3.10	Evaluasi Pencapaian Sasaran 9 Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil dan Mikro Berkualitas	141
Tabel 3.10.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	141
Tabel 3.10.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	142
Tabel 3.10.3	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024	145
Tabel 3.10.4	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	146
Tabel 3.10.5	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	146
Tabel 3.10.6	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024	149
Tabel 3.11	Evaluasi Pencapaian Sasaran 10 Meningkatnya Ketahanan Pangan	149
Tabel 3.11.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	150
Tabel 3.11.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	151
Tabel 3.11.3	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024	158
Tabel 3.12	Evaluasi Pencapaian Sasaran 11 Menurunnya Angka Pengangguran	159
Tabel 3.12.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	160
Tabel 3.12.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	160



Tabel 3.12.3 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Kabupaten Malinau Tahun 2024	161
Tabel 3.12.4 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022....	164
Tabel 3.13 Evaluasi Pencapaian Sasaran 12 Meningkatnya Investasi Daerah	164
Tabel 3.13.1 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	165
Tabel 3.13.2 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	165
Tabel 3.13.3 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022	168
Tabel 3.14 Evaluasi Pencapaian Sasaran 13 Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan	169
Tabel 3.14.1 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	170
Tabel 3.14.2 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	171
Tabel 3.14.3 Data Status Jalan Kabupaten	173
Tabel 3.14.4 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022.....	175
Tabel 3.14.5 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	175
Tabel 3.14.6 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	176
Tabel 3.14.7 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022.....	178
Tabel 3.14.8 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	179
Tabel 3.14.9 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	180
Tabel 3.14.10 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022.....	182
Tabel 3.14.11 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	182
Tabel 3.14.12 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	183
Tabel 3.14.13 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022.....	186
Tabel 3.14.14 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	187
Tabel 3.14.15 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	188
Tabel 3.14.16 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022.....	190
Tabel 3.14.17 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun	



Terakhir	190
Tabel 3.14.18 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	191
Tabel 3.14.19 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022.....	193
Tabel 3.15 Evaluasi Pencapaian Sasaran 14 Meningkatnya Layanan Teknologi Yang Membuka Keterisolasia Daerah	194
Tabel 3.16 Evaluasi Pencapaian Sasaran 15 Meningkatnya kualitas Lahan, air dan udara	203
Tabel 3.16.1 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	204
Tabel 3.16.2 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	204
Tabel 3.16.3 Perbandingan antara realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	205
Tabel 3.16.4 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022.....	208
Tabel 3.16.5 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	209
Tabel 3.16.6 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	210
Tabel 3.16.7 Perbandingan antara realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	210
Tabel 3.16.8 Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Air	212
Tabel 3.16.9 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022.....	215
Tabel 3.16.10 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	216
Tabel 3.16.11 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah	217
Tabel 3.16.12 Perbandingan antara realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	217
Tabel 3.16.13 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022.....	223
Tabel 3.17 Evaluasi Pencapaian Sasaran 16 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	224
Tabel 3.17.1 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	225
Tabel 3.17.2 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	226
Tabel 3.17.3 Capaian Kinerja SAKIP Kabupaten Malinau Tahun 2022.....	227
Tabel 3.17.4 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022....	233
Tabel 3.18 Evaluasi Pencapaian Sasaran 17 Terselenggaranya Pemerintahan Yang Bersi dan Bebas Dari KKN	235
Tabel 3.18.1 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun	



Terakhir	235
Tabel 3.18.2 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	236
Tabel 3.18.3 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022....	239
Tabel 3.19 Evaluasi Pencapaian Sasaran 18 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	240
Tabel 3.19.1 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	241
Tabel 3.19.2 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	241
Tabel 3.20 Evaluasi Pencapaian Sasaran 19 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	245
Tabel 3.20.1 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	246
Tabel 3.20.2 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	247
Tabel 3.20.3 Peringkat Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2022	248
Tabel 3.20.4 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022....	250
Tabel 3.21 Evaluasi Pencapaian Sasaran 20 Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa	251
Tabel 3.21.1 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	252
Tabel 3.21.2 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	252
Tabel 3.21.3 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022....	258
Tabel 3.22 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Konsolidasi) Tahun Anggaran 2022	258
Tabel 3.23 Anggaran, Realisasi dan Capaian Berdasarkan Indikator dan Program	260
Tabel 3.24 Efisiensi Anggaran	264



Daftar Gambar

Gambar 1.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Malinau	4
Gambar 2.1	Keterkaitan Pokok-pokok Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Malinau Periode Tahun 2022-2026	27
Gambar 2.2	Tema/Fokus Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026	35
Gambar 2.3	Keterkaitan Program-program Pembangunan Kabupaten Malinau dengan Visi, Misi, Tujuan, sasaran, Startegi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah selama satu tahun anggaran. Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Malinau menuju *good government* dan *clean government* itulah maka jajaran Pemerintah Kabupaten Malinau berusaha menyajikan Laporan Kinerja untuk kegiatan Tahun 2024 Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada intinya mengamanatkan agar setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, wajib dilaksanakan secara akuntabel dan salah satu bentuknya adalah kewajiban penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaporan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2024 ini disusun dalam empat bab masing-masing Bab I merupakan Pendahuluan, Bab II berisi Perencanaan Kinerja, Bab III berisi Akuntabilitas Kinerja, Bab IV berisi Penutup.

Materi yang disajikan pada laporan ini didasarkan atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Substansi pelaporan didasarkan pada realisasi capaian kinerja tahunan



perencanaan strategis dan pengaruhnya terhadap proses perwujudan kondisi akhir rencana lima tahunan, yang ditetapkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang pada gilirannya pelaporan ini prinsipnya menggambarkan realisasi tahapan pencapaian proses perwujudan cita-cita Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam visi, misi dan program strategis RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Malinau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2024, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD), berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali dan penilai kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan konsep *good governance*, selain itu merupakan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil-hasil kinerja pemerintahan pada tahun 2024.

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MALINAU

Kabupaten Malinau merupakan satu kabupaten dari empat kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur di Provinsi Kalimantan Timur, yang dituangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu daerah yang mampu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggungjawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. KONDISI GEOGRAFIS

Sesuai dengan kondisi geografis, Kabupaten Malinau beriklim tropikahumida dengan curah hujan berkisar antara 2.500 ≥ 4.500 mm per tahun, temperatur udara rata-rata 26°C dengan perbedaan temperatur siang dan malam antara 5°C – 7°C, temperatur minimum umumnya terjadi pada



bulan Nopember sampai dengan Januari, sedangkan temperatur maksimum terjadi antara bulan April sampai dengan bulan Oktober.

Kabupaten Malinau termasuk Kabupaten yang memiliki kekayaan sumberdaya alam yang sangat potensial dan bervariasi jenisnya, antara lain, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan budi daya hasil-hasilnya, pertambangan (batu bara, pasir kuarsa, emas, dll) dan pariwisata.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Kabupaten yang berbatasan dengan Malinau oleh Tim Penegasan Batas Daerah (BPD) Kabupaten Malinau sampai dengan tahun 2024, maka luas wilayah Kabupaten Malinau sebesar 38.973,56 km² yang merupakan daratan dengan topografi bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng, dan ketinggian dari permukaan laut dengan jumlah penduduk pada tahun 2024 sebanyak 87.582 jiwa.

Sebagai daerah pegunungan dan perbukitan, Kabupaten Malinau memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daerah pariwisata dan konservasi alam. Akan tetapi jika dilihat dari letak geografisnya, wilayah Kabupaten Malinau memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daerah perdagangan karbon, karena 91 % wilayahnya masih berupa hutan murni.

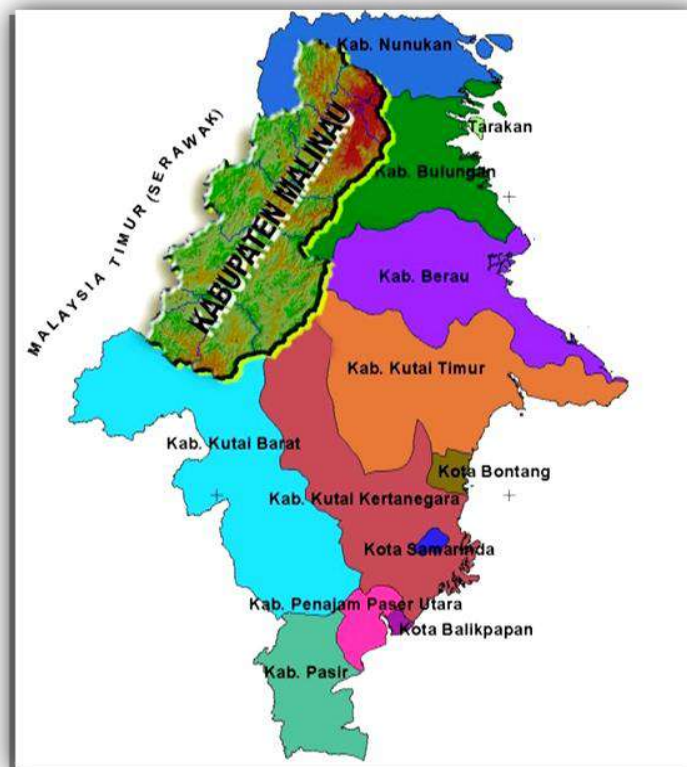
2. KONDISI DEMOGRAFIS

a. Letak Geografis

Kabupaten Malinau merupakan satu dari 4 (empat) Kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan UU nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 16 November 2012. Secara administrasi, Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Secara astronomis, wilayah Kabupaten Malinau terletak antara 114°35'22" sampai dengan 116°50'55" Bujur Timur dan 1°21'36" sampai dengan 4°10'55" Lintang Utara. Secara geografis, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Nunukan; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Tanah Tidung, Berau dan Kutai Timur; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat, Mahakam Hulu, dan Kutai Kartanegara; dan sebelah barat berbatasan dengan Negara Malaysia Timur (Serawak).

Secara Administratif Kabupaten Malinau berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Nunukan.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Hulu dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Negara Malaysia bagian Timur (Serawak).



Gambar 1.1. Wilayah Administrasi Kabupaten Malinau

Kabupaten Malinau terdiri dari 15 kecamatan, 5 Kecamatan diantaranya berbatasan langsung dengan negara Malaysia, 2 Kecamatan merupakan penyangga perbatasan (lihat Gambar 1.1), di mana Kabupaten Malinau termasuk sebagai Kabupaten perbatasan yang hanya dapat terjangkau melalui transportasi sungai dan udara yang menuntut biaya sangat tinggi dalam upaya peningkatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan



dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Malinau.

Keadaan topografi Kabupaten Malinau bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Selanjutnya juga dapat dibedakan atas kawasan perbukitan terjal di sebelah utara bagian barat, perbukitan sedang bagian tengah, dan daratan bergelombang landai di bagian timur. Perbukitan terjal di sebelah utara bagian barat merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian 1.500 m – 3.000 m di atas permukaan laut. Keadaan perbukitan lereng ini memiliki sudut lereng lebih dari 30% dan untuk daerah yang merupakan dataran tinggi, kemiringan berkisar 8 – 15%. Sedangkan untuk daerah perbukitan, kemiringan sangat terjal di atas 15%. Dengan demikian kemiringan rata-rata berkisar antara 0-50%.

Ditinjau dari segi administrasi, wilayah Kabupaten Malinau terdiri dari 15 kecamatan, yakni:

1. **Kecamatan Malinau Kota**, terdiri atas 6 desa yakni: Desa Malinau Kota, Desa Malinau Hulu, Desa Malinau Hilir, Desa Tanjung Keranjang, Desa Batu Lidung, Desa Pelita Kanaan;
2. **Kecamatan Malinau Utara**, terdiri atas 12 desa yakni: Desa Respen Tubu, Desa Semenggaris, Desa Putat, Desa Malinau Seberang, Desa Luso, Desa Belayan, Desa Kaliamok, Desa Lubak Manis, Desa Kelapis, Desa Salap, Desa Seruyung, Desa Sembuak Warod;
3. **Kecamatan Malinau Barat**, terdiri atas 9 desa yakni: Desa Tanjung Lapang, Desa Kuala Lapang, Desa Taras, Desa Sesua, Desa Sempayang, Desa Sentaban, Desa Long Knipe, Desa Long Bila, Desa Punan Bengalun;
4. **Kecamatan Malinau Selatan**, terdiri atas 9 desa yakni: Desa Paya Saturan, Desa Punan Rian, Desa Laban Nyarit, Desa Nunuk Tanah Kibang, Desa Langap, Desa Long Loreh, Desa Sengayan, Desa Pelencau, Desa Bila Bekayuk;
5. **Kecamatan Mentarang**, terdiri atas 9 desa yakni: Desa Long Bisai, Desa Paking, Desa Long Gafid, Desa Harapan Maju, Desa Mentarang Baru, Desa Temalang, Desa Long Liku, Desa Lidung Keminci, Desa Pulau Sapi;



6. **Kecamatan Mentarang Hulu**, terdiri atas 7 desa yakni: Desa Lung Barang, Desa Lung Sulit, Desa Lung Mekatif, Desa Lung Kebinu, Desa Semamu, Desa Lung Pala dan Desa Lung Simau;
7. **Kecamatan Pujungan**, terdiri atas 9 desa yakni : Desa Long Lame, Desa Long Aran, Desa Long Pua, Desa Long Paliran, Desa Belaka Pitau, Desa Long Jelet, Desa Long Ketaman, Desa Pujungan, Desa Long Bena;
8. **Kecamatan Bahau Hulu**, terdiri atas 6 desa yakni : Desa Long Alango, Desa Long Tebulo, Desa Long Uli, Desa Long Kemuat, Desa Long Berini, Desa Apau Ping;
9. **Kecamatan Sungai Boh**, terdiri atas 6 desa yakni : Desa Mahak Baru, Desa Dumu Mahak, Desa Long Lebusan, Desa Agung Baru, Desa Data Baru, Desa Long Top;
10. **Kecamatan Kayan Hulu**, terdiri atas 5 desa yakni : Desa Nawang Baru, Desa Long Temuyat, Desa Long Payau, Desa Long Betaoh, Desa Long Nawang;
11. **Kecamatan Kayan Hilir**, terdiri atas 5 desa yakni : Desa Data Dian, Desa Sungai Anai, Desa Long Sule, Desa Long Metun, Desa Long Pipa;
12. **Kecamatan Kayan Selatan**, terdiri atas 5 desa yakni : Desa Long Ampung, Desa Long Uro, Desa Metulang, Desa Sungai Barang, Desa Lidung Payau;
13. **Kecamatan Malinau Selatan Hulu**, terdiri atas 8 Desa yakni : Desa Long Lake, Desa Punan Mirau, Desa Long Rat, Desa Halanga, Desa Metut, Desa Long Jalan, Desa Nahakramo Baru, Desa Tanjung Nanga.
14. **Kecamatan Malinau Selatan Hilir**, terdiri atas 8 Desa yakni : Desa Setulang, Desa Setarap, Desa Punan Setarap, Desa Batu Kajang, Desa Gong Solok, Desa Punan Gong Solok, Desa Long Adiu dan Desa Punan Long Adiu;
15. **Kecamatan Sungai Tubu**, terdiri dari 5 Desa yakni Desa Long Titi, Desa Long Ranau, Desa Rian Tubu, Desa Long Nyau, Desa Long Pada.

b. Gambaran Umum Demografis

Masalah kependudukan merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan. Penduduk memegang peranan yang sangat vital yaitu sebagai objek maupun subjek dari pembangunan itu sendiri.



Kondisi kependudukan dapat dilihat dari tingkat kelahiran, kematian dan mutasi penduduk. Sedangkan untuk menentukan sasaran pembangunan data kependudukan sangat diperlukan baik mengenai jumlah, jenis kelamin, struktur, komposisi maupun penyebaran/ kepadatan penduduk suatu wilayah. Jumlah penduduk Kabupaten Malinau tahun 2024 sebanyak 87.582 jiwa yang terdiri dari 46.163 laki-laki dan 41.419 perempuan.

Kabupaten Malinau merupakan salah satu kabupaten yang paling luas wilayahnya pasca pemekaran wilayah di Provinsi Kalimantan Utara (UU No. 20 tahun 2012) yakni sekitar 54,8 persen dari luas Provinsi Kalimantan Utara, dengan jumlah penduduk yang paling sedikit. Ini berarti bahwa kurang seimbangnya antara jumlah penduduk dengan luas Kabupaten Malinau.

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Malinau

Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
Malinau Kota	142,07	0,36
Malinau Utara	1.091,18	2,80
Malinau Barat	765,41	1,97
Malinau Selatan	1.154,79	2,97
Mentarang	535,15	1,38
Mentarang Hulu	2.807,20	7,20
Pujungan	6.515,59	16,71
Bahau Hulu	3.103,38	7,97
Sungai Boh	2.801,51	7,19
Kayan Hulu	735,40	1,89
Kayan Hilir	11.863,19	30,43
Kayan Selatan	2.471,50	6,34
Malinau Selatan Hulu	2.171,21	5,58
Malinau Selatan Hilir	572,20	1,46
Sungai Tubu	2.243,78	5,75
Kabupaten Malinau	38,973,56	100

Sumber : Kabupaten Malinau Dalam Angka 2021

Berdasarkan data kependudukan Kabupaten Malinau pada tahun 2024 penduduk Kabupaten Malinau berjumlah 87.682 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 46.163 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 41.419 jiwa. Penyebaran penduduk di Kabupaten Malinau terbesar ada di Kecamatan Malinau Kota sebesar 27.225 jiwa, disusul



Kecamatan Malinau Utara sebesar 16.066 jiwa dan Malinau Barat sebesar 11.960 jiwa. Sedangkan jumlah terkecil ada di Kecamatan Sungai Tubu sebesar 953 jiwa dan Kecamatan Bahau Hulu sebesar 1.005 jiwa.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Perkecamatan Berdasarkan
Jenis Kelamin Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	Mentarang	3.016	2.778	5.794
2	Malinau Kota	14.150	13.075	27.225
3	Pujungan	1.063	937	2.000
4	Kayan Hilir	909	691	1.600
5	Kayan Hulu	1.296	1.206	2.502
6	Malinau Selatan	3.032	2.577	5.609
7	Malinau Utara	8.570	7.496	16.066
8	Malinau Barat	6.269	5.691	11.960
9	Sungai Boh	1.359	1.180	2.539
10	Kayan Selatan	1.038	957	1.995
11	Bahau Hulu	788	657	1.445
12	Mentarang Hulu	991	992	1.913
13	Malinau Selatan Hilir	1.650	1.456	3.106
14	Malinau Selatan Hulu	1.500	1.323	2.823
15	Sungai Tubu	532	473	1.005
Jumlah		46.163	41.419	87.582

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2024

C. ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Malinau diberikan kewenangan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal,



agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksudkan di atas terdiri atas kewenangan wajib meliputi:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan;
7. Penanggulangan masalah sosial;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
12. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
13. Pelayanan administrasi penanaman modal;
14. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
15. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Malinau juga menyelenggarakan urusan lain-lain yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau. Perangkat daerah sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah (Tipe A);
- b. Sekretariat DPRD (Tipe C);
- c. Inspektorat Daerah (Tipe A);



- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah;
- f. Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain; dan
- g. Kecamatan

Sekretariat Daerah terdiri atas:

- 1. Bagian Hukum
- 2. Bagian Tata Pemerintahan
- 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat
- 4. Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam
- 5. Bagian Administrasi Pembangunan
- 6. Bagian Barang dan Jasa
- 7. Bagian Umum
- 8. Bagian Organisasi
- 9. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- 10. Bagian Perencanaan dan keuangan

Dinas Daerah terdiri dari:

- 1. Dinas Pendidikan (Tipe B);
- 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Tipe A);
- 3. Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Tipe B);
- 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe A);
- 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial (Tipe A);
- 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tipe B);
- 7. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe A);
- 8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Tipe A);
- 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tipe C);
- 10. Dinas Ketenagakerjaan (Tipe C)
- 11. Dinas Komunikasi dan Informatika (Tipe B);
- 12. Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tipe A);
- 13. Dinas Perhubungan (Tipe C);
- 14. Dinas Ketahanan Pangan (Tipe B);
- 15. Dinas Pertanian (Tipe C);
- 16. Dinas Perikanan (Tipe C);
- 17. Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A);



18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe B);
19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Tipe A).

Badan Daerah terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Tipe A);
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Tipe A);
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Tipe C);

Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain terdiri dari:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Tipe A)

Kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Malinau Kota (Tipe A);
2. Kecamatan Malinau Utara (Tipe A);
3. Kecamatan Malinau Barat (Tipe A);
4. Kecamatan Malinau Selatan (Tipe A);
5. Kecamatan Mentarang (Tipe A);
6. Kecamatan Mentarang Hulu (Tipe A);
7. Kecamatan Pujungan (Tipe A);
8. Kecamatan Bahau Hulu (Tipe A);
9. Kecamatan Sungai Boh (Tipe A);
10. Kecamatan Kayan Hulu (Tipe A);
11. Kecamatan Kayan Hilir (Tipe A);
12. Kecamatan Kayan Selatan (Tipe A);
13. Kecamatan Malinau Selatan Hulu (Tipe A);
14. Kecamatan Malinau Selatan Hilir (Tipe A); dan
15. Kecamatan Sungai Tubu (Tipe A);

D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Malinau dianalisis berdasarkan pemetaan permasalahan-permasalahan yang ada dan disinkronisasikan dengan isu-isu strategis yang ada di ranah internasional, nasional dan provinsi. Hasil analisis isu-isu strategis juga memperhatikan berbagai masukan dari diskusi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan selanjutnya perlu dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 yang dikelompokkan berdasarkan aspek penting dalam agenda pembangunan adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya pengelolaan dan keberlanjutan ketersediaan SDA (pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan budidaya dan SDA tak dapat pulih).
- 2) Belum mapannya struktur ekonomi yang menjamin pertumbuhan berkualitas dan pemerataan.
- 3) Belum optimalnya pemenuhan hak dasar atas pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha dan bekerja, air bersih dan sanitasi, lingkungan hidup dan kawasan permukiman.
- 4) Masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
- 5) Masih adanya kesenjangan wilayah dan belum optimalnya infrastruktur (infrastruktur layanan dasar, ekonomi, ketenagalistrikan, air dan Teknologi Informasi Komputer).
- 6) Belum kuatnya ketahanan pangan dan energi.
- 7) Menurunnya kualitas lingkungan hidup.
- 8) Belum primanya pelayanan publik dan stabilitas keamanan.

1. Telaahan KLHS RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026

Dalam dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Malinau terdapat beberapa rekomendasi yang tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.3
Rekomendasi Program dan Kegiatan Kabupaten Malinau KLHS RPJMD
2021-2026

No TPB	Deskripsi Indikator	OPD Penanggungjawab	Program	Kegiatan
Pilar Sosial				
TPB 01	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas Ketenagakerjaan	Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan Program	1. Pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan 2. Penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan 3. Pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan
TPB 03	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan dan P2KB	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah	1. Peningkatan upaya promosi kesehatan khusus terkait jaminan kesehatan bagi masyarakat



No TPB	Deskripsi Indikator	OPD Penanggungjawab	Program	Kegiatan
			Kabupate	2. Peningkatan advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat terkait jaminan kesehatan
TPB 05	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1. Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan 2. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan 3. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan
Pilar Lingkungan				
TPB 11	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Peningkatan pelayanan informasi rawan bencana di Kabupaten Malinau	1. Penyusunan kajian resiko bencana kabupaten 2. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana 3. Pengembangan system peringatan dini (early warning system) bencana
			2. Peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1. Penyusunan rencana penanggulangan Bencana 2. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 3. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapan bencana 4. Pengelolaan resiko bencana tingkat kabupaten 5. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan



No TPB	Deskripsi Indikator	OPD Penanggungjawab	Program	Kegiatan
				kesiapsiagaan bencana 6. Penanganan pascabencana 7. Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana
Pilar Hukum dan Tata Kelola				
TPB 16	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	1. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, social, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	1. Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan bidang politik, hukum, social, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan. 2. Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan
			2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan pemberdayaan perempuan	1. Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan 2. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan 3. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan
Pilar Ekonomi				
TPB 17	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	1. Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah 2. Penyusunan



No TPB	Deskripsi Indikator	OPD Penanggungjawab	Program	Kegiatan
				Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat 6. Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi 7. Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi 8. Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 9. Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 10. Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sumber : RPJMD Tahun 2021-2026 Bab IV

2. SASARAN DAN ARAHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021-2026

Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Malinau, khususnya terkait dengan isu-isu strategis yang ada di wilayah ini, maka pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 diarahkan untuk mencapai sasaran pokok (utama) sebagaimana disajikan pada Tabel 1.4 pada kolom “Sasaran Pokok Pembangunan”. Selanjutnya mengacu pada sasaran pokok yang hendak dicapai dalam pembangunan daerah Kabupaten Malinau 2021-2026 serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depan, maka arahan pembangunan Kabupaten Malinau adalah sebagaimana yang disajikan pada Tabel 1.4 pada kolom “Arahan Pembangunan”.

Tabel 1.4

Sasaran Pokok dan Arahan Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 Berdasarkan Isu Strategis

ISU STRATEGIS 1: <i>Belum optimalnya pengelolaan dan keberlanjutan ketersediaan SDA (pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan budidaya dan SDA tak dapat pulih)</i>	
Sasaran Pokok Pembangunan	Arahan Pembangunan
Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi industri melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan tambang yang berkelanjutan	Meningkatkan nilai pengelolaan SDA yang berkelanjutan
ISU STRATEGIS 2: <i>Belum mapannya struktur ekonomi yang menjamin pertumbuhan berkualitas dan pemerataan</i>	
Sasaran Pokok Pembangunan	Arahan Pembangunan
Berkembang dan semakin mantapnya ekonomi lokal dalam rangka transformasi struktur ekonomi dari dominasi sektor primer ke sektor ekonomi sekunder maupun tersier yang menyerap tenaga kerja	Meningkatkan pertumbuhan sektor primer dan industri pengolahan untuk penguatan kewirausahaan UMKM, dan koperasi yang berdayasaing
ISU STRATEGIS 3: <i>Belum optimalnya pemenuhan hak dasar atas pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha dan bekerja, air bersih dan sanitasi, lingkungan hidup dan kawasan permukiman</i>	
Sasaran Pokok Pembangunan	Arahan Pembangunan
Meningkatnya taraf hidup masyarakat dalam pendapatan, penurunan	Meningkatkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan



kemiskinan, tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan gizi serta sistem perlindungan sosial	
ISU STRATEGIS 4: Masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	
Sasaran Pokok Pembangunan	Arahan Pembangunan
Meningkatnya daya saing SDM	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing
ISU STRATEGIS 5: Belum optimalnya infrastruktur dan adanya kesenjangan antar wilayah	
Sasaran Pokok Pembangunan	Arahan Pembangunan
Meningkatnya infrastruktur dan pemerataan pembangunan yang menurunkan tingkat kesenjangan antar-wilayah serta membuat wilayah semakin berkembang	Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan
ISU STRATEGIS 6: Belum kuatnya ketahanan pangan dan energi	
Meningkatnya akses dan ketersediaan pangan dan energi	Meningkatkan akses dan ketersediaan pangan dan energi
ISU STRATEGIS 7: Menurunnya kualitas lingkungan hidup	
Sasaran Pokok Pembangunan	Arahan Pembangunan
Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup dengan menurunnya emisi gas rumah kaca dan bencana akibat kerusakan lingkungan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
ISU STRATEGIS 8: Belum primanya pelayanan publik dan stabilitas keamanan	
Sasaran Pokok Pembangunan	Arahan Pembangunan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan secara bersih, bertanggungjawab, efisien, efektif, tertib dan aman	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan ketertiban keamanan melalui pemantapan reformasi birokrasi

Sumber : RPJMD 2021-2026 BAB IV

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Ketentuan ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus Sistem Pelaporan Kinerja.



Esensi dari sistem Pelaporan Kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Malinau adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian sektor publik di Kabupaten Malinau. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Pemerintahan Kabupaten Malinau untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Pemerintah Kabupaten dapat diwujudkan melalui implelementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang terencana dan terlaksana baik. Implelementasi sistem Pelaporan Kinerja diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang memuat visi, misi dan tujuan/sasaran strategis pemerintah Kabupaten Malinau dan secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah Kabupaten Malinau yang diperoleh. Pada setiap akhir tahun pelaksanaan program/kegiatan, serta capaian kinerjanya dikomunikasikan kepada *stakeholder* dalam wujud Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau.

Pelaporan Kinerja memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu :

1. Pelaporan Kinerja merupakan sarana bagi pemerintah Kabupaten Malinau untuk menyampaikan pertanggung-jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* (Presiden, Kementerian PAN&RB, Kemendagri, Bappenas, Provinsi Kalimantan Utara, BPKP dan masyarakat).
2. Pelaporan Kinerja adalah sarana upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Dua fungsi utama Pelaporan Kinerja tersebut merupakan cerminan dan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Pelaporan Kinerja oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Pelaporan Kinerja 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Malinau atas capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2024.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi menjadikan Pelaporan Kinerja 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh



manajemen pemerintah Kabupaten Malinau bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen pemerintah Kabupaten Malinau dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja pemerintah Kabupaten Malinau dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau periode 31 Desember 2024 sebanyak 3.192 orang terdiri dari Pria 1.639 orang dan Wanita 1.553 orang dengan komposisi menurut tingkat golongan yang sesuai pada tabel data sebagai berikut:

Tabel 1.5

Data ASN Daerah Kabupaten Malinau berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	I/a Juru Muda	0	0	0
2	I/b Juru Muda Tingkat I	0	1	1
3	I/c Juru	4	0	4
4	I/d Juru Tingkat I	9	1	10
Jumlah Golongan I		13	2	15
5	II/a Pengatur Muda	17	10	27
6	II/b Pengatur Muda Tk.I	42	19	61
7	II/c Pengatur	65	26	91
8	II/d Pengatur Tingkat I	96	64	160
Jumlah Golongan II		220	119	339
9	III/a Penata Muda	225	247	472
10	III/b Penata Muda Tk.I	300	357	657
11	III/c Penata	258	323	581
12	III/d Penata Tingkat I	308	264	572
Jumlah Golongan III		1091	1191	2282
13	IV/a Pembina	177	155	332



14	IV/b Pembina Tingkat I	110	85	195
15	IV/c Pembina Utama Muda	27	1	28
16	IV/d Pembina Utama Madya	1	0	1
17	IV/e/Pembina Utama	0	0	0
Jumlah Golongan IV		315	241	556
TOTAL		1.639	1.553	3.192

Sumber: BKPP Kabupaten Malinau (Periode Data 31 Desember 2024)

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Dalam pelaporan kinerja ini disajikan data kegiatan maupun sasaran yang bersifat strategis, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia, terbatas pada indikator input, output dan outcome. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya berasal dari APBN dan Loan/BLN yang juga dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau, disajikan secara terpisah dan tidak dilakukan pengukuran kinerja untuk masing-masing kegiatan tersebut.

Pelaporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan di masa datang.

Sistematika penyajian Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan; menjelaskan secara ringkas profil Pemerintah Kabupaten Malinau dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Pelaporan Kinerja 2024.

Bab II Perencanaan Kinerja; menjelaskan rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Malinau untuk periode 2021-2026 dan rencana kinerja untuk Tahun 2024.



Bab III Akuntabilitas Kinerja; disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Akuntabilitas keuangan menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, termasuk analisis terhadap capaian indikator efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Bab IV Penutup; menjelaskan simpulan menyeluruh dari Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2024 ini dan menguraikan saran-saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk periode dua puluh tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode lima tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (SPPN), rencana strategis yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Malinau yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional, Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan program pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Bupati Malinau pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur, yaitu masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Guna merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi, yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif.



A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021–2026 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

RPJMD Malinau sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah, merupakan komitmen kinerja (*performance agreement*) Kepala Daerah terpilih kepada masyarakat pemilihnya, yang akan dicapai dalam periode 2021-2026. Tujuan, sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Malinau juga memperhatikan tujuan, sasaran dan program-program pembangunan wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Penetapan sasaran dan program-program pembangunan jangka menengah tersebut disesuaikan dengan prediksi kemampuan sumberdaya dan dana, serta hasil-hasil (keluaran dan manfaat) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan manfaat yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran.

RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Dengan memperhatikan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memperhatikan cita-cita dan harapan masyarakat, visi dan misi pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025, capaian kinerja pembangunan daerah serta hasil analisis permasalahan dan isu strategis daerah, maka visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah memiliki keselarasan, sehingga visi pembangunan Kabupaten Malinau dalam RPJMD tahun 2021–2026 adalah :

**TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI,
DAMAI DAN SEJAHTERA
DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL**

Visi yang menjadi dasar pijakan untuk menjabarkan misi pembangunan. Adapun nilai-nilai atau pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Nilai-nilai atau Pokok-pokok Visi dan Penjabarannya

Nilai-Nilai / Pokok-pokok Visi	Penjabaran
Kabupaten Malinau yang Mandiri	Bermakna: 1. Terwujudnya suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki kesempatan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung, serta mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di daerah sehingga mampu mencari solusi dalam mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara tepat guna bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Malinau. 2. Terwujudnya kemajuan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar, terutama pada sektor pangan, Pendidikan, Kesehatan, termasuk juga terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perekonomian, kesempatan berusaha/berinvestasi dan bekerja, lingkungan hidup yang terjaga, serta aspek pembangunan lainnya, dengan penekanan pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM). 3. Terciptanya kemampuan daya saing daerah dengan meningkatnya kualitas destinasi wisata dan jumlah desa wisata mandiri, peningkatan produksi pertanian, perikanan dan perkebunan, peningkatan nilai produksi industri dan perdagangan, serta kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah.
Kabupaten Malinau yang Damai	Terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat Kabupaten Malinau yang terdiri atas berbagai suku bangsa, ras, agama dan budaya dapat hidup dengan tentram dan rukun, hidup penuh toleransi dan harmoni, serta dapat mencapai keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dimana masyarakat berada pada situasi bebas konflik tanpa pertikaian. Ditengah keragaman dan kemajemukan budaya, masyarakat dapat saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Visi ini diharapkan dapat menciptakan suasana kedamaian diantara berbagai kelompok masyarakat serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan penegakan supremasi hukum.
Kabupaten Malinau	Suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar



yang Sejahtera	masyarakat Kabupaten Malinau, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum dan sanitasi dengan harapan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, menurunkan jumlah masyarakat miskin, menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan kesenjangan sosial antar wilayah, serta meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
Pemerintahan yang Profesional	Terwujudnya suatu kondisi dimana berjalannya system pemerintahan secara benar dan bersih (<i>good and clean governance</i>) efektif dan efisien didukung oleh aparatur pemerintah desa, kecamatan dan pemerintah daerah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Visi ini diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk menciptakan inovasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran dan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, murah, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika profesi, serta mampu membangun azas kesetaraan dalam pelayanan publik, yaitu kesamaan dalam mendapatkan perlakuan dan pelayanan. Visi ini juga diharapkan dapat menegakan supremasi hukum (<i>Rule of law</i>) yang konsisten dan non diskriminatif dalam membangun kesadaran hukum dan hak asasi manusia pada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan baik secara langsung atau melalui Lembaga-lembaga perwakilan sah (termasuk masyarakat adat dan kelembagaannya) yang mewakili kepentingan mereka berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Sumber RJMD Tahun 2021-2026

2. M I S I

Misi merupakan rumusan pernyataan mengenai apa yang akan dikerjakan/dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian tersebut serta berlandaskan pada makna visi Kabupaten Malinau, maka ditetapkan misi Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 sebagaimana dinyatakan sebagai berikut :



Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul

Melalui upaya menciptakan sumber daya manusia sehat dan cerdas serta tenaga kerja terampil yang menguasai dan mampu menerapkan IPTEK, berkecukupan pangan, suasana kehidupan yang kondusif aman, tenteram, harmonis dan bebas bencana, tidak terjadi diskriminasi, pemberdayaan perempuan dan anak, serta bebas konflik dengan karakter dan budaya masyarakat yang kuat.

Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal

Melalui upaya pembangunan perekonomian domestik berbasis keunggulan lokal menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi, penciptaan iklim kondusif bagi kegiatan usaha dengan membuka peluang investasi dibidang pertanian dalam arti luas, industri, jasa perdagangan dan pariwisata, ekonomi kreatif, serta memperkuat koperasi dan UMKM.

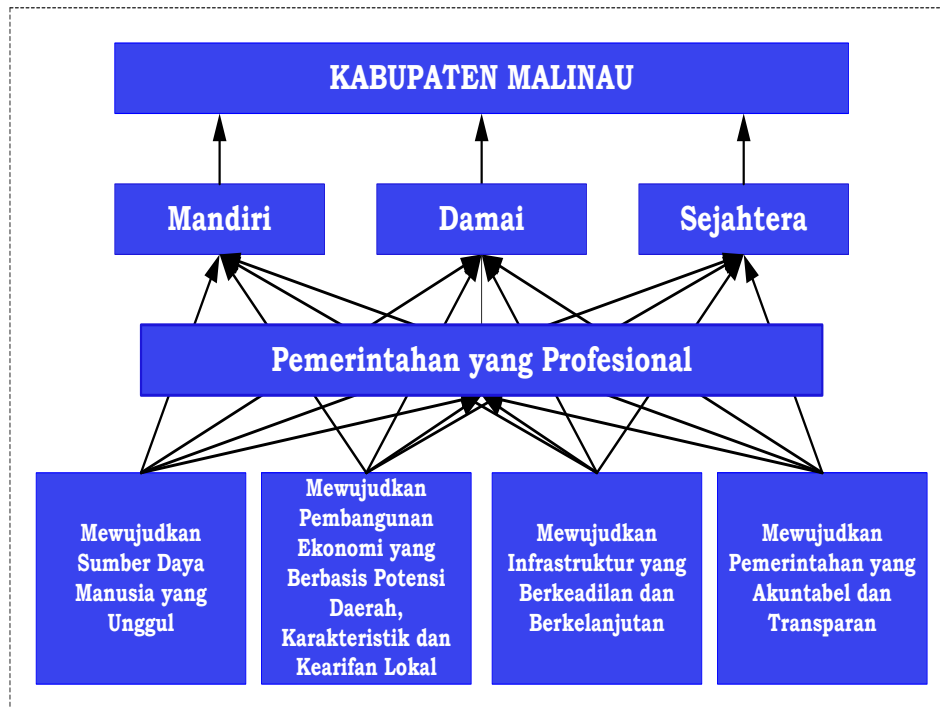
Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Membangun dan mengembangkan infrastruktur ekonomi, sistem transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan permukiman, teknologi komunikasi dan informasi, serta menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas

Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Melalui implementasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, yakni pemerintahan daerah yang profesional, bertanggung jawab, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, efektif, efisien dan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang transparan pemerintahan dimana dalam menjalankan kebijakan, program dan sistemnya dapat diakses informasinya dengan mudah oleh masyarakat.

Visi merupakan tujuan/harapan/cita-cita yang diinginkan, sedangkan misi merupakan langkah atau penjabaran apa yang akan dikerjakan/dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karenanya visi dan misi memiliki keterkaitan yang erat. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari keterkaitan pokok-pokok visi dan misi pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2021–2026, sebagaimana diilustrasikan pada dibawah ini :



Gambar 2.1.

Keterkaitan Pokok-pokok Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Malinau
Periode Tahun 2021–2026

Berdasarkan gambar tersebut di atas dapat dijelaskan keterkaitan antara kemandirian, kedamaian, kesejahteraan maupun keprofesionalan pegawai pemerintah di Kabupaten Malinau dengan SDM, ekonomi, infrastruktur dan pemerintahan. Dimana kemandirian, kedamaian, kesejahteraan maupun keprofesionalan pegawai pemerintah di Kabupaten Malinau dipengaruhi secara simultan oleh berbagai faktor seperti keunggulan SDM, pembangunan ekonomi, pemerataan infrastruktur dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Guna merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Malinau, ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diformulasikan secara lebih terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD berdasarkan misi pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut:

3.1 Tujuan

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi.
2. Menciptakan Suasana Kondusif Yang Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi dan Karakteristik Daerah.
4. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan Dasar.
5. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup.
6. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik (*good governance*).

3.2 Sasaran

1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya kesempatan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatnya daya beli masyarakat.
4. Terciptanya kehidupan yang aman, tenteram dan harmonis dan serta bebas bencana.
5. Meningkatnya kesetaraan gender.



6. Mantapnya kehidupan keagamaan serta karakter dan budaya masyarakat.
7. Meningkatnya produktifitas sektor-sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal.
8. Meningkatnya nilai tambah sektor industri, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berorientasi pada potensi dan karakteristik wilayah.
9. Meningkatnya pertumbuhan koperasi serta usaha kecil dan mikro yang berkualitas.
10. Meningkatnya ketahanan pangan.
11. Menurunnya angka pengangguran.
12. Meningkatnya investasi daerah.
13. Meningkatnya kualitas dan akses infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
14. Meningkatnya layanan teknologi informasi yang membuka keterisolasian daerah.
15. Meningkatnya kualitas layanan lahan, air dan udara.
16. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah.
17. Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
18. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah.
19. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
20. Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan berbasis desa



4. INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021-2026

MISI I MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Memiliki daya Saing Tinggi	Indeks pembangunan manusia (IPM)	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup
		Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita
Menciptakan Suasana Kondusif Yang Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Ketahanan Nasional	Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenang dan Harmonis Serta Bebas Bencana	Angka Kriminalitas
			Indeks Resiko Bencana
		Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender
		Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter dan Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama
			Indeks Pembangunan Kebudayaan

MISI II

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERBASIS PADA POTENSI DAERAH, KARAKTERISTIK DAN KEARIFAN LOKAL

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi dan Karakteristik Daerah	Pertumbuhan PDRB.	Meningkatnya produktifitas sektor-sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB
		Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Industri, Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB
	Indeks Gini.	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil dan Mikro yang Berkualitas	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB
			Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas
	Angka Kemiskinan		Pesentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil
	Laju Inflasi.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan
		Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka
		Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah



MISI III MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan Dasar	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatnya Kualitas Dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Pesentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap
			Pesentase Pemukiman Yang Layak
			Rasio Rumah Layak Huni
			Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi
			Persentase Penduduk Berakses Air Minum
			Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi
Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisolasian Daerah	Persentase Wilayah Yang Terlayani Telekomunikasi
		Meningkatnya Kualitas Lahan, Air Dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan
			Indeks Kualitas Air
			Indeks Kualitas Udara

MISI IV

MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik (good governance)	Indeks RB	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP
			Nilai LPPD
		Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN	Opini BPK
		Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa	Persentase Peningkatan status Desa Mandiri

5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan serangkaian tahapan yang berisikan rancangan utama/induk perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Beberapa langkah telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Malinau Periode Tahun 2021 – 2026, antara lain:

- (1) pengkajian terhadap sasaran pembangunan periode sebelumnya;
- (2) pengkajian gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan;
- (3) pengkajian permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;

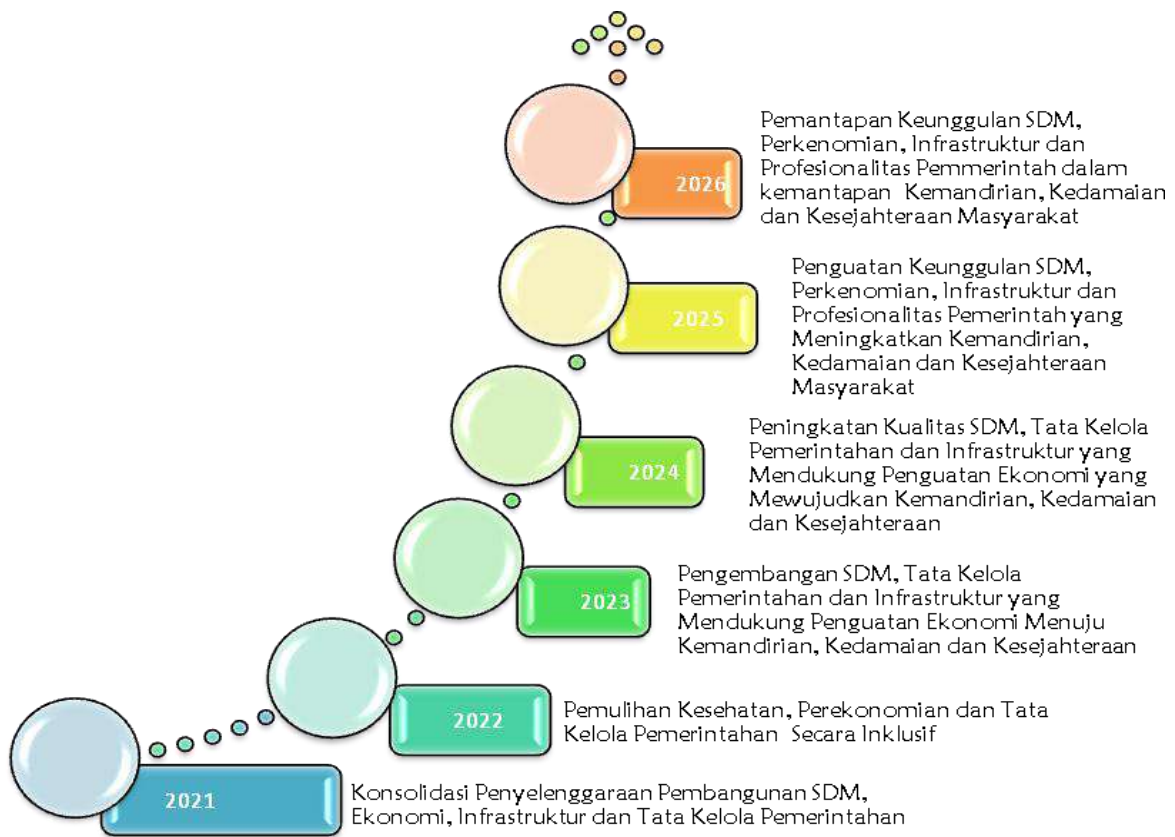


- (4) pengkajian lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan dihadapi daerah;
- (5) mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki; dan
- (6) memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah.

Di sisi lain, arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan dalam perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama periode kepala daerah terpilih guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Malinau Periode Tahun 2021–2026 yang rancang untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan memperhatikan urusan wajib pemerintah daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, agenda dan prioritas pembangunan nasional, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan kapasitas perangkat daerah Kabupaten Malinau.

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk merasionalkan pilihan strategi sehingga rencana pembangunan memiliki tema/fokus. Penekanan tema/fokus setiap tahun selama periode RPJMD harus memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.



Gambar 2.2
Tema/Fokus Pembangunan Kabupaten Malinau
Tahun 2021–2026

Berdasarkan Tema/fokus pembangunan Kabupaten Malinau sebagaimana sebagaimana disajikan pada Gambar 6.1, maka tahapan pembangunan secara berturut-turut dalam kurun waktu 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah Tahap Konsolidasi (tahap 1 tahun 2021), Tahap Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19 (tahap II tahun 2022), Tahap Pengembangan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan (tahap III tahun 2024), Tahap Peningkatan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan (tahap IV tahun 2024), Tahap Penguatan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan (tahap V tahun 2025) dan Tahap Pemantapan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan (tahap VI tahun 2026). Secara rinci berkenaan dengan tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut :

1) Tahap Konsolidasi



Tahun 2021 merupakan tahapan I atau “Tahapan Konsolidasi”, dimana tahun 2021 merupakan masa transisi pemerintahan Kabupaten Malinau dari kepala Daerah Periode 2016 – 2021 kepada Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) periode tahun 2021 – 2024. Oleh karenanya, pada awal kepemimpinan kepala daerah Kabupaten Malinau melakukan konsolidasi atas penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Malinau yang meliputi: (1) penyelenggaraan pembangunan SDM; (2) penyelenggaraan pembangunan ekonomi; (3) penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur fisik maupun non fisik; (4) penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, khususnya yang terkait dengan pelayanan publik; (5) lain-lain sesuai urusan daerah. Sehingga tema/fokus pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2021 adalah “Konsolidasi Penyelenggaraan Pembangunan SDM, Ekonomi, Infrastruktur dan Tata Kelola Pemerintahan”. Sesuai kondisi, konsolidasi atas penyelenggaraan pembangunan tersebut tidak terlepas dari upaya penanganan pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia tak terkecuali Kabupaten Malinau sejak tahun 2020 yang lalu. Dimana penyelenggaraan pembangunan bidang SDM, ekonomi, infrastruktur dan tata Kelola pemerintahan diarahkan pada upaya mendukung penanganan pandemi Covid-19.

2) Tahap Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19

Tahun 2024 merupakan tahapan II atau “Tahapan Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19” dalam RPJMD Kabupaten Malinau periode tahun 2021 - 2026, dimana tema/fokus pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2024 adalah “Pemulihan Kesehatan, Perekonomian dan Tata Kelola Pemerintahan Secara Inklusif”. Hal ini sejalan dengan upaya penanganan pandemi covid-19 pada tahun 2020 - 2021. Makna dari tema/fokus pembangunan tersebut dideskripsikan sebagai berikut: Proses pemulihan berbagai aspek kehidupan pasca pandemi Covid-19 perlu



dilakukan mengingat dampak pandemi Covid-19 setara dengan bencana besar atau perang, sehingga dibutuhkan program pemulihan kesehatan dan ekonomi dengan pemerintah sebagai pemain utamanya, tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Malinau. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Malinau harus memastikan upaya pembangunan yang menjamin pemulihan kesehatan dan ekonomi, yang dilakukan melalui prioritas pembangunan sebagai berikut: (1) Peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat; (2) Peningkatan ketahanan pangan; (3) Peningkatan produktifitas sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal; (4) Peningkatan nilai tambah sektor industri, perdagangan dan jasa; (5) Pembangunan infrastruktur pemerataan ekonomi; (6) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah; dan (7) Peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Malinau harus tetap memperhatikan penyelenggaraan pembangunan bidang lainnya, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan sosial, peningkatan dukungan sistem informasi pelayanan publik, peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan lain-lain yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah Kabupaten Malinau.

3) Tahap Pengembangan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan

Tahun 2024 merupakan tahapan III atau “Tahapan Pengembangan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan” dalam RPJMD Kabupaten Malinau periode tahun 2021-2026, dimana tema/fokus pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2024 adalah “Pengembangan SDM, Tata Kelola Pemerintahan dan Infrastruktur yang Mendukung Penguatan Ekonomi Menuju Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan”. Dalam hal ini, pengembangan berarti pemerintah selalu berusaha secara bertahap dan teratur melaksanakan pembangunan yang mengarah pada tujuan dan



sasaran yang dikehendaki. Secara rinci makna dari tema pembangunan tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

a. Pengembangan SDM

Manusia merupakan modal utama pembangunan Kabupaten Malinau untuk menuju pembangunan yang mengikutsertakan semuanya dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Kabupaten Malinau berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter melalui: (1) pengembangan kualitas layanan kesehatan masyarakat; (2) pengembangan kualitas layanan pendidikan; (3) pengembangan produktivitas tenaga kerja; (4) pengembangan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan; (5) pengembangan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan kepada masyarakat; (6) pengembangan peran dan partisipasi gender dalam pembangunan; dan (7) pengembangan karakter bangsa, kehidupan keagamaan, politik dan budaya.

b. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah Kabupaten Malinau harus terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, termasuk dunia usaha yang memperkuat perekonomian daerah melalui: (1) pengembangan perencanaan, dan evaluasi pembangunan; (2) pengembangan kualitas pelaporan, pembinaan dan pengawasan internal Pemerintahan Daerah; (3) pengembangan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai standar; (4) pengembangan zona integritas yang bebas korupsi, bersih dan melayani; (5) pengembangan pendapatan pajak, retribusi, dan sumber-sumber lainnya;

- (6) pengembangan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah; (7) pengembangan akses informasi publik yang akurat dan up to date; (8) pengembangan cakupan layanan publik; dan (9) pengembangan penyelenggaraan pemerintahan desa.

c. Pengembangan Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan infrastruktur yang mampu menciptakan/menguatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan/berkesinambungan ini dilakukan melalui : (1) Pengembangan kondisi kualitas jalan, jembatan dan drainase; (2) Pengembangan fasilitas perhubungan darat, sungai dan laut; (3) Pengembangan ketersediaan air bersih konsumsi domestic; (4) Pengembangan fasilitas perdagangan pasar tradisional; (5) Pengembangan pelayanan irigasi; (6) Pengembangan drainase lingkungan perumahan/ permukiman; (7) Pengembangan sarana prasarana sanitasi perumahan/ permukiman; (8) Pengembangan rumah layak huni; (9) Pengembangan jangkauan layanan informasi digital dan sistem informasi pelayanan publik; (10) Pengembangan pengendalian pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran dan kerusakan lahan gambut, serta pengendalian tutupan lahan; dan (11) Pengembangan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah.

d. Pengembangan Penguatan Ekonomi

Pengembangan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong perkembangan ekonomi yang

mengarah pada penguatan ekonomi yang berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pengembangan ekonomi dapat dipacu untuk mencapai pertumbuhan yang lebih baik dan berdaya saing melalui: (1) Pengembangan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; (2) Pengembangan keberdayaan pelaku industri dan sarana prasarana industri; (3) Pengembangan perizinan dan kestabilan harga; (4) Pengembangan sarana distribusi perdagangan dan ekspor; (5) Pengembangan perlindungan terhadap konsumen; (6) Pengembangan peran jasa konstruksi dan jasa angkutan; (7) Pengembangan daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata alam dan lingkungan; (8) Pengembangan desa wisata budaya; Mengembangkan sumber daya ekonomi kreatif; (9) Pengembangan desa kreatif; (10) Pengembangan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat; (11) Pengembangan kinerja koperasi dan UMKM; dan (12) Pengembangan promosi dan pelayanan perijinan investasi.

4) Tahap Peningkatan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan

Tahun 2024 merupakan tahapan IV atau “Tahapan Peningkatan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan” dalam RPJMD Kabupaten Malinau periode tahun 2021 - 2026, dimana tema/fokus pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2024 adalah “Peningkatan Kualitas SDM, Tata Kelola Pemerintahan dan Infrastruktur yang Mendukung Penguatan Ekonomi yang Mewujudkan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan”. Dalam hal ini, peningkatan dimaksud berarti pemerintah Kabupaten Malinau secara berkesinambungan melakukan upaya untuk semakin menambah/meningkatkan pengembangan dan pembangunan untuk mencapai kemajuan sesuai tujuan dan sasaran yang dikehendaki, meliputi peningkatan dalam aspek kualitas SDM, tata Kelola pemerintahan, infrstruktur dan

ekonomi. Secara rinci makna dari tema pembangunan tersebut dideskripsikan sebagai berikut :

a. Peningkatan SDM

Pemerintah Kabupaten Malinau berkomitmen secara berkesinambungan untuk meningkatkan pengembangan dan pembangunan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang semakin sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter melalui: (1) Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat; (2) Peningkatan kualitas layanan pendidikan; (3) Peningkatan produktivitas tenaga kerja; (4) Peningkatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan; (5) Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan kepada masyarakat; (6) Peningkatan peran dan partisipasi gender dalam pembangunan; dan (7) Peningkatan karakter bangsa, kehidupan keagamaan, politik dan budaya.

b. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Malinau semakin hadir dalam melindungi segenap warga masyarakat, memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas dengan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat dari berbagai kalangan tak terkecuali masyarakat dunia usaha yang berperan dalam memperkuat perekonomian daerah melalui: (1) Peningkatan perencanaan, dan evaluasi pembangunan; (2) Peningkatan kualitas pelaporan, pembinaan dan pengawasan internal Pemerintahan Daerah; (3) Peningkatan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai standar; (4) Peningkatan zona integritas yang bebas korupsi, bersih dan melayani; (5) Peningkatan pendapatan pajak, retribusi, dan sumber-sumber lainnya; (6) Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah; (7) Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan

up to date; (8) Peningkatan cakupan layanan publik; dan (9) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

c. Peningkatan Infrastruktur

Peningkatan pengembangan infrastruktur dimaksudkan untuk semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar. Peningkatan pengembangan infrastruktur yang semakin menciptakan/ menguatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan/ berkesinambungan ini dilakukan melalui: (1) Peningkatan kondisi kualitas jalan, jembatan dan drainase; (2) Peningkatan fasilitas perhubungan darat, sungai dan laut; (3) Peningkatan ketersediaan air bersih konsumsi domestik; (4) Peningkatan fasilitas perdagangan pasar tradisional; (5) Peningkatan pelayanan irigasi; (6) Peningkatan drainase lingkungan perumahan/permukiman; (7) Peningkatan sarana prasarana sanitasi perumahan/permukiman; (8) Peningkatan rumah layak huni; (9) Peningkatan jangkauan layanan informasi digital dan sistem informasi pelayanan public; (10) Peningkatan pengendalian pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran dan kerusakan lahan gambut, serta pengendalian tutupan lahan; dan (11) Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah.

d. Peningkatan Penguatan Ekonomi

Hasil dari upaya pengembangan inovasi dan kualitas investasi harus terus ditingkatkan untuk semakin mendorong peningkatan ekonomi yang menguatkan perekonomian daerah. Peningkatan perekonomian ini dipacu untuk mencapai pertumbuhan yang semakin lebih baik dan semakin berdaya saing melalui: (1) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; (2) Peningkatan keberdayaan pelaku industri dan sarana

prasarana industri; (3) Peningkatan perizinan dan kestabilan harga; (4) Peningkatan sarana distribusi perdagangan dan ekspor; (5) Peningkatan perlindungan terhadap konsumen; (6) Peningkatan peran jasa konstruksi dan jasa angkutan; (7) Peningkatan daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata alam dan lingkungan; (8) Peningkatan desa wisata budaya; (9) Peningkatan sumber daya ekonomi kreatif; (10) Peningkatan desa kreatif; (11) Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat; (12) Peningkatan kinerja koperasi dan UMKM; dan (13) Peningkatan promosi dan pelayanan perijinan investasi.

5) Tahap Penguatan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan

Tahun 2025 merupakan tahapan V atau “Tahapan Penguatan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan” dalam RPJMD Kabupaten Malinau periode tahun 2021 - 2026, dimana tema/fokus pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2025 adalah “Penguatan Keunggulan SDM, Perkenomian, Infrastruktur dan Profesionalitas Pemerintah yang Meningkatkan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan Masyarakat”. Dalam hal ini, penguatan dimaksud berarti pemerintah Kabupaten Malinau secara berkesinambungan melakukan upaya untuk semakin berdaya dalam melakukan pengembangan dan pembangunan untuk mencapai kemajuan sesuai tujuan dan sasaran yang dikehendaki, meliputi penguatan/keberdayaan dalam aspek keunggulan SDM, tata Kelola pemerintahan, infrastruktur dan ekonomi. Secara rinci makna dari tema pembangunan tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

a. Penguatan Keunggulan SDM

Pemerintah Kabupaten Malinau terus melakukan upaya penguatan dalam pengembangan dan pembangunan keunggulan SDM yaitu sumber daya manusia yang semakin unggul dari sisi kesehatan, kecerdasan, inovasi, keterampilan, dan karakternya melalui: (1) Penguatan layanan kesehatan

masyarakat; (2) Penguatan layanan pendidikan; (3) Penguatan produktivitas tenaga kerja; (4) Penguatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan; (5) Penguatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan kepada masyarakat; (6) Penguatan peran dan partisipasi gender dalam pembangunan; dan (7) Penguatan karakter bangsa, kehidupan keagamaan, politik dan budaya.

b. Penguatan keunggulan perekonomian

Penguatan perekonomian dipacu untuk mencapai pertumbuhan yang semakin prima/unggul melalui: (1) Penguatan keunggulan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; (2) Penguatan keunggulan keberdayaan pelaku industri dan sarana prasarana industri; (3) Penguatan keunggulan perizinan dan kestabilan harga; (4) Penguatan keunggulan sarana distribusi perdagangan dan ekspor; (5) Penguatan keunggulan perlindungan terhadap konsumen; (6) Penguatan keunggulan peran jasa konstruksi dan jasa angkutan; (7) Penguatan keunggulan daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata alam dan lingkungan; (8) Penguatan keunggulan desa wisata budaya; (9) Penguatan keunggulan sumber daya ekonomi kreatif; (10) Penguatan keunggulan desa kreatif; (11) Penguatan keunggulan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat; (12) Penguatan keunggulan kinerja koperasi dan UMKM; dan (13) Penguatan keunggulan promosi dan pelayanan perijinan investasi.

c. Penguatan Keunggulan Infrastruktur

Penguatan keunggulan infrastruktur dimaksudkan untuk semakin memberdayakan pertumbuhan ekonomi dan memberdayakan pemenuhan pelayanan dasar. Penguatan keunggulan infrastruktur yang semakin memberdayakan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar secara berkelanjutan/berkesinambungan ini dilakukan melalui: (1)



Penguatan keunggulan kondisi kualitas jalan, jembatan dan drainase; (2) Penguatan keunggulan fasilitas perhubungan darat, sungai dan laut; (3) Penguatan keunggulan ketersediaan air bersih konsumsi domestik; (4) Penguatan keunggulan fasilitas perdagangan pasar tradisional; (5) Penguatan keunggulan pelayanan irigasi; (6) Penguatan keunggulan drainase lingkungan perumahan/permukiman; (7) Penguatan keunggulan sarana prasarana sanitasi perumahan/permukiman; (8) Penguatan keunggulan rumah layak huni; (9) Penguatan keunggulan jangkauan layanan informasi digital dan sistem informasi pelayanan publik; (10) Penguatan keunggulan pengendalian pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran dan kerusakan lahan gambut, serta pengendalian tutupan lahan; dan (11) Penguatan keunggulan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah.

d. Penguatan Profesionalitas Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki tata kelola pemerintahan semakin kuat dan didukung aparatur yang professional serta dapat memberikan pelayanan publik yang semakin prima/unggul serta berperan dalam memperkuat perekonomian daerah melalui: (1) Penguatan profesionalitas dalam perencanaan, dan evaluasi pembangunan; (2) Penguatan profesionalitas dalam penyusunan dokumen pelaporan, pembinaan dan pengawasan internal Pemerintahan Daerah; (3) Penguatan profesionalitas dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai standar; (4) Penguatan profesionalitas dalam mewujudkan zona integritas yang bebas korupsi, bersih dan melayani; (5) Penguatan profesionalitas dalam pengelolaan pendapatan pajak, retribusi, dan sumber-sumber lainnya; (6) Penguatan profesionalitas dalam

pelaksanaan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah; (7) Penguatan profesionalitas dalam penyediaan akses informasi publik yang akurat dan up to date; (8) Penguatan profesionalitas dalam cakupan layanan publik; dan (9) Penguatan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

6) Tahap Pemantapan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan

Tahun 2026 merupakan tahapan VI atau “Tahapan Pemantapan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan” dalam RPJMD Kabupaten Malinau periode tahun 2021 - 2026, dimana tema/fokus pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2026 adalah “Pemantapan Keunggulan SDM, Perkenomian, Infrastruktur dan Profesionalitas Pemerintah dalam kemantapan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan Masyarakat”. Dalam hal ini, pemnatapan dimaksud berarti pemerintah Kabupaten Malinau secara berkesinambungan melakukan upaya untuk semakin memperkuat pengembangan dan pembangunan untuk mencapai kemajuan sesuai tujuan dan sasaran yang dikehendaki, meliputi kemantapan dalam aspek keunggulan SDM, tata Kelola pemerintahan, infrstruktur dan ekonomi. Secara rinci makna dari tema pembangunan tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

a. Pemantapan Keunggulan SDM

Pemerintah Kabupaten Malinau terus melakukan upaya memperkuat/ memperkuat pengembangan dan pembangunan keunggulan SDM yaitu sumber daya manusia yang semakin mantap/kokoh dari sisi kesehatan, kecerdasan, inovasi, keterampilan, dan karakternya melalui: (1) Pemantapan layanan kesehatan masyarakat; (2) Pemantapan layanan pendidikan; (3) Pemantapan produktivitas tenaga kerja; (4) Pemantapan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan; (5) Pemantapan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan kepada

masyarakat; (6) Pemantapan peran dan partisipasi gender dalam pembangunan; dan (7) Pemantapan karakter bangsa, kehidupan keagamaan, politik dan budaya.

b. Pemantapan Keunggulan Perekonomian

Pemantapan perekonomian dipacu untuk mencapai pertumbuhan yang sangat prima/unggul melalui: (1) Penguatan keunggulan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; (2) Penguatan keunggulan keberdayaan pelaku industri dan sarana prasarana industri; (3) Penguatan keunggulan perizinan dan kestabilan harga; (4) Penguatan keunggulan sarana distribusi perdagangan dan ekspor; (5) Penguatan keunggulan perlindungan terhadap konsumen; (6) Penguatan keunggulan peran jasa konstruksi dan jasa angkutan; (7) Penguatan keunggulan daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata alam dan lingkungan; (8) Penguatan keunggulan desa wisata budaya; (9) Penguatan keunggulan sumber daya ekonomi kreatif; (10) Penguatan keunggulan desa kreatif; (11) Penguatan keunggulan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat; (12) Penguatan keunggulan kinerja koperasi dan UMKM; dan (13) Penguatan keunggulan promosi dan pelayanan perijinan investasi.

c. Pemantapan Keunggulan Infrastruktur

Pemantapan pengembangan infrastruktur dimaksudkan untuk semakin memperkuat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat pemenuhan pelayanan dasar. Pemantapan keunggulan infrastruktur yang semakin memperkuat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan/berkesinambungan ini dilakukan melalui: (1) Pemantapan keunggulan kondisi kualitas jalan, jembatan dan drainase; (2) Pemantapan keunggulan fasilitas perhubungan darat, sungai dan laut; (3) Pemantapan keunggulan ketersediaan air bersih konsumsi domestik; (4) Pemantapan keunggulan fasilitas



perdagangan pasar tradisional; (5) Pemantapan keunggulan pelayanan irigasi; (6) Pemantapan keunggulan drainase lingkungan perumahan/permukiman; (7) Pemantapan keunggulan sarana prasarana sanitasi perumahan/permukiman; (8) Pemantapan keunggulan rumah layak huni; (9) Pemantapan keunggulan jangkauan layanan informasi digital dan sistem informasi pelayanan publik; (10) Pemantapan keunggulan pengendalian pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran dan kerusakan lahan gambut, serta pengendalian tutupan lahan; dan (11) Pemantapan keunggulan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah.

d. Pemantapan Profesionalitas Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki tata kelola pemerintahan semakin mantap/kokoh dan didukung aparatur yang professional serta dapat memberikan pelayanan publik yang sangat prima/unggul serta berperan dalam memantapkan/memperkokoh perekonomian daerah serta berperan dalam memantapkan/memperkokoh perekonomian daerah melalui: (1) Pemantapan profesionalitas dalam perencanaan, dan evaluasi pembangunan; (2) Pemantapan profesionalitas dalam penyusunan dokumen pelaporan, pembinaan dan pengawasan internal Pemerintahan Daerah; (3) Pemantapan profesionalitas dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai standar; (4) Pemantapan profesionalitas dalam mewujudkan zona integritas yang bebas korupsi, bersih dan melayani; (5) Pemantapan profesionalitas dalam pengelolaan pendapatan pajak, retribusi, dan sumber-sumber lainnya; (6) Pemantapan profesionalitas dalam pelaksanaan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah; (7) Pemantapan

profesionalitas dalam penyediaan akses informasi publik yang akurat dan up to date; (8) Pemantapan profesionalitas dalam cakupan layanan publik; dan (9) Pemantapan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tabel 2.2.
Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Malinau

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul			
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi	1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1. Peningkatan kualitas layanan Kesehatan masyarakat	1. Memantapkan UKP, UKM dan ketersediaan farmasi, makanan minuman dan alat kesehatan 2. Meningkatkan kompetensi SDM dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan
	2. Meningkatnya kesempatan pendidikan masyarakat	1. Peningkatan kesempatan pendidikan masyarakat	1. Memantapkan pengelolaan pendidikan jenjang SD, SMP, PAUD dan kesetaraan/non formal 2. Mengembangkan kurikulum muatan lokal, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 3. Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat
2. Menciptakan suasana kondusif yang mendukung pengembangan Sumber daya Manusia	1. Terciptanya kehidupan yang aman, tenteram dan harmonis serta bebas bencana	1. Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan kepada masyarakat 2. Penguatan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana	1. Meningkatkan pemberdayaan perlindungan masyarakat 1. Meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap bencana
		1. Peningkatan peran dan partisipasi gender dalam pembangunan	1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan 2. Meningkatkan cakupan layanan dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan
	3. Mantapnya kehidupan	1. Penguatan karakter bangsa,	1. Menguatkan ideologi pancasila



	keagamaan serta karakter dan budaya masyarakat	kehidupan keagamaan, politik dan budaya	2. Memperkuat kerukunan umat beragama, budaya politik dan fasilitasi penanganan konflik
MISI 2: Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Pada Potensi Daerah, karakteristik dan Kearifan Lokal			
1. Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi dan Karakteristik Daerah	1. Meningkatkan produktifitas sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal	1. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas	1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan
	2. Meningkatkan nilai tambah sektor industri, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berorientasi pada potensi dan karakteristik wilayah	1. Pengembangan keanekaragaman dan kualitas produk industri lokal	2. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan
		2. Penguatan industri perdagangan dan jasa daerah	1. Memberdayakan pelaku industri dan Mengembangkan sarana prasarana industri
			1. Mengendalikan perizinan dan menstabilkan harga
			2. Mengembangkan sarana distribusi perdagangan dan ekspor
			3. Memantapkan perlindungan terhadap konsumen
		3. Peningkatan kunjungan wisata	4. Memperkuat peran jasa konstruksi dan jasa angkutan
			1. Meningkatkan daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata alam dan lingkungan
			2. Mengembangkan desa wisata budaya
			1. Mengembangkan sumber daya ekonomi kreatif
	3. Mantapnya kemandirian ekonomi masyarakat	1. Penguatan kemandirian masyarakat serta koperasi dan UMKM	2. Mengembangkan desa kreatif
			1. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat
	4. Meningkatkan profesionalitas tenaga kerja	1. Peningkatan produktivitas tenaga kerja	2. Mengembangkan dan meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM
			1. Memantapkan perencanaan dan penempatan tenaga kerja
	5. Meningkatkan ketahanan pangan	2. Pemantapan hubungan kerja dan pengendalian ketenagakerjaan	2. Meningkatkan pelatihan tenaga kerja
		1. Peningkatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan	1. Memperkuat hubungan industrial bidang ketenagakerjaan
			1. Meningkatkan kedaulatan dan keamanan pangan
			2. Meningkatkan diversifikasi pangan
	4. Meningkatkan Investasi Daerah	1. Penciptaan iklim usaha penanaman modal yang	3. Meningkatkan penanganan gempakan pangan
			1. Meningkatkan promosi dan pelayanan perijinan investasi



		kondusif	
MISI 3: Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan			
1. Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	1. Terbangun dan berkembangnya infrastruktur pemertaaan ekonomi berwawasan lingkungan	1. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur perhubungan	1. Meningkatkan kondisi kualitas jalan, jembatan dan drainase
			2. Meningkatkan fasilitas perhubungan darat, sungai dan laut
		2. Peningkatan infras truktur air bersih	1. Meningkatkan ketersediaan air bersih konsumsi domestik
		3. Peningkatan infrastruktur perdagangan	1. Mengembangkan fasilitas perdagangan pasar tradisional
		4. Peningkatan jaringan pengairan/irigasi	1. Meningkatkan pelayanan irigasi
	2. Meningkatkan kualitas perumahan/ permukiman	1. Pembangunan sarana prasarana perumahan/ permukiman	1. Membangun drainase lingkungan perumahan/permukiman
			2. Membangun sarana praarana sanitasi perumahan/permukiman
			3. Membangunrumahlayakh uni
	3. Berkembangnya sistem teknologi informasi yang membuka keterisoliran daerah	1. Peningkatan kualitas pelayanan bidangKomunikasi dan Informatika didukung sarana dan prasarana yang memadai	1. Meningkatkan jangkauan layanan informasi digital
	4. Berkembangnya dukungan sistem informasi pelayanan publik	1. Pengembangan dukungan sistem informasi pelayanan publik	1. Mengembangkan sistem informasi pelayanan publik
2. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkanaku alitaslahan, air dan udara	1. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Mengendalikan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran dan kerusakan lahan gambut, serta pengendalian tutupan lahan
			2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah
MISI 4: Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Transparan			
1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (good governance)	1. Meningkatnyaak untabilitaskinerja pemerintah	1. Penguatan perencanaan, dan evaluasi pembangunan	1. Memantapkan perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis kinerja
		2. Peningkatan kualitas pelaporan dan pengawasan internal Pemerintahan	1. Meningkatkan kualitas pelaporan pembangunan berbasis kinerja
			2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan



		Daerah	penyelenggaraan pemerintahan daerah
	2. Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN	1. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih	1. Meningkatkan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai standar
		2. Peningkatan zona integritas yang bebas korupsi	1. Meningkatkan WBK dan WBBM
	3. Meningkatnya Ke mandirian Keuangan Daerah	1. Intensifikasi peningkatan pendapatan pajak, retribusi, dan sumber-sumber lainnya	1. Meningkatkan pendapatan pajak, retribusi, dan sumber-sumber lainnya
	4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date	1. Peningkatan cakupan layanan pengukuran IKM 2. Peningkatan akses informasi publik 3. Meningkatkan cakupan layanan publik 4. Menyediakan informasi publik yang akurat dan up to date
	5. Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan berbasis desa	1. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa	1. Meningkatkan pelayanan umum dan tata kelola pemerintahan desa

Sumber RPJMD BAB 6

6. PROGRAM

Program Pembangunan Daerah

Pencapaian target indikator kinerja tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malinau periode tahun 2021-2026 sangat ditentukan oleh program-program yang akan dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah, baik program yang langsung berpengaruh terhadap pencapaian indikator kinerja maupun program yang secara tidak langsung berpengaruh. Program-program tersebut terdiri atas berbagai kegiatan dan sub kegiatan turunan yang lazimnya merupakan tahapan terselesaikannya program. Secara rinci program-program pembangunan Kabupaten Malinau sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malinau periode tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 2.3. dibawah ini :

Tabel 2.3
Program-Program Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran Impact/ Outcomes)
MISI 1: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL	
Tujuan 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing Tinggi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Fasilitas Kesehatan Dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alkes Dan Ketersediaan Obat Essensial Yang Sesuai Standar
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
	Cakupan Faskes Yg Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Ketersediaan Sdmk Sesuai Standar Di Faskes
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Kecamatan Dengan Pemberian Izin Operasi, Pembinaan Dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Kecamatan Dengan Kegiatan Advokasi, Kemitraan, Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Serta Pelaksanaan UKBM
Sasaran 2. Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Angka)
Program Pengelolaan Pendidikan	Angka partisipasi Sekolah
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditempatkan sesuai analisis kebutuhan per wilayah
Sasaran 3. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)
Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
Program standarisasi perlindungan konsumen	



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran Impact/ Outcomes)
Tujuan 2. Menciptakan Suasana Kondusif Yang Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Ketahanan Nasional
Sasaran 1. Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenang Dan Harmonis Serta Bebas Bencana	Angka Kriminalitas
Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan pelanggaran trantibum yang ditindaklanjuti
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
	Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
	Proporsi Orang Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
	Proporsi Orang Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
	Indeks Resiko Bencana
	Persentase Pelayanan Dalam Rangka Pencegahan, Mitigasi Dan Penyelamatan Serta Evakuasi Korban Bencana
	Persentase Penanganan Bencana
	Persentase Kecamatan yang mendapat pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran
Sasaran 2. Meningkatnya Kesenjangan Gender	Indeks Pembangunan Gender
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pengarusutamaan Gender
Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perlindungan Perempuan
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Sistem Data Gender Dan Anak



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran Impact/ Outcomes)
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Pemenuhan Hak Anak
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Perlindungan Khusus Anak
Sasaran 3. Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter Dan Budaya Masyarakat	1. Indeks Kerukunan Beragama (Poin)
	2. Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemahaman Karakter Kebangsaan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik Untuk Parpol Yang Ada Di Kabupaten Malinau
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kualitas Keadaan Aman, Nyaman Dan Damai Di Lingkungan Masyarakat
MISI 2: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERBASIS PADA POTENSI DAERAH, KARAKTERISTIK DAN KEARIFAN LOKAL	
Tujuan 1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Dan Karakteristik Daerah	1. Pertumbuhan PDRB (%)
	2. Indeks Gini (Poin)
	3. Angka Kemiskinan
	4. Laju Inflasi
Sasaran 1. Meningkatnya Produktifitas Sektor Sektor Ekonomi Primer Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Lokal	1. Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB (%)
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran Impact/ Outcomes)
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Perizinan Usaha Pertanian
Program Penyuluh Lapangan	Persentase Penyuluh Lapangan
Sasaran 2. Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah	1. Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB (%)
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha sektor industri
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Prosentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Peningkatan jumlah Sarana Distribusi Perdagangan
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Prosentase peningkatan jumlah konsumen yang dilindungi
	2. Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%)
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata
Sasaran 3. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil Dan Mikro Yang Berkualitas	1. Persentase Koperasi Berkualitas
	2. Pesentase Peningkatan Usaha Mikro Dan Kecil (%)
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Peningkatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Kualitas Kesejahteraan Sosial
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Presentase Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan
Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian	Prosentase peningkatan jumlah Diklat Koperasi yang diadakan
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Prosentase UMKM yang Diberdayakan
Sasaran 4. Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
Program Pengelolaan Sumber Daya	Persentase Infrastruktur



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran Impact/ Outcomes)
Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Pendukung Kemandirian Pangan Dalam Kondisi Baik
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Persyaratan Mutu Dan Keamanan Pangan
Sasaran 3. Meningkatnya Profesionalitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pelatihan Dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar Dan Ditempatkan
Program Hubungan Industrial	Peresentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, Lks Bipartit, Strukur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta Bpjs Ketenagakerjaan)
Sasaran 4. Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah (Rp Milyar)
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Peminat Investasi
Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Atas Pelayanan Perizinan
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA Dan PMDN
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Informasi Yang Tersampaikan Kepada Masyarakat
MISI 3: MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN	
Tujuan 1. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Dan Pelayanan Dasar	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Ikli)(Poin)
Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur yang	1. Pesentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran Impact/ Outcomes)
Berwawasan Lingkungan	
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (%)
	2. Persentase Pemukiman Yang Layak (%)
Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Di Tangani
	3. Rasio Rumah Layak Huni (Rasio)
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Atau Warga Korban Bencana Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni
	4. Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi (%)
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang beroperasi
Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase sarana dan prasarana pengelolaan pelayaran
	5. Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak
	6. Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi (%)
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di Ws Kewenangan Kab/Kota
Sasaran 3. Meningkatnya layanan Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisoliran Daerah	Persentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Penyebaran Informasi Publik
Program Aplikasi Informatika	Persentase Penggunaan Aplikasi Informatika
Tujuan 4. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Iklh)



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran Impact/ Outcomes)
Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Lahan, Air Dan Udara	1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0 – 100)
	2. Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0 – 100)
	3. Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0 – 100)
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik
MISI 4: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN	
Tujuan 1: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik (Good Governance)	1. Indeks RB
Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	1. Nilai SAKIP
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rata-rata Capaian Program Pembangunan Daerah
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perangkat Daerah
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian yang diimplementasikan dalam Perencanaan Pembangunan
	2. Nilai LPPD
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan Terhadap Objek Pemeriksaan
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Unit Kerja Yang Mendapat Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran Impact/ Outcomes)
Sasaran 2. Terselenggaranya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari KKN	1. Opini BPK
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah
Sasaran 3. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pelaksanaan Pemungutan Pbb P2 Dan Bphtb
Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Pendampingan Yang Diilaksanakan
Sasaran 5. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri
Program Penataan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa Yang Melakukan Kerjasama Antara Desa
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa Yang Baik

Sedangkan keterkaitan program-program pembangunan Kabupaten Malinau dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2021 – 2026 diilustrasikan pada gambar 2.1 sebagai berikut :



Gambar 2.3
Keterkaitan Program-Program Pembangunan Kabupaten Malinau Dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026

Dalam rangka lebih memfokuskan program-program pembangunan, dilakukan melalui pendekatan program inovasi daerah. Hal ini dimaksudkan agar visi “***Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai Dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional***” dapat direalisasikan sesuai harapan masyarakat Malinau. Program-program inovasi daerah tersebut terdiri atas 5 (lima) program, yaitu:

1. Program Desa Sarjana;
2. Program Milenial Mandiri;
3. Program Rasda Plus;
4. Program RT-Bersih;
5. Program Wajib Belajar Malinau Maju

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	72,16
2	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,97
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran perkapita	Ribu Rupiah	10.450,00
4	Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Teneteram dan Harmonis Serta Bebas Bencana	Angka Kriminalitas	Persen	0,45%
		Indeks Resiko Bencana	Poin	124,4
5	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Poin	85,36
6	Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter dan Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama	Poin	81,7
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	80,5
7	Meningkatnya Produktifitas Sektor-Sektor Ekonomi Primer Berorientasi Pada Potensidan Karakteristik Lokal	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB	Persen	4,92%
8	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata yang Berorientasi Pada Potensi dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Industri, Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB	Persen	2,80%
		Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	1,85%
9	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil dan Mikro Yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas	Persen	74%
		Persentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil	Persen	76,60%
10	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Poin	76,52



11	Menurunnya Angka Penggangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,09
12	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah	Rp Milyar	92.000.000.000
13	Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Pesentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	54,80%
		Pesentase Pemukiman Yang Layak	Persen	80%
		Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	1:1,068
		Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi	Persn	75%
		Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	Persen	77%
		Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi (%)	Persen	32,46%
14	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisoliran Daerah	Persentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi (%)	Persen	98,17%
15	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air Dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0 – 100)	Nilai	100
		Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0 – 100)	Nilai	53,85
		Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0 – 100)	Nilai	91,47
16	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	Nilai	69,15
		Nilai LPPD	Nilai	2.960
17	Terselenggaranya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari KKN	Opini BPK		WTP
18	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	Persen	6%
19	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Nilai	88



20	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri (%)	Persen	17,74%
----	--	--	--------	--------

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka usia harapan hidup (Tahun)	72,16
2	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,97
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran perkapita (Ribu Rupiah)	10.450,00



4	Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenteram dan Harmonis Serta Bebas Bencana	Angka Kriminalitas (%)	0,45%
		Indeks Resiko Bencana (Poin)	124,4
5	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	85,36
6	Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter dan Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama (Poin)	81,7
		Indeks Pembangunan Kebudayaan/ Masyarakat (Poin)	80,5
7	Meningkatnya produktifitas sektor-sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB (%)	4,92%
8	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB (%)	2,80%
		Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%)	1,85%
9	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil dan Mikro Yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas (%)	74%
		Persentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil (%)	76,60%
10	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Poin)	76,52
11	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,09
12	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah (Rp Milyar)	92.000.000.000
13	Meningkatnya Kualitas Dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)	54,80%
		Persentase Pemukiman Yang Layak (%)	80%
		Rasio Rumah Layak Huni (Rasio)	1:1,068
		Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi (%)	75%
		Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	77%
		Persentase Irigasi Kabupaten Yang	32,46%



		Berfungsi (%)	
14	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisoliran Daerah	Persentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi (%)	98,17%
15	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0 – 100)	100
		Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0 – 100)	53,85
		Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0 – 100)	91,47
16	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	69,15
		Nilai LPPD	2.960
17	Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN	Opini BPK	WTP
18	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	6%
19	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	88
20	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri (%)	17,74%

PROGRAM

ANGGARAN

1 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	74.510.932.403
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	84.354.621.463
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	2.412.322.350
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp	250.401.000



	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	93.404.000
	Program Pengendalian Penduduk	Rp	12.000.000
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Rp	687.000.000
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	550.300.000
2	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Yang Merata		
	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	160.895.743969
	Program Pengembangan Kurikulum	Rp	2.091.867.300
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	6.346.290.483
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat		
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	862.464.000
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	73.543.000
4	Terciptanya Kehidupan yang Aman Dan Minim Risiko Bencana		
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	3.848.461.324
	Program Penanggulangan Bencana	Rp	2.654.692.796
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	480.168.300
5	Meningkatnya Kesenjangan Gender		
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	100.000.000
	Program Perlindungan Perempuan	Rp	1.547.364.700
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	200.000.000
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp	150.000.000



6 Mantapnya Kehidupan Beragama Dan Keberagaman Budaya

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	28.935.000.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp	760.000.000
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp	609.983.000
Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	494.198.700
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp	249.997.500
Program Pembinaan Sejarah	Rp	150.779.100
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp	2.798.470.250

7 Meningkatnya Perekonomian Sektor Pertanian Dan Perikanan

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	27.412.081.240
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	8.148.365.514
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	499.970.400
Program Penyuluh Pertanian	Rp	1.107.791.400
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	349.998.850
Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp	99.874.000
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	525.000.000
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	2.155.066.950
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp.	582.401.835
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	124.928.500

8 Meningkatnya Pertumbuhan Kontribusi



Perdagangan Dan Perindustrian		
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp	862.464.000
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp	2.637.179.850
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	1.914,029.250
9 Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Sektor Pariwisata		
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	7.638.206.700
Program Pemasaran Pariwisata	Rp	1.687.532.850
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rp	337.470.625
10 Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi		
Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Rp	194.005.250
Program pengembangan iklim penanaman modal	Rp	500.788.000
11 Terkendalinya Laju Inflasi		
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp	63.626.869.978
12 Menurunnya pengangguran		
Program penempatan tenaga kerja	Rp	925.000.000
Program perencanaan tenaga kerja	Rp	244.612.500
Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Rp	7.565.033.115
13 Meningkatnya Kualitas Dan Akses Infrastruktur Wilayah Yang Berkelanjutan		
Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	364.912.424.000
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Rp	40.786.952.841
Program Pengelolaan Pelayaran	Rp	9.302.884.000
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	9.302.610.000
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rp	83.022.769.030
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	2.147.987.600



	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	120.078.895.000
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	3.943.355.000
	Program Pengembangan Perumahan	Rp	350.000.000
	Program Kawasan Permukiman	Rp	3.371.777.000
14	Meningkatnya Jangkauan Layanan Teknologi Informasi		
	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Rp	281.440.000
	Program pengelolaan aplikasi informatika	Rp	7.347.357.170
15	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air Dan Udara		
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	23.684.789.622
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp	112.776.650
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp	9.095.518.398
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	2.465.318.400
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	308.243.000
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	99.916.200
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	2.455.310.050
	Program pengelolaan persampahan	Rp	9.335.350.900
	Program Pengendalian Lahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	532.725.750
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Local Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Rp	1.541.788.800
16	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja		
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	6.128.612.500
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	1.491.131.000



	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	574.880.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	777.368.734
17	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih Dari KKN		
	Program Prumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	1.377.995.000
17	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	5.445.795.500
18	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa		
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	3.714.011.970
19	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		
	Program Pendaftaran Penduduk	Rp	705.156.700
	Program Pencatatan Sipil	Rp	99.994.250
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	1.702.213.550
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp	48.452.150
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	420.513.200
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	74.382.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana rencana tingkat capaian yang semakin membaik. Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja serta hasil evaluasi Tim SAKIP Pemerintah Kabupaten Malinau.

Pemerintah Kabupaten Malinau pada tahun 2024 dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sasaran yang telah ditetapkan secara umum semuanya telah dapat dicapai dengan baik.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka usia harapan hidup (Tahun)	72,16	73,27	101,53%
2	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,97	9,63	96,58%
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran perkapita (Ribu Rupiah)	10.450,00	11,190,00	107,08%
4	Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Teneteram dan Harmonis Serta Bebas Bencana	Angka Kriminalitas (%)	0,45%	0.09%	0,20%
		Indeks Resiko Bencana (Poin)	124,4	126,17	101,42%
5	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	85,36	82,86	97,07%
6	Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter dan Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama (Poin)	81,7	80,18	98,13%
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)	80,5	55,4	67,81
7	Meningkatnya produktifitas sektor-sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB (%)	4,92%	9,26	188%
8	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri,	Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap	2,80%	2,31%	82,5%



	Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah	PDRB (%)			
		Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%)	1,85%	1,85%	100%
9	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil dan Mikro Yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas (%)	74%	6,62%	9,2%
		Persentase Peningkatan Usaha Mikro Dan Kecil (%)	76,60%	10,94%	14,28%
10	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Poin)	76,52	74,67	97,93%
11	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,09%	3,10%	124,20%
12	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah (Rp Milyar)	92.000.000.000	2.262.423.698.665	2.459%
13	Meningkatnya Kualitas Dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)	54,80%	30,46%	55,58%
		Persentase Pemukiman Yang Layak (%)	80%	82,07%	102,58%
		Rasio Rumah Layak Huni (Rasio)	1:1,068	1:405,1	37,96%
		Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi (%)	75%	75,22%	100%
		Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	77%	76,83%	99,77%
		Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi (%)	32,46%	75,06%	231%
14	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisoliran Daerah	Persentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi (%)	98,17%	100%	101,86%
15	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air Dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0 – 100)	100	100	100%
		Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0 – 100)	53,85	51,08	94,86%

		Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0 – 100)	91,47	94,38	103,18%
16	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	69,15	70,12	101,40%
		Nilai LPPD	2.960	3,012	101,76
17	Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN	Opini BPK	WTP	WTP	100%
18	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	6%	4,28%	71,33%
19	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	88	82,30	93,52%
20	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri (%)	17,74%	6,76%	38,10%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malinau.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Malinau didukung oleh perangkat daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau.

Perolehan capaian 32 indikator sasaran terhadap 20 sasaran selama tahun 2024 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian rendah. Berikut ini pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta analisis capaiannya.

Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul

Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing Tinggi

1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Pengukuran sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja sasaran angka usia harapan hidup, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pembangunan di bidang kesehatan terus dilaksanakan di Kabupaten Malinau dalam rangka mewujudkan misi pertama yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Indikator kinerja angka usia harapan hidup dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 % $6=5/4*100$
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	99,25%	72,16	73,27	101,53%

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan indikator sasaran angka usia harapan hidup dengan target RPJMD pada tahun 2024 adalah 72,16 tahun, Realisasi 73,27 tahun, sehingga capaian kinerja untuk tahun 2024 adalah 101,53%. Dari table diatas dapat diketahui adanya peningkatan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 2,28% terhadap tahun 2023.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu				Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 vs Tahun			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	73,27	71,45	71,49	71,50	71,51	97,51 %	97,57 %	97,58 %	97,59 %

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 adalah perbandingan realisasi angka harapan hidup tahun 2024 sebesar 73,27 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 71,45 atau realisasi capaian kinerja 97,51%, realisasi tahun 2021 sebesar 71,49 atau realisasi capaian kinerja 97,57%, realisasi tahun 2022 sebesar 71,50 atau realisasi capaian kinerja 97,58% dan realisasi tahun 2023 sebesar 71,51 atau realisasi capaian kinerja 97,59% maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 2,54% terhadap capaian tahun 2020, kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 2,48% terhadap capaian tahun 2021, kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 2,47% terhadap capaian tahun 2022 dan kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 2,46% terhadap capaian tahun 2023

Dalam upaya menilai efektivitas pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja hingga tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan. Berikut disajikan tabel yang membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024
Dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	73,27	72,38	101,2%

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi angka harapan hidup tahun 2024 sebesar 73,27 Tahun dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 72,38 Tahun, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 sebesar 101,2% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Angka Usia Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kesehatan masyarakat. Angka Usia Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata usia yang dapat dicapai oleh seseorang pada suatu populasi tertentu. Indikator ini dihitung berdasarkan faktor-faktor seperti tingkat kematian dan kelahiran

Harapan Usia Hidup merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. Angka Usia Harapan Hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya di suatu negara.

Salah satu yang menjadi penyebab angka harapan hidup yang rendah, salah satunya adalah infrastruktur dan layanan medis yang terbatas serta rendahnya jumlah tenaga medis yang memadai. Kabupaten Malinau memiliki fasilitas kesehatan cukup memadai yaitu 1 (satu), 2 (dua) RS Pratama, 17 Puskesmas dan 82 Puskesmas Pembantu yang tersebar di 15 Kecamatan. Berdasarkan data dari Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan PPKB Kab. Malinau, bahwa terdapat 390 orang tenaga PNS, 361 P3K, 259 Tenaga Kontrak Kesehatan, dan 58 orang tenaga Nusantara Sehat. Permasalahan yang

dihadapi adalah masih terdapat fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan dan sangat terpencil yang belum memiliki tenaga dokter.

Berdasarkan data BPS, hasil evaluasi Capaian Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Malinau pada Tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Malinau telah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sudah baik akan tetapi harus tetap dilaksanakan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas kesehatan baik di tingkat Desa melalui Puskesmas Pembantu, peningkatan kualitas kesehatan di tingkat Kecamatan melalui Puskesmas dan peningkatan kualitas kesehatan di Tingkat Kabupaten melalui Rumah Sakit.

Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah:

- Peningkatan sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Malinau untuk mencapai standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI.
- Pengadaan tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan dan sangat terpencil.
- Peningkatan layanan kesehatan dengan memperbaiki manajemen program kesehatan.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran dengan rumus :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja angka usia harapan hidup sebesar Rp.93.416.420.809, dari jumlah target anggaran semua program yang disediakan sebesar Rp 125.315.595.817 atau capaian realisasi keuangan sebesar 74,54%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria kriteria Kurang Efektif.

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja angka usia harapan hidup sebesar Rp.93.416.420.809, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp.220.973.438.840 atau capaian realisasi

keuangan sebesar 42,27%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria Sangat Efisien.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.4
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup)	99,25%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 74.510.932.403	Rp. 74.510.932.403	100%
			Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rp. 84.354.621.463	Rp84.354.621.463	100%
			Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rp. 2.137.288.550	Rp.84.354.621.463	100%

			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 250.401.000	Rp. 250.401.000	100%
			Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Rp. 553.641.000	Rp. 553.641.000	100%
			Pengendalian Penduduk	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000	100%
			Pembinaan keluarga berencana (KB)	Rp. 687.000.000	Rp. 687.000.000	100%
			Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 550.300.000	Rp. 550.300.000	100%

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

Dari tabel 3.2.4 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program-program. Hasil capaian kinerja dan realisasi capain keuangan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa program-program yang mendukung indikator kinerja angka usia harapan hidup adalah program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang didukung dengan sub kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), program Pengendalian Penduduk, program Pembinaan keluarga berencana (KB) yang didukung oleh sub kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) dan dan program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) yang didukung oleh sub kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).

2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat

Pengukuran sasaran meningkatnya kesempatan pendidikan masyarakat dengan indikator kinerja sasaran angka rata-rata lama sekolah, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pembangunan di bidang pendidikan terus dilaksanakan di Kabupaten Malinau dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan mendukung Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa. Angka Rata-Rata Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Tabel. 3.3
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 %
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	97,51%	9,97	9,63	96,58%

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2024

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Malinau Yang ditargetkan dalam RPJMD tahun 2024 adalah 9,97 dengan realisasi untuk tahun 2024 adalah 9,63 sehingga capaian kinerja untuk rata-rata lama sekolah Kabupaten Malinau tahun 2023 adalah 96,58%.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi capaian serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3.1

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu				Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 vs Tahun			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Angka	9,63	9,39	9,40	9,41	9,43	97,50 %	97,61 %	97,71 %	97,92 %

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2020, 2021, 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi angka rata-rata lama sekolah tahun 2024 sebesar 9,63 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 9,39 tahun atau realisasi capaian kinerja 97,50%, realisasi tahun 2021 sebesar 9,40 atau realisasi capaian 97,61% realisasi tahun 2022 sebesar 9,41 atau realisasi capaian 97,71% dan realisasi tahun 2023 sebesar 9,43 atau realisasi capaian 97,92%. Dengan demikian maka, hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 0,24% terhadap capaian tahun 2020, kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 0,23% terhadap capaian tahun 2021, kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 0,22 terhadap capaian kinerja tahun 2022 dan kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 0,2 terhadap capaian kinerja tahun 2024.

Dalam upaya menilai efektivitas pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja hingga tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan. Berikut disajikan tabel yang membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Angka	9,63	10,57	91,10%

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi rata-rata lama sekolah tahun 2024 sebesar 9,63 tahun dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 10,57 tahun, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai pada tahun 2024 pencapaiannya kinerja dengan indikator kinerja angka rata-lama sekolah sebesar 91,10% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Rata-rata Lama Sekolah adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya Pendidikan formal yang dicapai oleh Masyarakat suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang Pendidikan yang dijalani. Angka rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator Tingkat Pendidikan disuatu daerah. Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (human capital) yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Berdasarkan data yang disampaikan oleh dinas Pendidikan Kabupaten Malinau bahwa angka rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seperti yang disajikan dalam tabel 3.3.1 diatas yakni tabel perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2020 realisasi sebesar 9,39, tahun 2021 realisasi sebesar 9,40, tahun 2022 realisasi sebesar 9,41, tahun 2023 realisasi sebesar 9,43 dan di tahun 2024 realisasi capaian sebesar 9,63. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya tren positif setiap tahunnya yaitu mengalami peningkatan secara konsisten. Namun Capaian tersebut masih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Capaian

yang masih rendah dikarenakan beberapa faktor diantaranya yaitu faktor sosial, ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan.

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemaparan alternative solusi yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Untuk meningkatkan Angka Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Malinau, Pemerintah telah mengupayakan kualitas dan akses pelayanan Pendidikan dengan beberapa program salah satunya bahkan menjadi program prioritas Bupati yaitu Wajib Belajar Malinau Maju 16 Tahun, program tersebut diimplementasikan melalui kegiatan bantuan perlengkapan peserta didik untuk semua jenjang sekolah mulai dari PAUD, SD dan SMP bahkan jenjang SMA yang merupakan tanggung jawab provinsi juga ikut mendapatkan bantuan perlengkapan siswa, hal ini menandakan pemerintah serius dalam meningkatkan kualitas Pendidikan di Kabupaten Malinau. Selain itu juga pemerintah melalui dinas pendidikan melakukan pembangunan sarana dan prasarana sekolah, memberikan bantuan operasional sekolah, melakukan penambahan tenaga pendidik melalui perekrutan tenaga pendidik P3K dan Non ASN, serta melakukan berbagai kegiatan sosialisai dan pelatihan untuk tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik sehingga proses pembelajaran mendapatkan hasil yang maksimal dan berkualitas.

Faktor penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Komitmen pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam penyediaan anggaran untuk bidang Pendidikan, baik dalam peningkatan fasilitas Pendidikan berupa Pembangunan sarana dan prasarana sekolah maupun dalam peningkatan layanan pendidikan.
- 2) Pendidikan merupakan salah satu Program prioritas Bupati, sehingga menjadi prioritas pemerintah;
- 3) Dukungan dan kerjasama yang baik antara lintas program dan lintas sektor;
- 4) Dukungan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam penempatan tenaga pendidik di daerah terpencil atau perbatasan.

Selain faktor keberhasilan, ada beberapa faktor yang bisa menjadi penghambat, penyebab kegagalan atau penurunan kinerja adalah sebagai berikut :



- 1) Kurangnya kesadaran pendidikan pada sebagian masyarakat umur 25 tahun keatas, khususnya sebagian masyarakat perbatasan Kabupaten Malinau, karena masyarakat perbatasan merasa timbal balik yang diperoleh masih kurang ketika mereka sudah mendapatkan Pendidikan.
- 2) Kondisi geografis di Kabupaten Malinau terutama di daerah perbatasan dan sangat terpencil yang belum terlayani dengan maksimal, khususnya sekolah-sekolah dasar yang berada pada desa-desa terpencil yang sulit di jangkau.
- 3) Akses internet yang kurang memadai di daerah-daerah terpencil, sehingga informasi maupun revensi pembelajaran sangat sulit didapat.
- 4) Belum semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai, sehingga mempengaruhi proses belajar mengajar.
- 5) Sistem pelaporan pada Aplikasi Dapodik sekolah belum maksimal.

Alternative solusi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau atas kegagalan/penurunan kinerja sebagai berikut :

- 1) Melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada Masyarakat tentang pentingnya Pendidikan.
- 2) Memaksimalkan layanan pada sekolah-sekolah dasar khususnya yang berada pada daerah-daerah terpencil, dengan cara memprioritaskan kegiatan-kegiatan untuk di sekolah-sekolah Dasar pada daerah terpencil.
- 3) Melakukan pengadaan sarana dan prasarana dengan memprioritaskan bagi sekolah-sekolah daerah terpencil.
- 4) Mendirikan Lembaga-lembaga PKBM baru, untuk mengakomodir masyarakat yang bukan usia sekolah untuk bersekolah pada Lembaga PKBM
- 5) Membuat kegiatan Rapatkoordinasi (Rakor) untuk operator Dapodik sekolah setiap akhir semester pada tahun Pelajaran.



Penyerahan perlengkapan belajar siswa PAUD, SD dan SMP

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas juga menggambarkan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja angka rata-rata lama sekolah sebesar Rp 114.028.306.304 dari jumlah terget anggaran semua program yang disediakan sebesar Rp160.895.743.969 atau capaian realisasi keuangan sebesar 70,87%, Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria efektif.

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan

antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja angka rata-rata lama sekolah sebesar Rp. 114.028.306.304, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp160.895.743.969 atau capaian realisasi keuangan sebesar 70,87%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria Sangat Efisien.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang dirancang harus mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan program adalah melalui realisasi keuangan. Realisasi keuangan yang optimal seharusnya berbanding lurus dengan pencapaian kinerja yang baik. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja, dan realisasi keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.4
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	97,51%	Program pengelolaan pendidikan	Rp. 160.895.743.969	Rp. 160.895.743.969	70,87 %

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2024

Dari tabel 3.3.4 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program-program. Program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah program pengelolaan pendidikan.

3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Pengukuran sasaran meningkatnya daya beli masyarakat dengan indikator kinerja sasaran pengeluaran perkapita, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran yaitu pengeluaran perkapita dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.4
Evaluasi Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 %
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	103,96%	10.450.00	11.190.00	107,8%

Sumber : Bappeda dan Litbang Tahun 2024

Pada Tabel 3.4 diatas dapat dilihat perbandingan pengeluaran perkapita dengan target yang telah ditetapkan pada RPJMD 2016-2025 di tahun 2024 adalah 10.450,00 dan realisasi untuk tahun 2024 adalah 11.190,00 sehingga capaian kinerja untuk pengeluaran perkapitatahun 2024 adalah 107,8%.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021,2022 dan 2023 dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu				Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 vs Tahun			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	11.190.00	9.611,00	9.928,00	10.304,00	10.708,00	85,88 %	88,72 %	92,08 %	95,67 %

Sumber : Bappeda dan Litbang Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2020, 2021, 2022 dan 2024 adalah Perbandingan Realisasi pengeluaran perkapita tahun 2024 sebesar 11.190,00 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 9.611,00 atau realisasi capaian kinerja 85,88%, realisasi tahun 2021 sebesar 9.928,00 atau realisasi capaian kinerja 88,72%, realisasi tahun 2022 sebesar 10.304,00 atau realisasi capaian kinerja 92,08% dan realisasi tahun 2023 sebesar 10.708,00 atau realisasi capaian kinerja 95,67%.

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	11.190.00	10.750,00	104,09%

Sumber : Bappeda dan Litbang Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan pengeluaran perkapitatahun 2024 sebesar 11.190,00 Ribu Rupiah dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 10.750,00 Ribu Rupiah, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2024 pencapaiannya sebesar 104,09% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2024 ada peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Malinau sebesar 404 ribu rupiah atau 3,92 %. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi inflasi seperti operasi pasar murah, bantuan modal UMKM serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) cukup memberi dampak yang positif terhadap daya beli masyarakat.



Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengaktifkan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun oleh Pemda, seperti mengadakan kegiatan festival budaya dari 11 lembaga adat dan beberapa paguyuban, di laksanakannya pesta budaya Kabupaten Malinau melalui IRAU ke-X yang dilaksanakan selama 20 hari dimana dalam kegiatan ini semua organisasi masyarakat, UMKM, Pihak swasta maupun perangkat daerah terlibat demikian juga pelaksanaan turnamen-turnamen olahraga. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut UMKM dipersilahkan untuk memasarkan produk-produk baik kerajinan tangan maupun makanan dan minuman jadi disetiap even festival budaya atau turnamen olahraga yang turut mendorong perputaran ekonomi dan merupakan alternatif untuk menaikkan pendapatan masyarakat yang masih rendah dan bermuara pada peningkatan daya beli.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas dan kelompok pengeluaran (rupiah) 2024 paling besar disumbang dari belanja makanan dan minuman jadi sebesar Rp. 162.829 per bulan.

Sasaran ke-3 pada misi pertama RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025 adalah Meningkatkan Daya Beli Masyarakat dengan indikator Tujuan adalah Pengeluaran Perkapita. Pengeluaran Perkapita adalah salah satu unsur pembentuk indikator Tujuan ke-1 RPJMD 2021-2025 yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga sangat penting menjadikan Pengeluaran Perkapita menjadi IKU daerah dalam rangka mewujudkan IPM Kabupaten Malinau yang semakin baik.

Pengeluaran Perkapita digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan setiap golongan ekonomi rumah tangga. Indikator ini dapat digunakan untuk melihat secara umum apakah rumah tangga dengan golongan termiskin memiliki pengeluaran perkapita jauh dibawah rumah tangga terkaya. Pengeluaran Perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.

Rumus perhitungan pengeluaran perkapita :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Data	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)	$Y_t = \frac{Y_t}{PPP}$	BPS, Bappeda dan Litbang	Bappeda dan Litbang

Faktor keberhasilan pencapaian kinerja IKU tersebut adalah Pengeluaran konsumsi masyarakat meningkat ditahun 2024 baik primer, sekunder maupun tersier. Pengeluaran konsumsi masyarakat yang meningkat di tahun 2024 mengindikasikan meningkatnya pendapatan masyarakat Kabupaten Malinau yang berarti perekonomian semakin membaik dan peredaran uang semakin tinggi.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi penggunaan anggaran atas program Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting untuk mendukung indikator kinerja Pengeluaran perkapita sebesar Rp.400.000.000, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 379.535.899 atau capaian realisasi keuangan sebesar 94,88 %. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efektivitas dan Kriteria Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja untuk indikator kinerja Angka Usia harapan hidup termasuk dalam kriteria efektif. Kemudian realisasi penggunaan anggaran atas program Program Perekonomian dan Pembangunan untuk mendukung indikator kinerja Pengeluaran perkapita sebesar Rp.31.640.548.000, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp28.189.521.558 atau capaian realisasi keuangan sebesar 89,09%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efektivitas dan Kriteria Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja untuk indikator kinerja Angka Usia harapan hidup termasuk dalam kriteria Cukup Efektif

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program,

kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)	103,96%	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Rp. 862.464.000	Rp. 862.464.000	100%
			Program perekonomian dan pembangunan	Rp. 73.543.000	Rp. 73.543.000	100%

Sumber : Bappeda dan Litbang Tahun 2024

Dari tabel 3.4.4 diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh dua program yaitu program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan capaian keuangan 100% dan program perekonomian dan pembangunan dengan capaian keuangan 100%.

Tujuan 2 : Menciptakan Suasana Kondusif Yang Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia

4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenteram dan Harmonis Serta Bebas Bencana

Pengukuran sasaran terciptanya kehidupan yang aman, tentram dan harmonis serta bebas bencana dengan indikator kinerja sasaran angka kriminalitas yang tertangani dan indeks resiko bencana, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran yaitu angka kriminalitas yang tertangani dan indeks resiko bencana dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.5
Evaluasi Pencapaian Sasaran 4
Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenteram dan Harmonis
Serta Bebas Bencana

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 %
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Angka Kriminalitas	Persen	187,27%	0,45%	0,09%	180%
Indeks Resiko Bencana	Poin	155,9%	124,4	126,17	101,42%

Sumber : Satpol PP dan BPBD Tahun 2024

Pada Tabel 3.4 diatas dapat dilihat perbandingan angka kriminalitas dengan target RPJMD 2021-2026 tahun 2024 adalah 0,45% dan realisasi untuk tahun 2024 adalah 0,09%, sehingga capaian kinerja untuk angka kriminalitas tahun 2023 adalah 180%. Untuk indikator kinerja Indeks Resiko Bencana dengan target RPJMD 2021-2026 adalah 124,4 dan realisasi untuk tahun 2024 adalah 126,17, sehingga capaian kinerja untuk Indeks Resiko Bencana tahun 2024 adalah 101,42%.

ANGKA KRIMINALITAS

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.5.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu				Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 vs Tahun			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Angka Kriminalitas	Persen	0,09	-	-	0,09	0,07	-	-	100%	128%

Sumber : Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2022 dan 2023 adalah perbandingan realisasi angka kriminalitas tahun

2024 sebesar 0,09 dengan realisasi tahun 2022 sebesar 0,09 atau realisasi capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi tahun 2023 sebesar 0,07 atau realisasi capaian kinerja tahun 2024 sebesar 128%. Dengan demikian maka, hasil perbandingan tersebut menunjukkan tidak ada kenaikan maupun penurunan tahun 2024 terhadap tahun 2022 dan adanya kenaikan realisasi capaian kinerja tahun 2024 sebesar 0,02% terhadap capaian tahun 2024.

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.5.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Angka Kriminalitas	Persen	0,09%	0,35%	174%

Sumber : Satpol PP Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah sebesar 0,09% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 0,35%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2024 pencapaian penurunan angka kriminalitas yang tertangani sebesar 174% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Angka kriminalitas adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 100.000 penduduk. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah Petugas pengamanan dalam hal ini Polres, TNI dan Satpol PP secara dini mengantisipasi terjadinya tindak Kriminal di setiap tempat, pihak keamanan

secara rutin melakukan Patroli, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelanggaran hukum.

Adapun alasan Satpol PP Memilih indikator kinerja utama angka kriminalitas yang tertangani adalah :

1. Sesuai dengan tujuan RPJMD yaitu Terciptanya Suasana Kondusif yang Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Sesuai dengan tugas dan fungsi satpol PP dan Pemadam Kebakaran yaitu Menegakkan Perda, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, mengupayakan terlaksananya kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian Kinerja adalah:

- a. Adanya visi dan misi yang jelas dalam mendukung terciptanya Masyarakat Malinau yang aman, nyaman dan damai
- b. Mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau ;
- c. Budaya kepedulian masyarakat terciptakan rasa aman, tentram dan damai di Kabupaten Malinau;
- d. Terjalinnnya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja OPD;
- e. Adanya upaya mengoptimalkan fungsi dan ketugasan anggota Satpol PP dan Damkar dalam Penegakan Perda dan Peraturan Bupati.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat pencapaian Kinerja adalah:

- a. Sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau belum optimal dalam mendukung aktifitas sebagai pelaksana penegak Peraturan Daerah, penanggulangan bencana kebakaran dan perlindungan masyarakat
- b. Partisipasi masyarakat dalam turut mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum optimal;
- c. Belum terpenuhinya standarisasi dan kompetensi SDM antara kebutuhan personil/pegawai dengan bidang serta volume tugas yang diemban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja angka kriminalitas sebesar Rp.2.897.774.646, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.3.092.695.324 atau capaian realisasi keuangan sebesar 93,69%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria Efektif

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan ataupun pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenteram Dan Harmonis Dan Serta Bebas Bencana	Angka Kriminalitas	180%	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 3.092.695.324	Rp. 2.897.774.646	93,69%

Sumber : Satpol PP Tahun 2024

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

INDEKS RESIKO BENCANA

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.5.4

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu				Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 vs Tahun			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Indeks Resiko Bencana	Poin	126,17	124,4	155,85	155,85	144,18	98,59 %	123,52 %	123,52 %	114,80 %

Sumber : BPBD Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 adalah perbandingan realisasi indeks resiko bencana tahun 2024 sebesar 126,17 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 124,4 atau realisasi capaian kinerja sebesar 98,59%, realisasi tahun 2021 dan 2022 sebesar 155,85 atau realisasi capaian kinerja sebesar 123,52% dan realisasi tahun 2023 sebesar 144,18 atau realisasi capaian kinerja sebesar 114,80%. Dengan demikian maka, hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan realisasi capaian kinerja tahun 2024 sebesar 1,42% terhadap capaian tahun 2020, ada penurunan realisasi capaian kinerja tahun 2024 sebesar -19,04 terhadap capaian tahun 2021 dan 2022 dan adanya penurunan realisasi capaian kinerja tahun 2024 sebesar -12,49 terhadap capaian tahun 2023.

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.5.5

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Indeks Resiko Bencana	Poin	126,17	124,4	101,42%

Sumber : BPBD Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi indeks resiko bencana tahun 2024 sebesar 126,17 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 124,4, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2024 pencapaiannya sebesar 101,42% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Permasalahan mendasar (isu strategis) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau adalah terdapatnya korban bencana alam dan sosial yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Adapun korban bencana bencana yang mendapatkan bantuan berupa terpenuhinya kebutuhan dasarnya sebanyak 84.173 orang dan target 200 orang.

Berdasarkan data tersebut prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di Kabupaten Malinau adalah sebesar 100%. Dimana jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran (sebanyak 84.173) dibagi populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat setelah tanggap darurat bencana.

Faktor pendukung capaian kinerja yaitu Komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau untuk melaksanakan pelayanan prima khususnya pada Bidang/Urusan Penanggulangan Bencana. Sebagai solusi perbaikan kinerja Triwulan/Tahun yang akan datang berupa Peningkatan Anggaran Kegiatan

b. Analisis atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja indeks resiko bencana sebesar Rp 14.028.384.144, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 16.731.470.902 atau capaian realisasi keuangan sebesar 83,84%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria Efektif.

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkankeluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tahun 2023 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja indeks resiko bencana sebesar Rp. 9.154.542.516, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 11.409.826.346 atau capaian realisasi keuangan sebesar 80,23%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria cukup Efisien.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan ataupun pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5.7
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenteram dan Harmonis Serta Bebas Bencana	Indeks Resiko Bencana	101,42%	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 16.731.470.902	Rp. 14.028.384.144	83,84%

Sumber : BPBD Tahun 2024

Dari tabel 3.5.7 diatas, tampak bahwa indikator kinerja untuk mendukung indikator kinerja indeks resiko bencana adalah program penanggulangan bencana.

5. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesenjangan Gender

Pengukuran sasaran meningkatnya kesetaraan gender dan indikator kinerja sasaran indeks pembangunan gender, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran yaitu indeks pembangunan gender dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.6
Evaluasi Pencapaian Sasaran 5
Meningkatnya Kesenjangan Gender

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 %
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
Indeks Pembangunan Gender	Poin	97,92%	85,36	82,86	97,07%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Tahun 2024

Tahun 2024 pencapaian sasaran meningkatnya kesetaraan gender dengan indikator indeks pembangunan gender yang ditarget dalam dokumen RPJMD 2021-2026 adalah 85,36 dan realisasi untuk tahun 2024 adalah 82,86 dengan capaian kinerja untuk indeks pembangunan gender tahun 2024 adalah 97,02%.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 202, 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.6.1

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu				Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 vs Tahun			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Indeks Pembangunan Gender	Poin	82,86	81,36	81,95	82,61	82,61	98,18 %	98,90 %	99,69 %	99,69 %

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 adalah perbandingan realisasi indeks pembangunan gender tahun 2024 sebesar 82,86 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 81,36 atau realisasi capaian kinerja sebesar 98,18%, realisasi tahun 2021 sebesar 81,95 atau realisasi capaian kinerja sebesar 98,90% dan realisasi tahun 2022 dan 2023 sebesar 82,61 atau realisasi capaian kinerja sebesar 99,69%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 1,84% terhadap capaian tahun 2020 dan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 1,11% terhadap capaian tahun 2021 dan adanya kenaikan ditahun 2024 sebesar 0,30% terhadap capaian 2022 dan 2023.

Dalam upaya menilai efektivitas pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja hingga tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan. Berikut disajikan tabel yang membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.6.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Indeks Pembangunan Gender	Poin	82,86	87,36	94,84%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja indeks pembangunan gender tahun 2024 sebesar 82,86 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 87,36, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2024 pencapaiannya sebesar 94,84% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia.

Rumusan

Penghitungan angka IPG dilakukan dengan menggunakan rasio antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki sebagai berikut:

$$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki - Laki}} \times 100\%$$

Angka ini menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki. Ketika angka indeks pembangunan gender makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata.

Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin.

Kegunaan

Untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia yang sudah memasukkan aspek gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

Keterangan Tambahan

Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

- (i) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life),
- (ii) Pengetahuan (knowledge), dan
- (iii) Standar hidup layak (decent standard of living)

Interpretasi

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.

Faktor penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Komitmen pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam penyediaan anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender
- 2) Mendukung implementasi PUG yang ditunjukkan dengan adanya Pokja (Kelompok Kerja), Focal Point, Gender Champion dan Fasilitator
- 3) Kebijakan dan program merupakan wujud komitmen yang ditunjukkan dengan adanya kebijakan operasional atau teknis.
- 4) Kerjasama dengan Kesehatan, Pendidikan, dan ketenagakerjaan yang sudah seharusnya dioptimalkan untuk mendukung IPM, IPG, dan IDG. Hal itu merupakan kerja lintas sektor dan lintas bidang.

Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan terkait gender. Salah satu alat ukur untuk mengetahui apakah

kebijakan yang telah dilakukan pemerintah terkait kesetaraan gender yaitu melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan salah satu indeks yang setiap tahun dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG diperoleh melalui perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki. IPG dapat menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Selain faktor keberhasilan, ada beberapa faktor yang bisa menjadi penghambat, penyebab kegagalan atau penurunan kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Komunikasi antar pelaksana kurang terjalin dengan baik sehingga menimbulkan beda persepsi terkait acuan pelaksanaan PUG yang digunakan.
- 2) Sumber daya manusia PUG di Kabupaten Malinau belum memadai. Terbatasnya sumber daya manusia PUG baik perencana yang memiliki kecakapan dalam melakukan analisis gender dalam PPRG menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan PUG. Begitupun jumlah SDM PUG yang ada tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Malinau dengan keseluruhan OPD yang perlu didampingi.
- 3) Kurangnya partisipasi aktif berbagai stakeholders dalam mengadakan kegiatan yang mendukung terwujudnya pembangunan responsif gender di Kabupaten Malinau
- 4) Sistem pencatatan dan pelaporan PUG belum maksimal.

Adapun hambatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut menyangkut minimnya SDM profesional dalam penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, belum optimalnya pemanfaatan Forum Gender yang ada serta masih kurangnya tenaga penyuluh di lapangan.

Solusi, Memaksimalkan penguatan pengarusutamaan Gender dan Anak dengan memanfaatkan Forum Gender yang telah terbentuk, peningkatan SDM dengan mengikuti pelatihan-pelatihan serta adanya penambahan Tenaga Penyuluh Lapangan



Alternative solusi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malinau atas kegagalan/penurunan kinerja sebagai berikut :

1. Tingkatkan Komitmen yang meningkat (regulasi):
 - a) Perda, Perbup/Perwal, Perdes
 - b) rumuskan dalam regulasi operasional;
 - c) lakukan RIA atas regulasi tersebut
2. Tingkatkan Kebijakan Strategi:
 - a) Megarusutamakan gender dalam Dokumen RPJP,RPJMD,RKPD, Renstra OPD,Renja, RKA, DPA, APDB;
 - b) Cek secara khusus implementasinya;
 - c) Monev
3. Tingkatkan Partisipasi Masyarakat:
 - a) Mengajak Dunia Usaha untuk bergabung menangani kesenjangan gender;
 - b) Libatkan PT dan LSM;
 - c) Libatkan secara langsung masyarakat
4. Meningkatkan kerjasama lintas sektor;
5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam program pendidikan;
6. Meningkatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
7. Peningkatan upaya promosi tentang kesetaraan gender;
8. Mengadakan evaluasi untuk pembangunan manusia (IPG)terhadap pencapaian laki-laki dan perempuan.

b. Analisis Atas Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya

pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja indeks pembangunan gender sebesar Rp100.000.000, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 100.000.000 atau capaian realisasi keuangan sebesar 100%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria **Efektif**

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkankeluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan ataupun pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender)	97,92%	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	100.000.000	100.000.000	100%
			Program peningkatan kualitas keluarga	200.000.000	200.000.000	100%

Dari tabel 3.6.4 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja didukung oleh program-program. Program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah Program Perlindungan perempuan.

6. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter dan Budaya Masyarakat

Pengukuran sasaran mantapnya kehidupan keagamaan serta karakter dan budaya masyarakat dan indikator kinerja sasaran indeks kerukunan beragama dan indeks pembangunan kebudayaan, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran yaitu indeks kerukunan beragama dan indeks pembangunan kebudayaan dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.7
Evaluasi Pencapaian Sasaran 6
Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter dan Budaya Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 %
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
Indeks Kerukunan Beragama	Poin	100,71%	81,7	80,18	98,13%
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	69,68 %	80,5	55,4	67,81

Sumber : Badan Kesbangpol dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024

Pada tahun 2024, Kabupaten Malinau untuk pertama kalinya melaksanakan survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) secara mandiri, pelaksanaan survei mandiri ini menjadi langkah strategis dalam memperoleh data yang lebih akurat dan kontekstual mengenai tingkat kerukunan umat beragama di Kabupaten Malinau. Dengan adanya hasil survei yang spesifik terhadap kondisi daerah, diharapkan kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dalam menjaga dan meningkatkan harmoni sosial di masyarakat.

Pada Tabel 3.7 diatas dapat dilihat perbandingan indeks kerukunan beragama dengan target RPJMD 2016-2022 tahun 2024 adalah 81,7 poin dan realisasi 80,18 poin sehingga capaian kinerja indeks kerukunan beragama tahun 2024 adalah 98,13%. Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malinau tahun 2024 diukur berdasarkan tiga indikator utama: toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Survei ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara acak yang dilakukan di 4 (empat) kecamatan. Hasil survei menunjukkan bahwa

Kabupaten Malinau memperoleh skor akhir 80,18 yang mencerminkan tingkat kerukunan umat beragama dalam kategori **baik**.

Untuk indikator kinerja Indeks pembangunan kebudayaan tidak disajikan dikarenakan indikator kinerja ini hanya dilaksanakan di tingkat provinsi.

INDEKS KERUKUNAN BERAGAMA

Kabupaten Malinau sebelumnya mengadopsi nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Kalimantan Utara sebagai tolok ukur dalam mengukur tingkat kerukunan di daerah, hal ini dilakukan karena nilai indeks provinsi dianggap selaras dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026. Namun, baru pada tahun 2024, Kabupaten Malinau mulai melaksanakan pengukuran IKUB secara mandiri. Dengan adanya pengukuran sendiri, hasil yang diperoleh lebih sesuai dengan kondisi nyata di daerah dan bisa digunakan untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat dalam menjaga dan meningkatkan kerukunan umat beragama di Malinau.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.7.1

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu				Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 vs Tahun			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Indeks Kerukunan Beragama	Poin	80,18	-	75,63	80,95	81,18	-	94,32 %	100%	101%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 adalah perbandingan realisasi indeks kerukunan beragama tahun 2024 sebesar 80,18 dengan realisasi tahun 2021 sebesar 75,63 atau realisasi capaian kinerja sebesar 94,32%, realisasi

tahun 2022 sebesar 80,95 atau realisasi capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi tahun 2023 sebesar 81,18 atau realisasi capaian kinerja sebesar 101%, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 6,01% terhadap capaian tahun 2021, adanya penurunan capaian kinerja tahun 2024 sebesar -0,95% terhadap capaian tahun 2022 dan juga adanya penurunan capaian kinerja tahun 2024 sebesar -1,23% terhadap capaian tahun 2023.

Penurunan Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) pada tahun 2024, baik di tingkat nasional maupun provinsi, dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Salah satu faktor yang signifikan adalah dampak tahun politik, di mana polarisasi di tengah masyarakat semakin meningkat akibat perbedaan preferensi politik. Selain faktor politik, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi yang dengan cepat menyebar di media sosial menciptakan ketidakpercayaan serta memperkeruh suasana sehingga berdampak negatif pada tingkat kerukunan Masyarakat. Namun di Kabupaten Malinau, kondisi tersebut masih dapat dikendalikan dengan baik. Tingkat kerukunan umat beragama tetap terjaga berkat peran aktif pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga komunikasi serta membangun kesadaran akan pentingnya toleransi. Upaya kolaboratif ini telah memungkinkan Kabupaten Malinau mempertahankan harmoni sosial meskipun menghadapi berbagai tantangan eksternal.

Dalam upaya menilai efektivitas pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja hingga tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan. Berikut disajikan tabel yang membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.7.2

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Indeks Kerukunan Beragama	Poin	80,18	83,30	96,25%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

Dari tabel 3.7.2 diatas Indeks Kerukunan Beragama pada tahun 2024 mencapai 80,18 poin, mendekati target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 83,30 poin. Dengan capaian sebesar 96,25% dari target akhir, kinerja indikator ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik, meskipun masih diperlukan upaya tambahan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan regional provinsi dan standar nasional dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Regional Provinsi	Standar Nasional	Capaian Kinerja (%)	
						Provinsi	Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8
Mantapnya kehidupan keagamaan serta karakter dan budaya masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama	poin	80,18	78,94	76,47	101,57 %	104,85 %

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan regional provinsi dan standar nasional, indeks kerukunan beragama Kabupaten Malinau sebesar 80,18 poin dengan realisasi regional provinsi 78 poin dan standar nasional 76,47 poin, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja Kabupaten Malinau tahun 2024 sebesar 101,57% terhadap regional provinsi dan capaian kinerja sebesar 104,85% terhadap standar nasional tahun 2024.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Kerukunan umat beragama merupakan pilar utama dalam membangun stabilitas sosial dan meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat. Kabupaten Malinau, sebagai daerah yang kaya akan keberagaman etnis, agama, dan budaya, menghadapi tantangan dalam menjaga keharmonisan sosial. Oleh karena itu, Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) menjadi alat penting untuk memantau dan mengevaluasi tingkat toleransi, kesetaraan, dan kerja sama di masyarakat.

Pada tahun 2024 dilakukan survey IKUB yang bertujuan untuk mengukur tingkat kerukunan umat beragama di Kabupaten Malinau, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kerukunan, menilai efektivitas program pemerintah dalam menjaga stabilitas kerukunan, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data untuk memperkuat hubungan antarumat beragama.

Berdasarkan hasil survei terhadap 406 responden, diperoleh skor Indeks KUB dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Skor Indeks KUB Kabupaten Malinau

Dimensi	Skor	kategori
Toleransi	79,65	Tinggi
Kesetaraan	81,97	Sangat tinggi
Kerja Sama	79,84	Tinggi

Berdasarkan tabel di atas, tingkat harmoni sosial diukur melalui tiga dimensi utama: Toleransi, Kesetaraan, dan Kerja Sama.

1. Toleransi (Skor: 79,65 - Tinggi)
 - a. Keberhasilan dalam aspek toleransi ditunjukkan dengan interaksi sosial yang baik antaragama, termasuk partisipasi dalam perayaan keagamaan dan penerimaan terhadap pembangunan rumah ibadah.
 - b. Meski berada dalam kategori tinggi, masih terdapat kelompok kecil masyarakat yang merasa keberatan terhadap perayaan keagamaan di lingkungan mereka.
2. Kesetaraan (Skor: 81,97 - Sangat Tinggi)

- a. Faktor utama keberhasilan dalam kesetaraan adalah penerapan hak yang sama dalam hukum, layanan publik, dan pekerjaan.
 - b. Adanya kebijakan yang menjamin kebebasan beribadah dan kesempatan yang setara dalam jabatan publik telah memperkuat nilai kesetaraan di masyarakat.
3. Kerja Sama (Skor: 78,94 - Tinggi)
- a. Gotong royong dan partisipasi dalam kegiatan sosial lintas agama menjadi pendorong utama kerja sama yang baik.
 - b. Namun, masih terdapat beberapa wilayah yang memerlukan peningkatan dalam keterlibatan masyarakat, terutama dalam kegiatan sosial dan ekonomi lintas agama.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa hubungan sosial dalam masyarakat berada pada tingkat yang baik, dengan tingkat kesetaraan yang paling menonjol dibandingkan dimensi lainnya. Hal ini sejalan dengan Indeks KUB Kabupaten Malinau yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel Perbandingan Indeks KUB Kabupaten Malinau

wilayah	Indeks KUB	Toleransi	Kesetaraan	Kerja Sama
Nasional	76,47	74,83	77,15	77,42
Kalimantan Utara	78,94	79,30	79,38	78,15
Kabupaten Malinau	80,18	79,65	81,97	78,94

Hasil ini menunjukkan bahwa Kabupaten Malinau memiliki tingkat kerukunan yang lebih baik dibandingkan nasional dan provinsi. Capaian ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga serta meningkatkan harmoni antarumat beragama. Berbagai langkah strategis telah diterapkan untuk memperkuat kerukunan, di antaranya:

1. Memperkuat Program Edukasi Lintas Agama

Melalui sosialisasi, masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya toleransi dan keberagaman. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai kebersamaan serta mencegah potensi konflik berbasis perbedaan agama.

2. Meningkatkan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

FKUB telah berperan aktif dalam memfasilitasi mediasi konflik dan dialog antarumat beragama. Dengan adanya forum ini, perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang konstruktif, sehingga mencegah ketegangan sosial.

3. Mendorong Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosial Lintas Agama

Berbagai program seperti gotong royong dan kegiatan sosial bersama telah berhasil meningkatkan kerja sama antarumat beragama. Interaksi langsung dalam kegiatan sosial ini memperkuat rasa kebersamaan dan memperkecil kesenjangan antar kelompok masyarakat.

Melalui langkah-langkah tersebut, Kabupaten Malinau terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan tingkat kerukunan masyarakatnya, menjadikannya sebagai contoh positif dalam harmoni sosial di tingkat nasional maupun provinsi.

b. Analisis Atas Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja indeks kerukunan beragama sebesar Rp. 299.742.000, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 300.000.000 atau capaian realisasi keuangan sebesar 99,91%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria **Sangat Efektif**.

Anggaran kegiatan survei Indeks Kerukunan Beragama dialokasikan langsung kepada pihak ketiga melalui mekanisme belanja jasa. Pendanaan ini digunakan untuk membiayai seluruh tahapan survei, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, hingga pelaporan hasil.

Dengan menggunakan pihak ketiga yang memiliki keahlian di bidang penelitian dan survei, diharapkan hasil yang diperoleh lebih objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme ini juga memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa melalui perantara, sehingga proses pelaksanaan survei lebih transparan dan akuntabel.

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja indeks kerukunan beragama sebesar Rp. 22.236.113.495, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp 26.543.714.216 atau capaian realisasi keuangan sebesar 83,77%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria Cukup Efisien.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat. Salah satu langkah utama adalah memberikan pelatihan dan pembekalan kepada enumerator agar memahami teknik wawancara, pengisian kuesioner, serta etika dalam mengumpulkan data. Selain itu, dilakukan sosialisasi mengenai konsep IKUB agar semua pihak memahami tujuan dan manfaat survei ini. Di samping itu, koordinasi dengan tokoh agama, masyarakat, serta pemerintah desa/RT dilakukan agar survei dapat berjalan lancar dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Terakhir, penekanan pada netralitas dan objektivitas dalam survei sangat penting agar data yang dikumpulkan benar-benar valid dan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan terkait kerukunan umat beragama di Malinau.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang dirancang harus mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan program adalah melalui realisasi keuangan. Realisasi keuangan yang optimal seharusnya berbanding lurus dengan pencapaian kinerja yang baik. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja, dan realisasi keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter Dan Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama	98,13%	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	300.000.000	299.742.000	99,91%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya bertujuan untuk memperkuat kehidupan keagamaan, membangun karakter masyarakat, serta melestarikan budaya lokal guna

menciptakan keharmonisan sosial dan ketahanan bangsa. Sasaran strategis dari program ini adalah meningkatnya kehidupan keagamaan serta karakter dan budaya masyarakat, yang diukur melalui Indeks Kerukunan Beragama. Pada tahun 2024 capaian kinerja mencapai 98,13%, menunjukkan bahwa kehidupan keagamaan di Kabupaten Malinau dalam kondisi yang harmonis dan kondusif.

Untuk mencapai sasaran tersebut, program ini mencakup berbagai kegiatan seperti fasilitasi dialog dan mediasi antarumat beragama yang melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Kegiatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman dan kerja sama lintas agama melalui pertemuan rutin serta mediasi dalam menyelesaikan potensi konflik. Selain itu, diselenggarakan berbagai acara keagamaan dan sosial, seperti peringatan hari besar keagamaan dan kegiatan bakti sosial lintas agama, guna mempererat hubungan antarumat beragama.

Realisasi keuangan program ini mencapai 99,91%, menandakan bahwa hampir seluruh anggaran yang dialokasikan telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan ketahanan sosial dan budaya masyarakat. Dokumentasi kegiatan yang dilampirkan, seperti pertemuan FKUB, dialog moderasi beragama dan budaya, dan kegiatan bakti sosial, menjadi bukti nyata bahwa program ini berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Malinau.

Dokumentasi Bersih-bersih rumah ibadah Gereja menjelang Natal



**Dokumentasi Kegiatan Dialog Moderasi Beragama dan Budaya
di SMA Negeri 1 Malinau dan SMK Negeri 2 Malinau**



INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

Untuk indikator kinerja indeks Pembangunan kebudayaan tidak dapat disajikan dikarenakan indikator ini hanya dilaksanakan di Tingkat provinsi maupun nasional.

**Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi
yang Berbasis Pada Potensi Daerah,
Karakteristik dan Kearifan Lokal**

**Tujuan 1: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Dan
Karakteristik Daerah**

**7. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produktivitas Sektor
Ekonomi Primer Berorientasi Pada Potensi dan Karakteristik Lokal**

Pengukuran sasaran meningkatnya produktivitas sektor-sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal dengan indikator kinerja sasaran kontribusi pertanian terhadap PDRB, dalam proses pengukuran

capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang rata-rata bermata pencaharian sebagai Petani di Kabupaten Malinau untuk mengukur tingkat pendapatan, kesejahteraan Petani serta memaksimalkan Produksi Pertanian dalam rangka mewujudkan misi kedua yaitu Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi dan Karakteristik Daerah, indikator kinerja Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.8
Evaluasi Pencapaian Sasaran 7
Meningkatnya produktifitas sektor ekonomi primer
berorientasi pada potensi dan karakteristik local

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 %
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB	Persen	175, 71%	4,92%	9,26	188%

Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2024

Pada Tabel 3.8 diatas dapat dilihat perbandingan kontribusi pertanian terhadap PDRB dengan target RPJMD 2016-2022 adalah 4,92% dan realisasi untuk tahun 2024 adalah 9,26% sehingga capaian kinerja untuk kontribusi pertanian terhadap PDRB tahun 2022 adalah 188%.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.8.1

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu				Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 vs Tahun			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB	Persen	9,26	-	-	8,59%	8,61%	-	-	92,76	92,98

Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2022, 2023 dan 2024 adalah perbandingan realisasi Kontribusi Pertanian Dalam Arti Luas (Kehutanan Pertanian dan Perikanan) Terhadap PDRB Tahun 2024 sebesar 9,26 dengan realisasi tahun 2022 sebesar 8,59 atau realisasi capaian kinerja 92,76%, realisasi tahun 2023 sebesar 8,61 atau realisasi capaian kinerja 92,98%, dan realisasi tahun 2024 sebesar 9,26 atau realisasi capaian kinerja 100%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar (8,2%) Hal ini di sebabkan perhitungan PDRB pada saat itu masih memuat Kehutanan dan perikanan, sehingga jumlahnya menjadi lebih tinggi terhadap capaian tahun 2022, kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 0,16% terhadap capaian tahun 2022 dan kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 0,01% terhadap capaian tahun 2022.

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.8.2

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB	Persen	9,26	5%	185%

Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2024

Perbandingan realisasi indikator kinerja Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB tahun 2024 sebesar 9,26% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 5%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2024 pencapaiannya sebesar 185% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Nilai PDRB suatu wilayah dapat memberikan informasi tingkat pertumbuhan ekonomi maupun tingkat kemakmuran masyarakat terhadap wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB suatu wilayah maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonominya juga tinggi atau tingkat kemakmuran masyarakatnya juga baik..

Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam memberikan informasi tingkat pertumbuhan ekonomi maupun tingkat kemakmuran masyarakat terhadap wilayah.

Tabel
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
	2021	2022	2023
(1)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11,00	8,59	8,61
B. Pertambangan dan Penggalan	50,96	60,96	60,51
C. Industri Pengolahan	2,44	1,93	1,96
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,03	0,03
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,06	0,06
F. Konstruksi	15,63	12,06	11,94

Sumber Data : BPS, Malinau Dalam Angka 2024

Dari Tabel di Atas dapat di simpulkan Kontribusi Pertanian Dalam Arti Luas (TNP, Holti, Ternak, Perikanan) Terhadap PDRB semakin membaik, kenaikan pada 2021, lebih di sebabkan perhitungan PDRB pada saat itu masi

memuat Pertambangan dan penggalan, sehingga jumlahnya menjadi lebih tinggi.

Faktor penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Komitmen pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam penyediaan anggaran untuk Dinas Pertanian, baik dalam peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
- 2) Dukungan dan kerjasama yang baik antara lintas OPD dan lintas sektoral;
- 3) Perubahan perilaku masyarakat seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Teknologi Pertanian dan Bibit- bibit tanaman yang bersertifikasi sehingga dapat meningkatkan produksi Tanaman pangan yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Petani dalam arti Luas;
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan Pelayanan Oleh Dinas Pertanian melalui sosialisasi, pelatihan, bimtek yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga SDM dan pengetahuan para Petani menjadi semakin Baik dari Tahun ke Tahunnya;

Selain faktor keberhasilan, ada beberapa faktor yang bisa menjadi penghambat, penyebab kegagalan atau penurunan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Keterampilan petani mengelola lahan pertanian sesuai karakteristik dan kearifan lokal secara berkelanjutan.
2. Kurangnya ketersediaan dan sebaran Sarana Prasarana dan Infrastruktur Pertanian serta penyuluhan di tingkat Kecamatan dan desa.
3. Belum tersedianya tenaga pertanian PNS antara lain: pengawas benih tanaman, pengendali organisme pengganggu tumbuhan, pengawas bibit ternak, pengawas mutu pakan, medik veteriner, paramedik veteriner, pengawas mutu hasil pertanian, analis pasar hasil pertanian.
4. Banyaknya petani yang berusia lanjut dan Kurangnya minat pemuda/pemudi dalam mengelola lahan pertanian. serta terbatasnya pengadaan distribusi alat mesin pertanian

Alternative solusi yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Malinau atas kegagalan/penurunan kinerja sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan upaya pencegahan Penyakit/Hama Tanaman Pangan dan Hewan Ternak
- 2) Peningkatan akses Jalan Tani melalui kerjasama dengan PU Perkim

- 3) Memperbaiki Saluran-saluran Irigasi melalui kerjasama dengan PU Perkim
- 4) Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat;
- 5) Menjamin ketersediaan Benih Padi;
- 6) Pembinaan/peningkatan kapasitas tenaga PPL;
- 7) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan;
- 8) Mengadakan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala (per triwulan).

Gbr. Pemeriksaan Kesehatan Hewan & Pemberian Vitamin Kepada Ternak



Gbr. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Petani dan PPL



Gbr. Monev Pencegahan Penyakit Tanaman Perkebunan



b. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Kontribusi Pertanian Dalam Arti Luas (Kehutanan Pertanian dan Perikanan) Terhadap PDRB sebesar Rp. 36.496.640.433,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 59.803.411.830,- atau capaian realisasi keuangan sebesar 61.03%, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 90,00%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efektivitas dan Kriteria Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja untuk indikator kinerja Angka Usia harapan hidup termasuk dalam kriteria Efektif

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja Kontribusi Pertanian Dalam Arti Luas (Kehutanan Pertanian dan Perikanan) Terhadap PDRB sebesar Rp. 36.496.640.433,- dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp 59.803.411.830,- atau capaian realisasi keuangan sebesar 61,03%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria Efektif

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan ataupun pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.8.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya produktifitas sektor-sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan kearifan lokal	Kontribusi pertanian terhadap PDRB		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	61,47%
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	71,74%
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	62,45%
			Program Penyuluh Pertanian	63,21%
			Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	74,68%
			Program perizinan usaha pertanian	36,40%

Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2024

Dari tabel 3.8.3 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program-program. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Penyuluh Pertanian dan Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian.

8. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah

Pengukuran sasaran meningkatnya nilai tambah sektor industri, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berorientasi pada potensi dan karakteristik wilayah

dengan indikator kinerja kontribusi industri, perdagangan dan jasa terhadap PDRB dan kontribusi pariwisata terhadap PDRB, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran kontribusi industri, perdagangan dan jasa terhadap PDRB dan kontribusi pariwisata terhadap PDRB dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.9
Evaluasi Pencapaian Sasaran 8
Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 %
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
Kontribusi Industri, Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB	Persen	85,55%	2,80%	2,31	82,5%
Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	136,41%	1,85%	1,85	100%

Sumber : Dinas Perindag dan Dinas Kebudayaan dan pariwisata Tahun 2024

Pada Tabel 3.9 diatas dapat dilihat perbandingan kontribusi industri, perdagangan dan jasa terhadap PDRB dengan target di tahun 2024 adalah 2,80% realisasi 2,31% dan capaian kinerja untuk kontribusi industri, perdagangan dan jasa terhadap PDRB tahun 2024 adalah 82,5%. Indikator kinerja kontribusi pariwisata terhadap PDRB dengan target di tahun 2024 adalah 1,85 realisasi tahun 2024 adalah 1,85 dengan capaian kinerja untuk rata-rata kontribusi pariwisata terhadap PDRB tahun 2024 adalah 100%.

KONTRIBUSI INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA TERHADAP PDRB

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.9.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu				Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 vs Tahun			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kontribusi Industri, Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB	Persen	2,31%	-	1,93%	2,44%	2,31%	-	83,5%	105,6 %	100%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah perbandingan realisasi Kontribusi Industri, Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB tahun 2024 sebesar 2,31% dengan realisasi tahun 2021 sebesar 1,93 atau realisasi capaian kinerja sebesar 83,5%, realisasi tahun 2022 sebesar 2,44% atau realisasi capaian kinerja 105,6% dan realisasi tahun 2023 sebesar 2,31% atau realisasi capaian kinerja 100%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 19,68% terhadap realisasi capaian tahun 2021 dan adanya penurunan realisasi capaian kinerja sebesar -5,32% terhadap realisasi capaian 2022 dan tidak adanya kenaikan dan penurunan realisasi capaian keinerja di tahun 2023.

Dalam upaya menilai efektivitas pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja hingga tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan. Berikut disajikan tabel yang membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.9.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB	Persen	2,31%	3,00%	77%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi kontribusi industri, perdagangan dan jasa terhadap PDRB tahun 2024 sebesar 2,31% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 3,00% maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2024 pencapaiannya sebesar 77% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalam satu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana semakin tinggi PDRB maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonominya juga tinggi. Untuk itu pemerintah khususnya kabupaten Malinau berusaha untuk terus menerus meningkatkan PDRB-nya khususnya dari sektor industri, perdagangan dan jasa.

Pertumbuhan industri Kabupaten Malinau di Tahun 2023 ini terjadi pada industri kecil maupun industri menengah, sementara industri besar cenderung tetap. Hal ini mengingat bahwa kebijakan tata ruang Kabupaten Malinau yang terbatas untuk adanya penambahan jumlah industri besar. Sedangkan untuk jenis dan kelompok usahanya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9.3
Jenis dan Kelompok Usaha Industri di Kabupaten Malinau Tahun 2024

No.	Jenis Industri	Aneka Usaha
1.	Pangan/Agro	1. Pembuatan Roti & Kue 2. Penggilingan Daging 3. Penggilingan Padi 4. Depo Air Minum 5. Tahu & Tempe 6. Pembuatan Mie 7. Kopi Bubuk 8. Obat Tradisional 9. Minyak Sawit
2.	Logam	1. Bengkel 2. Las, Teralis dan Bubut 3. Pandai Besi 4. Penggilingan Aspal 5. Pembuatan Perahu 6. Pengolahan Aluminium 7. Servis Elektronik 8. Percetakan
3.	Bahan Bangunan	1. Bata / Batako / Paving
4.	Kerajinan	2. Moulding
5.	Furniture	1. Anyaman 2. Manik-manik 3. Ukiran
6.	Konveksi	1. Meubelair 1. Penjahitan

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Upaya mempertahankan kinerja Persentase pertumbuhan industri adalah :

1. Terus meningkatkan sarana / prasarana dan kebijakan yang memberikan ruang gerak bagi pelaku industri .
2. Menjalin kerjasama dengan asosiasi yang ada untuk pengembangan industri kreatif.
3. Memotivasi pelaku industri kreatif dalam pemanfaatan bahan baku yang cukup.
4. Terus meningkatkan daya kreatifitas terutama pada sektor industri kuliner.

5. Mendorong pertumbuhan industri berdasarkan Rencana Pembangunan Industri
6. Meningkatkan pemasaran produk unggulan tingkat lokal, nasional maupun internasional

Upaya kedepan yang dilakukan untuk pencapaian persentase peningkatan jumlah pertumbuhan industri adalah :

1. Pembinaan dan menumbuhkan usaha baru dan pengawasan terhadap usaha baru yang ada
2. Pelatihan SDM baik Kriya dan Aneka Kuliner
3. Fasilitasi bantuan mesin peralatan industri
4. Fasilitasi berkenaan HAKI, Paten Sertifikasi Halal, SNI Produk dan Pelatihan Keamanan Pangan.



b. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB sebesar Rp.4.834.4442.819, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.5.677.188.835 atau capaian realisasi keuangan sebesar 85,15%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria Efektif

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan

antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB sebesar Rp.4,834.442.819, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp.10.398.187.297 atau capaian realisasi keuangan sebesar 46,51%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria Sangat Efisien

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan ataupun pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.9.4
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB	82,5%	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.130.085.427	2.647.357.902	84,58%
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.547.103.426	2.187.084.917	85,87%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Dari tabel 3.9.3 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program-program. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.

KONTRIBUSI PARIWISATA TERHADAP PDRB

Berikut disajikan tabel yang membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.9.6
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	1,85%	1,86%	99,46%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024

Perbandingan realisasi indikator kinerja Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB tahun 2024 sebesar 1,85% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 1,86%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2024 pencapaiannya sebesar 99,46% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu Daerah dikarenakan Pariwisata dapat memberikan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kekayaan suatu daerah.

Pengaruh pariwisata dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terlihat dari kontribusi jasa pariwisata, penerimaan dan sektor pendukungnya. Sektor pariwisata merupakan sektor yang berbasis jasa dan sebagai salah satu sektor unggulan yang strategis dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pariwisata tidak lepas dari jasa penyedia makanan dan minuman yaitu restoran, serta penyediaan akomodasi (hotel, penginapan)

Untuk mengetahui kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100$$

Target kontribusi sektor pariwisata pada tahun 2023 yaitu sebesar 1,84% dengan realisasi sebesar 2,51% dan capaian kinerja 136,41%. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Terselenggaranya Even HUT Kabupaten Malinau dan Irau Kabupaten Malinau, sehingga meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten Malinau.
2. Terdapat objek wisata sebagai destinasi wisata di Kabupaten Malinau
3. Penyediaan jasa makan dan minum (Restoran dan Rumah Makan), penyediaan jasa akomodasi yang berkembang di Kabupaten Malinau.
4. Adanya dukungan dari instansi terkait dalam upaya peningkatan kualitas penyediaan jasa dan akomodasi pada sektor pariwisata melalui kegiatan pelatihan antara lain pelatihan pemandu wisata alam, pelatihan homestay dan lainnya.

Dalam pencapaian kinerja tidak hanya di pengaruhi faktor pendukung ada juga faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat beberapa Hotel dan Rumah Makan/Restoran yang belum terdata secara lengkap.

2. Keterbatasan tenaga/Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Hotel, Rumah Makan dan Restoran secara optimal.

Menindaklanjuti hambatan-hambatan tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan alternatif perbaikan untuk solusi kedepannya sebagai berikut:

1. Melakukan promosi pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan.
2. Melakukan pendataan secara berkelanjutan terhadap usaha pariwisata yang ada.
3. Melakukan peningkatan dan pengembangan pada objek pariwisata.

b. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja kontribusi pariwisata terhadap PDRB sebesar Rp. 7.384.318.106, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 10.005.682.736 atau capaian realisasi keuangan sebesar 73,80%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria Kurang Efektif.

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja kontribusi pariwisata terhadap PDRB sebesar Rp. 7.384.318.106, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 13.147.329.871 atau capaian realisasi keuangan sebesar 56,16%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria Sangat Efisiensi

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.9.7
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB)	136,41%	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	9.346.426.286	6.817.000.671	72,94%
			Program Pemasaran Pariwisata	659.256.450	567.317.435	86,05%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024

Dari tabel 3.9.7 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan program pemasaran pariwisata.

9. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil dan Mikro Yang Berkualitas

Pengukuran sasaran meningkatnya pertumbuhan koperasi serta usaha kecil dan mikro yang berkualitas dengan indikator kinerja sasaran persentase peningkatan koperasi berkualitas dan persentase peningkatan usaha mikro dan kecil, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran yaitu persentase peningkatan koperasi berkualitas dan pesentase peningkatan usaha mikro dan kecil dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.10
Evaluasi Pencapaian Sasaran 9
Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil
dan Mikro Yang Berkualitas

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 %
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas	Persen	63,13%	74%	6,62%	9,2%
Persentase Peningkatan Usaha Mikro Dan Kecil	Persen	24,01%	76,60%	10,94%	14,28%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Pada Tabel 3.10 diatas dapat dilihat perbandingan persentase peningkatan koperasi berkualitas dengan target RPJMD 2021-2026 tahun 2024 adalah 74% dan realisasi untuk tahun 2023 adalah 6,68% sehingga capaian kinerja untuk persentase peningkatan koperasi berkualitas tahun 2023 adalah 9,2%. Pesentase peningkatan usaha mikro dan kecil dengan target RPJMD 2021-2026 tahun 2024 adalah 76,60% dan realisasi untuk tahun 2024 adalah 10,94% sehingga capaian kinerja untuk pesentase peningkatan usaha mikro dan kecil tahun 2023 adalah 14,28%.

PERSENTASE PENINGKATAN KOPERASI BERKUALITAS

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.10.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas	Persen	45,45%	80%	56,81%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi persentase peningkatan koperasi berkualitas tahun 2023 sebesar 45,45% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 80%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapaiannya sebesar 56,81% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Koperasi merupakan suatu bentuk organisasi yang memiliki badan hukum yang dapat didirikan oleh orang perseorangan atau yang memiliki badan hukum yaitu Koperasi, dimana terdapat pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal dalam menjalankan suatu usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh serta setara dengan badan usaha lainnya melalui regulasi yang kondusif, perkuatan Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan, pembiayaan, pemasaran dan kemajuan teknologi.

Koperasi dapat dikatakan berkualitas apabila koperasi memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan sekaligus manfaat bagi seluruh anggota koperasi yang memiliki badan hukum aktif dan badan usaha yang memiliki ciri prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan memiliki kinerja usaha yang semakin sehat serta memiliki orientasi kepada usaha anggota dan memiliki kepedulian sosial (Permenkop No. 21, 2015).

Keberhasilan program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan Koperasi Berkualitas. Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan diatas, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemaparan alternative solusi yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Adapun faktor Penghambat Koperasi Berkualitas adalah :

1. Sumber daya manusia Koperasi masih belum memadai.
2. Pengurus Koperasi yang kurang memiliki waktu luang atau masih dianggap bukan tugas pokok.
3. Kurangnya pemahaman gerakan Koperasi dalam penyelenggaraan Rapat Anggota koperasi dan partisipasi, pengawasan anggota dan pengelolaan koperasi untuk pengembangan koperasi.
4. Belum adanya pengembangan sistem yang memudahkan perangkat koperasi melaporkan aktivitas kelembagaannya.
5. Belum optimal Koperasi dapat meningkatkan produk unggulan daerah menjadi komoditas ekspor yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan devisa daerah.

Faktor Pendukung Persentase Koperasi Berkualitas adalah

1. Anggaran yang tersedia dalam APBD Kabupaten Malinau;
2. Aparatur pelaksana kegiatan yang memahami tugas dan fungsinya;
3. Telah ditetapkannya jadwal dan KAK pelaksanaan kegiatan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
4. Tersedianya acuan mekanisme pemeriksaan Koperasi oleh pemerintah yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 9 Tahun 2020, Tentang Pemeriksaan Kesehatan Koperasi.
5. Tersedianya tenaga Pendamping Koperasi yang siap membantu penyusunan laporan RAT.
6. Adanya himbauan pelaksanaan RAT setiap awal tahun. Komitmen OPD melaksanakan tupoksinya dengan baik.

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan pembinaan terhadap Lembaga koperasi.
2. Meningkatkan kompetensi SDM koperasi.
3. Meningkatkan kepatuhan koperasi terhadap perundang-undangan.
4. Meningkatkan partisipasi anggota terhadap usaha koperasi.

5. Meningkatkan Kerjasama pembiayaan dengan pihak ketiga.
6. Meningkatkan unit usaha yang dikelola koperasi.

b. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja persentase peningkatan kopersai berkualitas sebesar Rp. 271.628.267, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.388.969.000 atau capaian realisasi keuangan sebesar 69,83%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria kurang efektif

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkankeluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang

seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja persentase peningkatan kopersai berkualitas sebesar Rp.271.628.267 dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp.5.830.372.745 atau capaian realisasi keuangan sebesar 4,65%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria Sangat Efisien.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan ataupun pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.10.4
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil dan Mikro Yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas	63,13	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	388.969.000	271.628.267	69,83 %

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program pendidikan dan pelatihan perkoperasian dengan hasil capaian kinerja mencapai angka 63,13% dengan realisasi keuangan 69,83%.

10. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan

Pengukuran sasaran meningkatnya ketahanan pangan dengan indikator kinerja sasaran indeks ketahanan pangan, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran yaitu indeks ketahanan pangan dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.11
Evaluasi Pencapaian Sasaran 10
Meningkatnya Ketahanan Pangan

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 %
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	$6 = 5/4 \times 100$
Indeks Ketahanan Pangan	Poin	97,32%	76,52	74,67	97,93%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

Pada Tabel 3.11 diatas dapat dilihat hasil capaian indikator kinerja indeks ketahanan pangan dengan target RPJMD tahun 2024 adalah 76,52 dan

realisasi untuk tahun 2024 adalah 74,67 dengan capaian kinerja tahun 2024 adalah 97,93%.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.11.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu				Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 vs Tahun			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Indeks Ketahanan Pangan	Poin	74,67	70,78	73,66	67,25	73,08	94,79 %	98,64 %	90,06 %	97,87 %

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi indeks ketahanan pangan tahun 2024 sebesar 74,67 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 70,78 atau realisasi capaian kinerja sebesar 94,79%, realisasi tahun 2021 sebesar 73,66 atau realisasi capaian kinerja sebesar 98,64%, realisasi tahun 2022 sebesar 67,25 atau realisasi capaian kinerja sebesar 90,06% dan realisasi tahun 2023 sebesar 73,08 atau realisasi capaian kinerja sebesar 97,87%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 5,49% terhadap capaian tahun 2020, adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 1,37% terhadap capaian tahun 2021, adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 11,03% terhadap capaian tahun 2022 dan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 2,17% terhadap capaian tahun 2023.

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.11.2

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Indeks Ketahanan Pangan	Poin	74,67	79,4	94,04%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi indeks ketahanan pangan tahun 2024 sebesar 74,67 poin dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 79,4 poin, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2024 pencapaiannya sebesar 94,04% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Indikator Kinerja Utama Indeks Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau terkait dengan tugas pokoknya yaitu Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten,

Indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) langsung dihitung oleh Badan Ketahanan Pangan tingkat Nasional yang digolongkan ke dalam 3 aspek, yaitu: (a) Aspek Ketersediaan Pangan; (b) Aspek keterjangkauan; (c) Badan Pangan Nasional melakukan updating Indeks Ketahanan Pangan Nasional (IKP) Tahun 2024 dengan unit analisis tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari tiga aspek yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lain:

Target **76,25 Poin**

Capaian **74,67 Poin**

- Ketersediaan **59,18**



- Keterjangkauan **91,14**
- Pemanfaatan **73,93**

Badan Pangan Nasional melakukan updating Indeks Ketahanan Pangan Nasional (IKP) Tahun 2024 dengan unit analisis tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Capaian IKP Tahun 2024 sebesar **74,67** poin sedangkan target **76,25** dengan Hasil IKP ini jelas tergambar bahwa masih belum tercapai dengan Selisih 1,85 point.

Capaian IKP Tahun 2024 yakni 74,67 Poin, dengan 3 Aspek :

A. ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN

Ketersediaan 59,18 poin

- 1) Indikator Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih.

B. ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN

Keterjangkauan 91,14 poin

- 1) Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan
- 2) Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran
- 3) Persentase rumah tangga tanpa akses listrik

C. ASPEK PEMANFAATAN PANGAN

Pemanfaatan 73,93 poin

- 1) Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun
- 2) Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
- 3) Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk
- 4) Persentase balita *stunting*
- 5) Angka harapan hidup pada saat lahir

Meskipun dari 3 Aspek di atas ada kenaikan dari Tahun 2022 yakni 67,25 point dan di tahun 2023 mengalami kenaikan 5,83 poin sehingga di Tahun 2023 mencapai 73,08 poin. Namun dari 3 aspek Aspek Ketersediaan tersebut yang masih rendah yakni Indikator Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih.

Yang dimaksud Rasio konsumsi normative yakni Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih komoditas padi, jagung, ubi kayu, ubi



jalar, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah. Produksi bersih didekati dari angka produksi setelah dikurangi susut, tercecer, penggunaan untuk benih, pakan dan industri non pangan

Adapun Data produksi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah menggunakan angka tetap 2023 dari BPS dan Kementerian Pertanian.

Hasil dari updating Indeks Ketahanan Pangan Nasional (IKP) Tahun 2023 untuk mewujudkan Tercapainya wilayah Tahan Pangan Tahun 2024 yakni bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini OPD terkait di sarankan harus lebih di tingkatkan Hasil Produksi Pertanian dengan komoditas padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah dalam hal ini Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Malinau.

Untuk lebih Detail angka dalam perhitungan setiap Indikator IKP yang terakomodir dalam 3 Aspek belum di ketahui karena belum dilakukan Koordinasi secara Teknis langsung ke Teknis Penyusunan IKP di Badan Pangan Nasional.

IKP DENGAN FSVA KABUPATEN

IKP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA Kabupaten) ada 3 Indikator indikator IKP yang digunakan dalam penyusunan FSVA Nasional yakni :

- Indikator Presentase Penduduk Miskin
- Presentase rumah tangga tanpa akses air bersih
- Rasio jumlah penduduk pertenaga kesehatan

• Dalam Penyusunan FSVA 2024 Peran Dinas Ketahan Pangan yakni menganalisis penyiapan Data dan Informasi Kerentanan dan Ketahanan Pangan **Food Security Vulnerability Atlas** (FSVA) dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) kabupaten Malinau. Dalam hal ini melibatkan beberapa Unit Perangkat Daerah dengan data data yang di perlukan sesuai Aspek pada FSVA 2024. Adapun Unit Perangkat Daerah yang masuk dalam Tim yakni :

- 1) BPS
- 2) Dinas PU Perkim

- 3) Dinas Pertanian
- 4) Dinas Kesehatan
- 5) DP3AS
- 6) Disdukcapilnaker

Faktor Penyebab Kerentanan Pangan secara umum di lihat dari keenam indikator pembentuk indeks yang belum memadai yakni : Penyediaan Lahan Pertanian, sarana dan prasarana penyedia pangan dan tenaga kesehatan.

Tindak lanjut IKP di Tahun 2024 ini agar Data dari Unit Perangkat Daerah yang terlibat dalam Pengisian Aspek, Indikator memberikan Data yang riil dan dengan harapan pada akhirnya Informasi Kerentanan dan ketahanan pangan **Food Security Vulnerability Atlas** (FSVA) Tahun 2024 bidang tercapai.

b. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja indeks ketahanan pangan sebesar Rp. 329.715.529 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 334.663.244 atau capaian realisasi sebesar 98,52% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 92,04%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 4.947.719. atau sebesar 1,48%.

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.11.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	98,52%	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	620.085.372	492.381.000	99,09 %
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	50.780.000	43.676.500	98,22 %

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

Dari tabel 3.11.3 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program-program. Hasil capaian kinerja dan realisasi capain keuangan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa program-program yang mendukung indikator kinerja berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

11. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Profesionalitas Tenaga Kerja

Pengukuran sasaran meningkatnya profesionalitas tenaga kerja dan indikator kinerja sasaran tingkat pengangguran terbuka, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran yaitu tingkat pengangguran terbuka dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.12
Evaluasi Pencapaian Sasaran 11
Menurunnya Angka Pengangguran

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 %
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	122,19%	4,09	3,10	124,20%

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024

Berdasarkan Tabel di atas, pencapaian sasaran menurunnya angka pengangguran dengan indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka dengan target 4,09% dan terealisasi 3,10%. Untuk tahun 2024 capaian kinerja sebesar 124,20%, dengan demikian berarti ada peningkatan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.12.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu				Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 vs Tahun			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,10	5,08	4,14	3,30	3,19	162,9 %	133,5 %	106,4 %	102,9 %

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 adalah perbandingan realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 sebesar 3,10 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 5,08 atau realisasi capaian kinerja sebesar 162,9%, realisasi tahun 2021 sebesar 4,14 atau realisasi capaian kinerja sebesar 133,5%, realisasi tahun 2022 sebesar 3,30 atau realisasi capaian kinerja sebesar 106,4% dan realisasi tahun 2023 sebesar 3,19 atau realisasi capaian kinerja sebesar 102,9%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan realisasi capaian kinerja tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 sekitar 38,97% terhadap capaian tahun 2020 dan adanya kenaikan realisasi capaian kinerja tahun 2024 sekitar 25,12% terhadap realisasi capaian tahun 2021, adanya kenaikan realisasi capaian kinerja tahun 2024 sekitar 6,06% terhadap realisasi capaian tahun 2022 dan adanya kenaikan realisasi capaian kinerja tahun 2024 sekitar 2,82% terhadap realisasi capaian tahun 2023.

Dalam upaya menilai efektivitas pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja hingga tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan. Berikut disajikan tabel yang membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.12.2

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,10	4,00	122,5%

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan Tingkat Pengangguran tahun 2024 sebesar 3,10 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 4,00, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2024 pencapaiannya sebesar 122,5% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Berdasarkan tabel 3.12 pencapaian kinerja tahun 2024 dengan sasaran menurunnya angka pengangguran dan indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka untuk tahun 2024 capaian kinerjanya sebesar 124,20%. Dari data yang telah ditampilkan pada tabel diatas maka diketahui terjadi peningkatan capaian kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Adapun beberapa faktor yang mendukung keberhasilan indikator kinerja ini yaitu:

- 1) Tingkat kesempatan kerja yang cukup besar pada sektor usaha baik pada sektor usaha industri, perbankan dan UMKM.
- 2) Adanya dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Malinau yaitu melalui salah satu program inovasi daerah yakni Program Milenial



Mandiri dimana pada program ini telah dilakukan banyak kegiatan Pelatihan-pelatihan bagi pencari kerja, perluasan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja dan bursa kerja (job Fair) yang dilaksanakan guna mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Malinau.

Data jumlah angkatan kerja pada tahun 2023 di Kabupaten Malinau adalah 47.796 orang/jiwa atau sekitar 74,26% persen dari jumlah penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 74,26%, dengan jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tersebut menunjukkan besarnya partisipasi angkatan kerja aktif dalam kegiatan perekonomian di Kabupaten Malinau. Dari jumlah 47.796 orang/jiwa, proporsi angkatan kerja laki-laki lebih besar dibandingkan dengan Angkatan kerja perempuan dimana 63,06 persen (30.380 jiwa) adalah angkatan kerja laki-laki dan 36,94 persen (17.794 jiwa) penduduk perempuan.

Jumlah angkatan kerja terbagi menjadi dua kategori yaitu jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan sebesar 47.796 orang (96,81%), sedangkan jumlah penduduk yang belum atau tidak memiliki pekerjaan (Pengangguran Terbuka) sebanyak 1.526 orang (3,19%).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau bahwa tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kegiatan selama satu tahun yang lalu sebesar 1.526 orang atau 3,19% pada tahun 2023.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingkat atau angka pengangguran di Kabupaten Malinau belum menurun secara signifikan karena;

- a. Kurang maksimalnya penyerapan Tenaga Kerja Lokal di berbagai sector industry karena kurangnya keterampilan/Skil yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan industry saat ini.
- b. Ketidak sesuaian jurusan lulusan pencari kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja saat ini serta Tingkat kebutuhan akan tenaga kerja berpengalaman dibidang pekerjaan tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh pencari kerja lokal Malinau.

Jumlah pencari kerja terus bertambah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, demikian pula laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang siap bersaing mengisi peluang pasar kerja serta tidak terlepas dari kecenderungan terus meningkatnya tamatan lembaga-lembaga pendidikan formal.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka sebesar Rp 2.182.492.832,00, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.928.943.650,00 atau capaian realisasi keuangan sebesar 74,51%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan di atas, maka rasio efisiensi dan kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja termasuk dalam kriteria Cukup Efektif.

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat

perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.12.4
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	122,19%	Program Perencanaan tenagakerja	100.000.000	95.003.018	95,00
			Program Pelatihan dan Pemningkatan Produktivitas Tenaga kerja	1.550.600.900	1.353.500.319	87,29
			Program Penempatan Tenaga kerja	210.482.000	183.000.820	86,94

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024

Dari tabel 3.12.4 diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja menurunnyaangkapengangguranmencapai angka 3,19%

dengan rata-rata realisasi keuangan 86,25%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah ProgramPerencanaantenagakerja, Program Pelatihan dan PeningkatanProduktivitas Tenaga kerja.

12. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Investasi Daerah

Pengukuran sasaran meningkatnya investasi daerah dan indikator kinerja sasaran nilai investasi daerah dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran nilai investasi daerah dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.13
Evaluasi Pencapaian Sasaran 12
Meningkatnya Investasi Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 %
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Nilai Investasi Daerah	Rupiah	1.273 %	92.000.000.000	2.262.423.698.665	2.459%

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024

Pencapaian sasaran meningkatnya nilai investasi daerah dengan target RPJMD 2021-2026 adalah 92.000.000.000 dan terealisasi untuk tahun 2024 adalah Rp. 2.262.423.698.665, sehingga capaian indikator kinerja nilai investasi daerah tahun 2024 adalah 2.459 %.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.13.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu				Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 vs Tahun			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nilai Investasi Daerah	Tahun	2.262.423.698.665	92.077.524.030	314.470.808.689	1.030.086.378.748	1.159.840.400.335	4,07 %	13,9%	45,53 %	51,26 %

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 adalah perbandingan realisasi Jumlah nilai investasi tahun 2024 sebesar 2.262.423.698.665 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 92.077.524.030 atau realisasi capaian kinerja 4,07 %, realisasi tahun 2021 sebesar 314.470.808.689 atau realisasi capaian kinerja 13,9 %, realisasi tahun 2022 sebesar 1.030.086.378.748 atau realisasi capaian kinerja 45,53 %, dan %, realisasi tahun 2023 sebesar 1.159.840.400.335 atau realisasi capaian kinerja 51,26 %, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 2.357% terhadap capaian tahun 2020, kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 619% terhadap capaian tahun 2021, kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 119% terhadap capaian tahun 2022 dan kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 95,06% terhadap capaian tahun 2023.

Dalam upaya menilai efektivitas pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja hingga tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan. Berikut disajikan tabel yang membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.13.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Nilai Investasi Daerah	Rupiah	2.262.423.698.665	94.000.000.000	2.407%

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi nilai investasi daerah tahun 2024 sebesar Rp. 2.262.423.698.665 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar Rp. 94.000.000.000, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2024 pencapaiannya sebesar 2.407% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau Tahun 2024 ada 2 Indikator :

1, Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ kota

Alasan Pemilihan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatas :

1. Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten /Kota adalah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah Berdasarkan Laporan dari Bidang Pengaduan yang menjadi tupoksi Bidang dalam menghitung Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat melalui survey kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Rumusan Penghitungannya berdasarkan rumusan yang telah diberikan oleh Kemenpan RB yang menjadi acuan Bidang dalam mendapatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Menciptakan Iklim Investasi yang kondusif	Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota	$\frac{\text{Jumlah Nilai Investasi (satuan rupiah) Tahun } n - \text{Jumlah Nilai Investasi (satuan rupiah) Tahun } (n-1)}{\text{Jumlah Nilai Investasi (satuan rupiah) Tahun } (n-1)} \times 100\%$	Bidang Perencanaan, Pembangunan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kepala Bidang Perencanaan, Pembangunan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2	Meningkatkan Profesionalisme penyelenggaraan pelayanan perizinan	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan Nonperizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja :

1. Anggaran yang tersedia dalam APBD Kabupaten Malinau;
2. Aparatur pelaksana kegiatan yang memahami tugas dan fungsinya;
3. Telah ditetapkan jadwal dan KAK pelaksanaan kegiatan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
4. Komitmen OPD melaksanakan tupoksinya dengan baik.

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

1. Masih adanya keterlambatan terbitnya Juknis pada kegiatan DAK dan menunggu pergeseran/ perubahan anggaran sesuai Junis Kementrian sehingga kegiatan dalam pelaksanaannya terbatas
2. Adanya Keterlambatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal oleh Pelaku usaha (LKPM) yang menjadi penghambat dalam mendapatkan Update data Nilai Realisasi Investasi tiap Triwulannya.

b. Analisis atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif

organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai Investasi Daerah sebesar Rp.345178520, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.417.400.000 atau capaian realisasi keuangan sebesar 82,70%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria Cukup Efektif.

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program,

kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.13.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIA N KINERJ A (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIA N KINERJ A (%)
Meningkatn ya Investasi Daerah	Nilai Investasi daerah	1203%	Program Pengendal ian Pelaksana an Penanama n Modal	417.400.000	345.178.520	82,70%

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan capaian kinerja mencapai angka 1203% dengan realisasi keuangan 82,70%.

Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Tujuan 1: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan dasar

13. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan

Pengukuran Tujuan Mewujudkan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan dasar melalui Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran pesentase panjang jalan dalam kondisi mantap, persentase pemukiman yang layak, rasio rumah layak huni, persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi, persentase penduduk berakses air minum dan persentase irigasi kabupaten yang berfungsi dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.14
Evaluasi Pencapaian Sasaran 13
Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 %
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	50,77%	54,80%	30,46%	55,58%
Persentase Pemukiman yang Layak	Persen	103,06%	80%	82,07%	102,58%
Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	1:1,002	1:1,068	1:405,1	%
Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi	Persen	100,91%	75%	85,46%	113,94%
Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	113,66%	77%	76,83%	99,77%
Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi	Persen	161,70%	32,46%	75,06%	231%

Sumber : Dinas PUPRPerkim dan Dinas Perhubungan Tahun 2024

PERSENTASE PANJANG JALAN DALAM KONDISI MANTAP

Pada tabel 3.14 di atas pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dengan indikator kinerja sasaran persentase panjang jalan dalam kondisi baik atau mantap untuk tahun 2024 ditargetkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 adalah 54,80% dengan realisasi mencapai 30,46% dan capaian kinerja sebesar 55,58%.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.14.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu				Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 vs Tahun			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pesentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	30,46%	49,70 %	45,10 %	12,16 %	26,45 %	161,2 %	148,1 %	39,92 %	86,83 %

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 adalah perbandingan realisasi Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap tahun 2024 sebesar 30,46 % dengan realisasi tahun 2020 sebesar 49,70% atau realisasi kinerja 161,2% realisasi tahun 2021 sebesar 45,10% atau realisasi kinerja sebesar 148,1% realisasi tahun 2022 sebesar 12,16% atau realisasi kinerja sebesar 39,92% dan realisasi tahun 2023 sebesar 26,45% atau realisasi kinerja sebesar 86,83% . Dengan demikian maka hasil maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2024 sebesar -38,71 % terhadap capaian tahun 2020, penurunan capaian kinerja tahun 2024 sebesar -32,46% terhadap capaian tahun 2021, kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 150,5 % terhadap capaian tahun 2022 dan kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 15,16% terhadap capaian tahun 2023.

Dalam upaya menilai efektivitas pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja hingga tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan. Berikut disajikan tabel yang membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.14.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	30,46%	64.40%	47,29%

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap tahun 2024 sebesar 30,46% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 64,40%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2024 pencapaiannya sebesar 47,29 % terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Dari tabel-tabel yang telah disajikan diatas, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemaparan alternative solusi yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase jalan dalam kondisi baik atau mantap yaitu :

$$\frac{\text{panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \times 100\%$$

Penyelenggaraan Jalan pada tahun 2024 dari penanganan kegiatan pembangunan jalan capaian indikator kinerja pertama Kabupaten Malinau yaitu dalam mencapai jalan dalam kondisi mantap sebesar 26,45 persen Untuk jalan kabupaten pada akhir 2023 mengalami penurunan, dari target 52,10 persen menurun menjadi 25,65 persen yang disebabkan perubahan laju penurunan kondisi jalan yang tidak diimbangi dengan upaya peningkatan jalan dan tidak terpenuhinya standar pemeliharaan rutin jalan serta meningkatnya kerusakan

jalan. Dan Beberapa kegiatan gagal tender dikarenakan tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran sehingga dilakukan tender ulang. Jumlah penyedia jasa konstruksi dengan keahlian khusus aspal sangat kurang dibandingkan dengan jumlah paket pekerjaan yang ada dalam satu tahun, Kurangnya jumlah Tenaga teknis Dinas PU PR Perkim yang memiliki kompetensi untuk menangani pekerjaan konstruksi.

Adapun Solusi perbaikan yang akan dilakukan kedepan untuk memperbaiki Tingkat persentase Panjang jalan dama kondisi mantap adalah :

- Terus berkoordinasi dengan BPBJ terkait percepatan proses pengadaan tender yang gagal
- Menarik lebih banyak investor/kontraktor pengaspalan untuk berinvestasi di Malinau
- Melaksanakan pelatihan dan pengembangan kompetensi teknis untuk ASN secara intensif.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja persentase panjang jalan dalam kondisi mantap sebesar Rp.116.197.785.017, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp121.490.273.030 atau capaian realisasi keuangan sebesar 95,64%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria Efektif.

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja persentase panjang jalan dalam kondisi mantap sebesar Rp 116.197.785.017, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp 205.464.916.707 atau capaian realisasi keuangan sebesar 56,55%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria Sangat Efisien.

Efisiensi SDM khususnya SDM Bidang Bina Marga, UPTD dalam melaksanakan tugasnya tergolong cukup atau sedang yakni dengan melihat tingkat pendidikan yang sudah diselesaikan dimana jenjang pendidikan tinggi S1 hingga S3 masih rendah meskipun demikian efektivitas SDM cukup memuaskan yakni dengan melihat penurunan pelanggaran yang dilakukan dan insentif yang diterima sehingga pencapaian kinerja kegiatan dapat berjalan dengan baik.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.14.4
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Pesentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	50,77%	Program Penyelenggaraan Jalan	121.490.273.030	116.197.785.017	95,64%

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2024

Dari tabel 3.14.4 diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh beberapa program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Hasil capaian indikator kinerja Persentase jalan dalam kondisi mantap mencapai angka 50,77%. Program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah program penyelenggaraan jalan dengan realisasi keuangan 95,64%.

Program Pembangunan Jalan Tahun 2024



PERSENTASE PEMUKIMAN YANG LAYAK

Pada tabel 3.14 yang disajikan diatas yakni pada indikator kinerja persentase permukiman yang layak yang ditetapkan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau 2021-2026 dengan target di tahun 2024 adalah 80%, realisasi 82,07 % dan capaian indikator kinerja adalah 102,58%

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2022 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.14.5
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu				Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 vs Tahun			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pesentase Pemukiman Yang Layak	Persen	82,07%	-	-	81,16 %	81,41%	-	-	98,89 %	99,19 %

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2020 dan 2021 tidak dapat dihitung dikarenakan indikator kinerja persentase permukiman yang layak baru dilaksanakan ditahun 2022. Perbandingan realisasi Persentase permukiman yang layak di tahun 2024 sebesar 82,07% dengan realisasi tahun 2022 sebesar 81,16% atau realisasi capaian kinerja 98,89% dan realisasi tahun 2023 sebesar 81,41% atau realisasi capaian kinerja 99,19% maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan realisasi capaian kinerja tahun 2024 sebesar 1,12 % terhadap capaian tahun 2022 dan adanya kenaikan realisasi capaian kinerja tahun 2024 sebesar 0,81% terhadap capaian tahun 2023.

Dalam upaya menilai efektivitas pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja hingga tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan.

Berikut disajikan tabel yang membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.14.6
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase Pemukiman Yang layak	Persen	82,07%	81,97%	100,12%

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja Persentase pemukiman yang layak tahun 2024 sebesar 82,07% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 81,87%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2024 pencapaiannya sebesar 100,12% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Capaian indikator persentase permukiman yang layak yaitu sebesar 103,05 persen dan dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami beberapa kendala yaitu didalam kegiatan termasuk dengan perencanaan sehingga menunggu kegiatan perencanaan selesai terlebih dahulu baru dapat melaksanakan pengadaan kegiatan fisik dan ada 2 (dua) kegiatan yang gagal lelang karena tidak ada penyedia yang mengikuti proses lelang. Akan tetapi persentase pemukiman yang layak mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 81,41%.

Adapun Solusi perbaikan yang akan dilakukan kedepan untuk memperbaiki Tingkat persentase persentase pemukiman yang layak adalah : Melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan pencapaian target baik fisik maupun keuangan.

b. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja persentase pemukiman yang layak sebesar Rp797.768.944, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.881.765.600 atau capaian realisasi keuangan sebesar 42,39%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam kriteria Tidak Efektif.

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja persentase pemukiman yang layak sebesar Rp.797.768.944, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp.80.481.536.138 atau capaian realisasi keuangan sebesar Rp.1%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria Sangat Efisien.

Efisiensi SDM khususnya SDM Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugasnya tergolong cukup atau sedang yakni dengan melihat tingkat pendidikan yang sudah diselesaikan dimana jenjang pendidikan tinggi S1 hingga S2 masih rendah meskipun demikian efektivitas SDM cukup memuaskan yakni dengan melihat penurunan pelanggaran yang dilakukan dan insentif yang diterima sehingga pencapaian kinerja kegiatan dapat berjalan dengan baik.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.14.7
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Persentase Pemukiman Yang layak	103,05%	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah	1.881.765.600	797.768.944	42,39%

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2024

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dengan capaian kinerja mencapai angka 103,05% dan realisasi keuangan 42%.

RASIO RUMAH LAYAK HUNI

Pada tabel 3.14 yang disajikan diatas yakni pada indikator kinerja Rasio rumah layak huni yang ditetapkan di rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Malinau RPJMD 2021 - 2026 adalah 1 : 1,071 . realisasi untuk indikator kinerja Rasio rumah layak huni adalah 1 : 1,068 dan capaian indikator kinerja adalah 1 : 1,002

Hasil persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.14.8
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu				Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 vs Tahun			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	1:405,1	-	-	1:1,15	1:1,068	-	-	0,28	0,26

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 tidak dapat dihitung dikarenakan indikator kinerja Rasio Rumah Layak Huni merupakan salah satu indikator kinerja yang baru dilaksanakan ditahun 2022. Persentase kenaikan atau penurunan realisasi capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat dilihat dari perbandingan realisasi Rasio Rumah layak huni tahun 2023 sebesar 1 : 068 dengan realisasi tahun 2022 sebesar 1 : 1,15, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 7,13 % terhadap capaian tahun 2022.

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.14.9
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	1 : 1,068	1 : 1,062	1 : 1,005

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi Rasio rumah layak huni tahun 2023 sebesar 1 : 1,068 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 1 : 1,062 , maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapaiannya sebesar 1 : 1, 005 (99,4%) terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target nasional dapat disajikan sebagai berikut :

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Rasio rumah layak huni pada tahun 2024 yaitu sebesar 1 : 1,002 dan mampu meningkatkan hunian yang layak untuk kawasan kumuh. Target RPJMD 1:1,071 dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami kenaikan dengan realisasi 1:1,068. Adapun kendala selama pelaksanaan pekerjaan adalah material kayu yang tersedia dilapangan sering terjadi kekosongan dan memangkas waktu yang cukup lama untuk menunggu material tersebut tersedia dilapangan sehingga kegiatan RTLH tidak bisa trealisasi sesuai target.

Adapun Solusi perbaikan yang akan dilakukan kedepan untuk memperbaiki Tingkat persentase persentase pemukiman yang layak adalah Melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan pencapaian target baik fisik maupun keuangan.

b. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja rumah layak huni sebesar Rp12.320.000, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp250.000.000 atau capaian realisasi keuangan sebesar 4,93%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan di atas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria Tidak Efektif.

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja rumah layak huni sebesar Rp.12.320.000, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp.89.279.451.690 atau capaian realisasi keuangan sebesar 0,01%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria Sangat Efisien.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.14.10
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Rasio Rumah Layak Huni	1:1,002	Program pengembangan Permukiman	250.000.000	12.320.000	4,93%

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2024

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program pengembangan pemukiman dengan capaian kinerja mencapai angka 1:1,002 dengan realisasi keuangan 4,93%.

PERSENTASE DESA YANG TERHUBUNG DENGAN MODA TRANSPORTASI

Persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.14.11
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu				Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 vs Tahun			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pesentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi	Persen	85,46%	-	92,68 %	94,94 %	70,64%		108,4 %	111%	83%

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2021, 2022 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Pesentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi tahun 2024 sebesar 85,46% dengan realisasi tahun 2021 sebesar 92,68% atau realisasi capaian kinerja sebesar 108,4%, realisasi tahun 2022 sebesar 94,94% atau realisasi capaian kinerja

sebesar 111% dan realisasi tahun 2023 sebesar 70,64% atau realisasi capaian kinerja sebesar 83%.

Dalam upaya menilai efektivitas pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja hingga tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan.

Berikut disajikan tabel yang membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.14.12

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Pesentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi	Persen	85,46%	85%	100%

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja Pesentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi tahun 2024 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan tahun 2024 sebesar 85,46% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 85%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2024 pencapaiannya sebesar 100% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pengertian lain dari Desa yang terhubung dengan Moda Transportasi ini secara umum juga mencakup Sarana dan Prasarana yang sudah ada maupun akan diadakan yang tercermin pada Dua Program yaitu Program Pengelolaan Pelayaran dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai Aplikasi Perwujudannya.

Dari tabel-tabel yang telah disajikan diatas, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja Pesentase Desa Yang Terhubung

Dengan Moda Transportasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan dalam kondisi baik dan memadai serta memenuhi standar pelayanan minimal.
2. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kabupaten Malinau serta terjalannya kerjasama/koordinasi yang baik antar elemen untuk meningkatkan kondisi lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman.

Adapun beberapa faktor yang menghambat indikator kinerja persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi adalah:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas yang belum sepenuhnya memadai dan perlu adanya perbaikan dan rehabilitasi SDM yang belum Profesional.
2. Adanya perbedaan status jalan nasional dan kabupaten.

Solusi yang akan dilakukan kedepan adalah

1. Perlunya melakukan rehabilitasi pada sarana dan prasarana Perhubungan terutama pada sarana dan prasarana pelayanan publik seperti terminal, dermaga dan angkutan umum.
2. Melakukan koordinasi terkait kewenangan status jalan.

b. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada

outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi sebesar Rp 4.261.077.075, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 4.892.479.012 atau capaian realisasi keuangan sebesar 87,09%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria Efektif.

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program,

kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.14.13
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIA KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIA KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Pesentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi	113,94%	Penyelenggaraan lalulintas dan Angkutan Jalan	4.892.479.012	4.261.077.075	87,09%

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2024

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program Penyelenggaraan lalulintas dan Angkutan Jalan dengan capaian kinerja mencapai angka 100,91% dengan realisasi keuangan 94,56%.

PERSentase PENDUDUK BERAKSES AIR MINUM

Pada tabel 3.14 yang disajikan diatas yakni pada indikator kinerja Persentase penduduk berakses air minum yang ditetapkan di rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Malinau RPJMD 2021 - 2026 adalah 77%, realisasi untuk indikator kinerja Persentase penduduk berakses air minum adalah 76,83% dan capaian indikator kinerja adalah 99,77%.

Persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.14.14
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu				Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 vs Tahun			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pesentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	76,83%	78,31 %	100%	78,83 %	81,84 %	101,9 %	130%	102,6 %	106,5 %

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 adalah perbandingan realisasi Persentase penduduk berakses air minum tahun 2024 sebesar 78,31% atau realisasi capaian 101,9%, realisasi tahun 2021 sebesar 100% atau realisasi capaian 130%, realisasi tahun 2022 sebesar 78,83% atau realisasi capaian 102,6% dan realisasi tahun 2023 sebesar 81,84% atau realisasi capaian 106,5%.

Dalam upaya menilai efektivitas pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja hingga tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan. Berikut disajikan tabel yang membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.14.15
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	76,83 %	87%	88,31%

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak tahun 2024 sebesar 74,98% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 86,18%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2024 pencapaiannya sebesar 88,31% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Capaian indikator keempat yaitu persentase penduduk berakses air minum yaitu sebesar 77 persen dari target RPJMD dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami peningkatan dengan realisasi 81,84% Adapun kendala selama

pelaksanaan pekerjaan adalah Di dalam kegiatan termasuk dengan perencanaan sehingga menunggu kegiatan perencanaan selesai terlebih dahulu baru dapat melaksanakan pengadaan kegiatan fisik dan ada beberapa kegiatan yang mengajukan addendum penambahan jumlah hari kerja karena keterlambatan pengiriman material pabrikasi

Adapun Solusi perbaikan yang akan dilakukan kedepan untuk memperbaiki Tingkat persentase persentase pemukiman yang layak adalah :

- Terus berkoordinasi dengan BPBJ terkait percepatan proses pengadaan tender yang gagal
- Melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan pencapaian target baik fisik maupun keuangan.



b. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu

dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja pesentase penduduk berakses sebesar Rp.20.179.739.997, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.26.625.380.183 atau capaian realisasi keuangan sebesar 75,79%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam kriteria Kurang Efektif.

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja pesentase penduduk berakses sebesar Rp.20.179.739.997, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp.99.863.507.191 atau capaian realisasi

keuangan sebesar 20,20%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria Sangat Efisien.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.14.16
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	113,66%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	26.625.380.18 3	20.179.739.99 7	75,79%

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2024

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan capaian kinerja mencapai angka 113,66% dengan realisasi keuangan 75,79%.

PERSENTASE IRIGASI KABUPATEN YANG BERFUNGSI

Pada tabel 3.14 yang disajikan diatas yakni pada indikator kinerja Persentase irigasi kabupaten yang berfungsi yang ditetapkan di rencana

pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Malinau RPJMD 2021-2026 untuk tahun 2024 adalah 32,46% . realisasi untuk indikator kinerja Persentase irigasi kabupaten yang berfungsi adalah 75,06 % dan capaian indikator kinerja adalah 231 %.

Persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.14.17
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu				Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 vs Tahun			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi	Persen	75,06%	-	-	23,87 %	49,06%	-	-	31,80 %	65,36 %

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2020 dan 2021 tidak dapat dihitung dikarenakan indikator kinerja persentase irigasi kabupaten yang berfungsi baru dilaksanakan ditahun 2022. Capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2022 adalah perbandingan realisasi Persentase irigasi kabupaten yang berfungsi tahun 2024 sebesar 75,06% dengan realisasi tahun 2022 sebesar 23,87% atau realisasi kinerja 31,80% dan realisasi tahun 2023 sebesar 49,06% atau realisasi kinerja 65,36% maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 51,19% terhadap capaian tahun 2022 dan kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 26% terhadap capaian tahun 2023.

Dalam upaya menilai efektivitas pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja hingga tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan.

Berikut disajikan tabel yang membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.14.18
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi	Persen	75,06%	36,92%	203%

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja persentase irigasi kabupaten yang berfungsi tahun 2024 sebesar 36,92% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 36,92%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2024 pencapaiannya sebesar 203% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Prasarana Sumber Daya Air yang ada di Kabupaten Malinau pada tahun 2023 mampu meningkatkan infrastruktur irigasi sebagai dukungan ketahanan air bagi pertanian. Target Kinerja RPJMD Irigasi tahun 2023 sebesar 30,34% target realisasi mengalami kenaikan menjadi 49,06%. Adapun beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan adalah Perencanaan belum ada, sehingga dilaksanakan perencanaan di intern tim teknis terlebih dahulu, setelah itu baru dapat dilakukan pelaksanaan pengadaan fisik dan pelaksanaan galian terhambat karena curah hujan yang tinggi dan bertepatan dengan musim tanam

Adapun Solusi perbaikan yang akan dilakukan kedepan untuk memperbaiki tingkat persentase irigasi kabupaten yang berfungsi adalah Adanya penanganan jaringan irigasi pada daerah kewenangan kabupaten dengan sarana pendukung serta kebijakan penganggaran APBD yang lebih proporsional.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja persentase irigasi kabupaten yang berfungsi sebesar Rp. 21.033.836.596, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 26.617.122.157 atau capaian realisasi keuangan sebesar 79,02%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam kriteria Kurang Efektif

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tahun 2023 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja persentase irigasi kabupaten yang berfungsi sebesar Rp.21.033.836.596, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp.100.717.603.790 atau capaian realisasi keuangan sebesar 20,88%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria Sangat Efisien.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.14.19
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Pesentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi	161,70 %	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	26.617.122.15 7	21.033.836.59 6	79,02%

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2024

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan capaian kinerja mencapai angka 161,70% dengan realisasi keuangan 79,02%.

14. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisolasian Daerah

Pengukuran sasaran meningkatnya layanan teknologi informasi yang membuka keterisolasian daerah dengan indikator kinerja sasaran persentase desa yang terlayani komunikasi, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran persentase desa yang terlayani komunikasi dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.15
Evaluasi Pencapaian Sasaran 14
Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisolasian Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 %
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Pesentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi	Persen	99,05%	98,17%	100%	101,86%

Sumber : Dinas Kominfo Tahun 2024

Tahun 2024 pencapaian sasaran meningkatnya layanan teknologi informasi yang membuka keterisolasian daerah dengan indikator kinerja pesentase desa

yang terlayani telekomunikasi dengan target RPJMD tahun 2021-2026 terkhusus tahun 2024 adalah 98,17%, Realisasi 100%, sehingga capaian kinerja untuk tahun 2024 adalah 101,86%.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.15.1

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu				Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 vs Tahun			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Persentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi	Persen	100%	95,41 %	95,41 %	96,33 %	96,33 %	95,41 %	95,41 %	96,33 %	96,33 %

Sumber : Dinas Kominfo Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 adalah perbandingan realisasi Persentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2020 dan 2021 sebesar 95,41% atau realisasi capaian kinerja sebesar 95,41% dan realisasi tahun 2022 dan 2023 sebesar 96,33% atau realisasi capaian kinerja sebesar 96,33%, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 4,81.% terhadap capaian tahun 2020 dan 2021 dan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 4,81.% terhadap capaian tahun 2022 dan 2023.

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.15.2

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Pesentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi	Persen	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kominfo Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi persentase desa yang terlayani telekomunikasi tahun 2024 sebesar 100% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2024 pencapaiannya sebesar 100% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Target RPJMD tahun 2024 untuk sasaran strategis meningkatkan layanan teknologi informasi yang membuka keterisolasian daerah dengan indikator kinerja persentase desa yang terlayani komunikasi yang dengan target 98,17% dan hasil realisasinya pada tahun 2024 adalah 100% dan capaian kinerja 101,86%.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase desa yang terjangkau komunikasi yaitu:

$$\frac{\text{jumlah desa yang terjangkau komunikasi}}{\text{jumlah keseluruhan desa}} \times 100$$

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemaparan alternative solusi yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya realisasi dari target yang telah ditentukan yaitu:

1. Infrastruktur jaringan komunikasi seluler tersedia dengan baik, baik yang dikerjakan oleh pusat, provinsi maupun daerah.

2. Kondisi wilayah/desa yang sangat terpencil dengan jumlah penduduk dan juga sangat sedikit yang awalnya merupakan kendala, Tahun 2024 direalisasikan.

Disamping beberapa kendala diatas yang mempengaruhi realisasi yang tidak memenuhi target yang ditetapkan tetapi adanya keseriusan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam bekerja dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan yaitu mempercepat pembangunan prasarana dan sarana komunikasi dan informasi serta melakukan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Provider terkait.

Tabel 3.15.3

Kondisi Akses Telekomunikasi Seluler di Kabupaten Malinau

NK	ND	Desa	Sinyal Selular		Keterangan
			Kelas	Penyedia	
1	Kecamatan Mentarang				
	1	Pulau Sapi	4G	Telkomsel	
	2	Long Gafid/ Singai Terang PS	Sinyal Telkomsel dari Desa Pulau Sapi		
	3	Long Bisai/ Singai Terang PS			
	4	Temalang/ Lidung Kemenci			
	5	Long Liku/ Lidung Kemenci			
	6	Lidung Kemenci	4G	Indosat	Program 3435 PPI 2022
	7	Mentarang Baru	4G	Indosat	Program 3435 PPI 2022
	8	Paking	4G	Telkomsel	Program BTS USO BAKTI
	9	Harapan Maju	Sinyal Telkomsel dari Desa Paking		
NK	ND	Desa	Sinyal Selular		Keterangan
			Kelas	Penyedia	
2	Kecamatan Malinau Kota				
	1	Batu Lidung	4G	Telkomsel, Indosat	
	2	Malinau Kota	4G	Telkomsel, Indosat	
	3	Pelita Kanaan	4G	Telkomsel, Indosat	
	4	Malinau Hulu	4G	Telkomsel, Indosat	
	5	Malinau Hilir	4G	Telkomsel, Indosat	
	6	Tanjung Keranjang	4G	Telkomsel, Indosat	Indosat Program 3435 (Upgride 4G)

NK	ND	Desa	Sinyal Selular		Keterangan
----	----	------	----------------	--	------------



			Kelas	Penyedia	
3	Kecamatan Malinau Utara				
	1	Kaliamok	4G	Telkomsel, Indosat	
	2	Luso	Eg	Telkomsel	
	3	Malinau Seberang	4G	Telkomsel, IM3	
	4	Putat	4G	Telkomsel, Indosat	Program 3435 PPI 2022
	5	Salap	4G	Telkomsel	Kerjasama Pemda dan PT. Telkomsel
	6	Seruyung	4G	Telkomsel, Indosat	Program 3435 PPI 2022
	7	Respen Tubu	4G	Telkomsel, Indosat	
	8	Belayan	4G	Telkomsel	
	9	Sembuak Warod	4G	Telkomsel	
	10	Lubak Manis	4G	Telkomsel, Indosat	
	11	Kelapis	3G	Telkomsel	
	12	Semengaris	4G	Telkomsel, Indosat	
NK	ND	Desa	Sinyal Selular		Keterangan
			Kelas	Penyedia	
4	Kecamatan Malinau Barat				
	1	Long Bila	Sinyal Telkomsel dari Desa Setulang		
	2	Long Kenipe	4G	XL	Program 3435 PPI 2022
	3	Sentaban	4G	Indosat	Program 3435 PPI 2022
	4	Punan Bengalun	4G	Telkomsel	Program BTS USO BAKTI
			4G	Indosat	Program 3435 PPI 2022
	5	Sesua	4G	Indosat	Program 3435 PPI 2022
	6	Tanjung Lapang	4G	Telkomsel, IM3	
	7	Taras	4G	Telkomsel	
	8	Kuala Lapang	4G	Telkomsel, Indosat	Program 3435 PPI 2022 (Indosat)
	9	Sempayang	3G	Telkomsel	
NK	ND	Desa	Sinyal Selular		Keterangan
			Kelas	Penyedia	
5	Kecamatan Malinau Selatan				
	1	Bila Bekayuk	4G	Indosat	Program BTS USO BAKTI
	2	Long Loreh	4G	Telkomsel, Indosat	Program 3435 PPI 2022
	3	Langap	Sinyal Telkomsel dari Desa Long Loreh		
	4	Nunuk Tanah Kibang			
	5	Pelencau			
	6	Paya Seturan			
	7	Sengayan			
	7	Laban Nyarit	4G		Indosat
	8	Punan Rian	4G	Indosat	Program 3435 PPI 2022
NK	ND	Desa	Sinyal Selular		Keterangan
			Kelas	Penyedia	
6	Kecamatan Malinau Selatan Hilir				



	1	Setulang	4G	Telkomsel	Kerjasama Pemda. Malinau dengan PT. Telkomsel Indonesia
	2	Punan Setarap	Sinyal Telkomsel dari Desa Setarap		Program BTS USO BAKTI
	3	Setarap	2G	Telkomsel	
	4	Batu Kajang	4G	Indosat	
	5	Gong Solok	4G	Indosat	
	6	Punan Gong Solok	4G	Indosat	
	7	Long Adiu	4G	Indosat	
	8	Punan Long Adiu	4G	Indosat	
NK	ND	Desa	Sinyal Selular		
			Kelas	Penyedia	
7	Kecamatan Malinau Selatan Hulu				
	1	Long Lake	4G	Indosat	Program 3435 PPI 2022
	2	Punan Mirau	4G	Indosat	Program BTS USO BAKTI
	3	Long Rat	4G	Indosat	Program 3435 PPI 2022
	4	Halanga	4G	Indosat	Program 3435 PPI 2022
	5	Metut	4G	Indosat	Program BTS USO BAKTI Kemenkominfo RI
		Metut			Tower pemda Off
	6	Long Jalan	4G	Indosat	Program BTS USO BAKTI Kemenkominfo RI
	7	Nahakramo	4G	Indosat	Program 3435 PPI 2022
	8	Tanjung Nanga	4G	Telkomsel	Program BTS USO BAKTI Kemenkominfo RI
NK	ND	Desa	Sinyal Selular		Keterangan
			Kelas	Penyedia	
8	Kecamatan Mentarang Hulu				
	1	Lung Barang	4G	Telkomsel	Kerjasama Pemda. Malinau dengan PT. Telkomsel Indonesia
	2	Lung Fala	4G	Telkomsel	Program BTS USO BAKTI Kemenkominfo RI
	3	Lung Kebinu	4G	Indosat	
	4	Lung Mekatip	4G	Indosat	
	5	Lung Simau	4G	Indosat	
	6	Lung Sulit	4G	Indosat	
	7	Lung Semamu	4G	Indosat	
NK	ND	Desa	Sinyal Selular		
			Kelas	Penyedia	
9	Kecamatan Sungai Tubu				
	1	Long Nyau	4G	Indosat	Program BTS USO BAKTI
	2	Long Titi	4G	Indosat	
	3	Long Ranau	4G	Indosat	
	4	Rian Tubu	4G	Indosat	
	5	Long Pada	4G	Telkomsel	
			4G	Indosat	Program 3435 PPI 2022



NK	ND	Desa	Sinyal Selular		Keterangan
			Kelas	Penyedia	
10	Kecamatan Pujungan				
	1	Long Pujungan	Eg	Telkomsel	Kerjasama Pemda. Malinau dengan PT. Telkomsel Indonesia
	2	Long Lame	Sinyal Telkomsel dari Desa Long Aran		
	3	Long Ketaman	4G	Telkomsel	Program BTS USO BAKTI
	4	Long Pua	4G	Telkomsel	
	5	Long Aran	4G	Telkomsel	
	6	Long Jelet	4G	Telkomsel	
	7	Long Paliran	4G	Telkomsel	
	8	Long Bena	4G	Telkomsel	
	9	Long Belaka Pitau	4G	Telkomsel	
NK	ND	Desa	Sinyal Selular		Keterangan
			Kelas	Penyedia	
11	Kecamatan Kayan Hilir				
	1	Long Sule	2G	Telkomsel	Kerjasama Pemda. Malinau dengan PT. Telkomsel Indonesia
	2	Data Dian	Eg	Telkomsel	
		Data Dian	4G	Telkomsel	Program BTS BAKTI Kemenkominfo RI
	2	Long Pipa	4G	Telkomsel	
	4	Sungai Anai	4G	Telkomsel	Program BTS USO BAKTI Kemenkominfo RI
	5	Long Metun	4G	Telkomsel	
NK	ND	Desa	Sinyal Selular		Keterangan
			Kelas	Penyedia	
12	Kecamatan Kayan Hulu				
	1	Long Nawang	Eg	Telkomsel	Kerjasama Pemda. Malinau dengan PT. Telkomsel Indonesia
	2	Nawang Baru	4G	Telkomsel	Program BTS BAKTI Kemenkominfo RI
	3	Long Temuyat	4G	Telkomsel	
	4	Long Betaoh	4G	Telkomsel	
	5	Long Payau	4G	Telkomsel	

NK	ND	Desa	Sinyal Selular		Keterangan
			Kelas	Penyedia	
13	Kecamatan Sungai Boh				
	1	Mahak Baru	2G	Telkomsel (Swasta)	Telkomsel (Swasta)
	2	Dumu Mahak	Sinyal Telkomsel dari Desa Mahak Baru		
	3	Long Lebusan	4G	Indosat, Telkomsel	Program BTS USO BAKTI Kemenkominfo RI
	4	Long Top	4G	Indosat	
	5	Agung Baru	2G	Telkomsel	Kerjasama Pemprov. Kaltim, Pemda. Malinau dengan PT. Telkomsel Indonesia (Kondisi saat ini posisi off karena kerusakan pada catu daya).

	6	Data Baru	Sinyal Telkomsel dari Desa Mahak Baru		
NK	ND	Desa	Sinyal Selular		Keterangan
			Kelas	Penyedia	
14	Kecamatan Kayan Selatan				
	1	Long Ampung	Eg	Telkomsel (Pemda)	Kerjasama Pemda. Malinau dengan PT. Telkomsel Indonesia
		Long Ampung	4G	Telkomsel	Program BTS BAKTI Kemenkominfo RI
	2	Long Uro	4G	Indosat	
	3	Lidung Payau	4G	Telkomsel	
	4	Sungai Barang	4G	Telkomsel	
	5	Metulang	Sinyal Telkomsel dari Long Ampung		
NK	ND	Desa	Sinyal Selular		Keterangan
			Kelas	Penyedia	
15	Kecamatan Bahau Hulu				
	1	Long Alango	Eg	Telkomsel (Pemda)	Kerjasama Pemda. Malinau dengan PT. Telkomsel Indonesia
	2	Long Uli	4G	Indosat	Program BTS USO BAKTI Kemenkominfo RI
	3	Long Berini	4G	Telkomsel	
	4	Long Tebulo	4G	Indosat	
	5	Apau Ping	4G	Telkomsel	
	6	Long Kemuat	4G	Indosat	

Sumber : Dinas Kominfo Tahun 2024

b. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada

outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tahun 2024 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja pesentase desa yang terlayani telekomunikasi sebesar Rp. 6.694.765.137, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 8.347.135.520 atau capaian realisasi keuangan sebesar 80,2%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria Cukup Efektif.

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja pesentase desa yang terlayani telekomunikasi sebesar Rp. 6,694,765,137,- dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 11,920,377,022 atau capaian realisasi keuangan sebesar 56,16%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam/ dengan kriteria Sangat Efisien.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.15.4
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Layanan Teknologi Yang Membuka Keterisolasian Daerah	Pesentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi	101,86%	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	818.154.350	723.952.802	88,49%
			Program Aplikasi Informatika	7.528.981.170	5.970.812.335	79,30%

Sumber : Dinas Kominfo Tahun 2024

Dari tabel 3.15.4 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh Program Informasi Dan Komunikasi Publik dan Program Aplikasi Informatika.

Tujuan 2: Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup

15. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lahan, Air, dan Udara

Pengukuran sasaran **Meningkatnya Kualitas Lahan, Air, dan Udara** dengan indikator kinerja sasaran indeks kualitas tutupan lahan, indeks kualitas air dan indeks kualitas udara dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran indeks kualitas tutupan lahan, indeks kualitas air dan indeks kualitas udara dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.16
Evaluasi Pencapaian Sasaran 15
Meningkatnya Kualitas Lahan, Air, dan Udara

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 %
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0-100)	Poin	100%	100	100	100%
Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0-100)	Poin	116,06%	53,85	51,08	94,86%
Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0-100)	Poin	105,86%	91,47	94,34	103,18%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2024

Hasil pencapaian sasaran meningkatnya kualitas lahan, air dan udara dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0-100) dengan target RPJMD 2024 adalah 100 poin, realisasi 100 poin dan capaian 100%. Untuk indikator kinerja indeks kualitas air dengan target tahun 2024 sebesar 53,85 poin, realisasi 51,08 poin dan capain kinerja 94,86% sedangkan indikator kinerja indeks kualitas udara dengan target tahun 2024 sebesar 91,47 poin, realisasi 94,34 poin dan capaian kinerja 103,18%.

INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Adapun rumus perhitungan indeks kualitas tutupan lahan adalah :

$$IKTL = 100 - \left((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

Berdasarkan informasi dari Direktorat Kerusakan Pemulihan Lahan Akses Terbuka, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2018, diperoleh data sebagai berikut :

- Luas wilayah (LW) = 4.031.167,6569



- Luas Hutan (LH) = 3.833.081,1211
- Luas Belukar Dalam Kawasan (LBDK) = 50.712,8983
- Luas Belukar Luar Kawasan (LBLK) = 27.062,8957

Dengan menggunakan rumus perhitungan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) di atas, maka nilai IKTL Tahun 2023 adalah :

$$IKTL = 100 - \left((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

$$\text{Tutupan Lahan (TL)} = \frac{(LH + ((LBDK + LBLK) \times 0,6))}{LW}$$

$$TL = \frac{(3833081,1211 + ((50712,8983 + 27062,8957) \times 0,6))}{4031167,6569}$$

$$TL = 0,96$$

Nilai IKTL Tahun 2024 adalah :

$$IKTL = 100 - \left((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

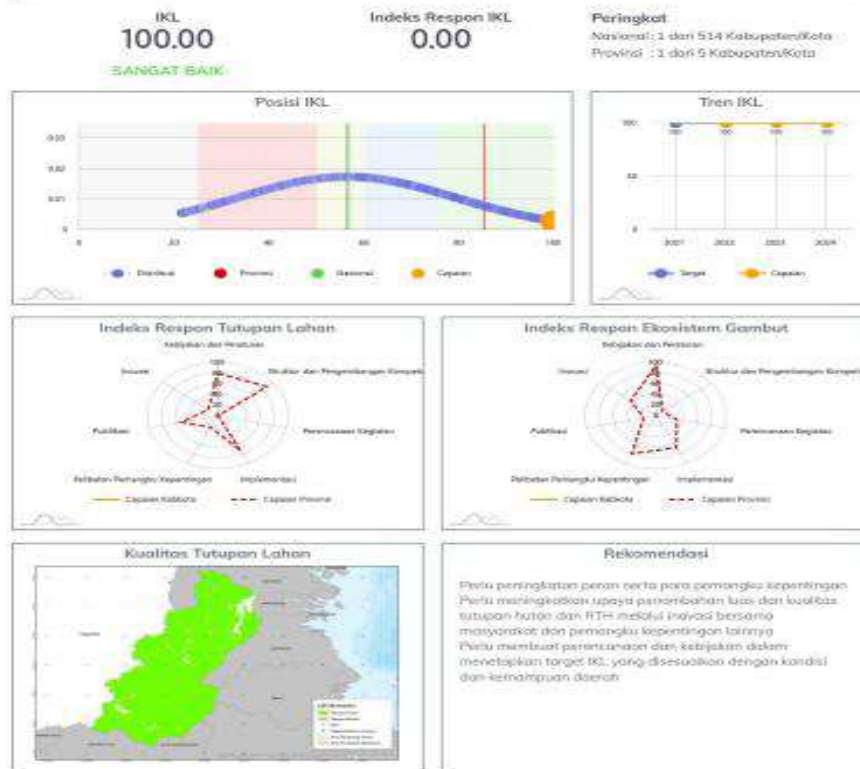
$$IKTL = 100 - \left((84,3 - (0,96 \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

$$IKTL = 110,77 \text{ atau } 100,00$$

Dari hasil perhitungan diatas, maka diperoleh nilai indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) pada tahun 2023 adalah sebesar 100,00 (poin) dari target 100,00 (poin) atau 100,00%. Dengan demikian, karena persentase capaian kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 80-100%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Baik**.



PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Malinau
Provinsi Kalimantan Utara
2024



Membandingkan capaian kinerja pada 4 tahun terakhir terhadap capaian kinerja pada Tahun 2024 dilakukan untuk mengetahui tren atas capaian kinerja untuk indikator-indikator yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan data perbandingan atas capaian kinerja Tahun 2024 terhadap tahun 2020-2023.

Tabel 3.16.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu				Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 vs Tahun			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0-100)	Poin	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2024

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 adalah perbandingan realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0-100) tahun 2024 sebesar 100 dengan realisasi tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 adalah sebesar 100 atau realisasi capaian kinerja sebesar 100 %. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan nilainya cenderung stabil dengan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100 poin dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam upaya menilai efektivitas pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja hingga tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan. Berikut disajikan tabel yang membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.16.2

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0-100)	Poin	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2024

Perbandingan realisasi kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0-100) tahun 2024 dengan realisasi 100 poin dan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2024 pencapaiannya sebesar 100% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

1. Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) terhadap target yang tersusun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang

selaras dengan RKPD Tahun 2024 sebesar 100,00 poin terealisasi sebesar 100,00 poin atau 100,00% termasuk dalam pencapaian akuntabilitas kinerja dengan kategori Sangat Baik.

Tercapainya target pada beberapa indikator komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, dan IKL/IKTL) dan Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota diatas merupakan suatu capaian yang menunjukkan keberhasilan atas berbagai upaya dan inovasi yang telah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Malinau. Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator-indikator tersebut meliputi:

➤ **Penanganan Pengaduan**

Penanganan pengaduan Tahun 2024, dapat direspon sebesar 100% tertangani. Total jumlah pengaduan di Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) pengaduan dan semua pengaduan dapat ditangani.

➤ **Penertiban atau penegakan hukum lingkungan yang dilaksanakan dapat mendorong kepada pelaku usaha/kegiatan/perusahaan untuk taat terhadap peraturan yang berlaku. Sehingga, dengan adanya kesadaran kepada pelaku usaha/kegiatan/perusahaan dapat meminimalisir pencemaran baik terhadap kualitas air maupun udara.**

2. Penyebab Kegagalan Capaian Kinerja

Walaupun tahun ini indikator kinerja indeks kualitas tutupan lahan mencapai target yang ditetapkan tetapi mengantisipasi beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi kedepan untuk pencapaian nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Berikut ini adalah beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

- Masih ada Masyarakat yang berladang berpindah-pindah.
- Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan yang menyeluruh terhadap semua kegiatan dan/atau usaha yang ada di wilayah Kabupaten Malinau, dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

3. Solusi Untuk Perbaikan Kedepan

Ada beberapa solusi yang bisa mengatasi kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian nilai indeks kualitas tutupan lahan berikut ini, antara lain:

- Melakukan monitoring dan pengawasan secara berkala pada pelaku usaha besar dan kecil.
- Mencegah Pembakaran Lahan oleh masyarakat yang bertani berpindah-pindah dengan melakukan sosialisasi.
- Reboisasi Lahan Kritis

b. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas juga menggambarkan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar Rp.16.642.837.819,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.29.914.958.148,- atau capaian realisasi keuangan sebesar 55,63%, dengan menggunakan rumusan perhitungan di atas maka Rasio Efektivitas dan Kriteria Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja untuk

indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup termasuk dalam Kriteria Tidak Efektif.

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar Rp. 16.642.837.819,- dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 16.642.837.819,- atau capaian realisasi keuangan sebesar 100,00%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan di atas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam Kriteria Kurang Efisien.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan bagi aparatur, sehingga dalam pelaksanaan perhitungan Tutupan lahan bisa lebih efisien.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.16.4
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Lahan, Air dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0-100)	100%	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	9.095.518.398	7.089.390.171	77,94%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2024

Dari tabel diatas, Program/kegiatan yang menunjang untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) tidak dapat dipisahkan, dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat menunjang pencapaian nilai IKTL. Keberhasilan capaian pada indikator ini didukung oleh Program pengelolaan keanekaragaman hayati dan Kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati serta didukung oleh Sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sub kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati dan Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati

INDEKS KUALITAS AIR

Air merupakan elemen esensial bagi kehidupan, berperan penting dalam menjaga kesehatan manusia serta keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Ketersediaan air yang layak menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, kualitas air merupakan indikator penting dalam penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang berfungsi untuk menggambarkan kondisi lingkungan.

Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menilai kualitas air dengan memberikan gambaran mengenai kondisi perairan dalam suatu periode tertentu. Perhitungan IKA dilakukan dengan membandingkan parameter kualitas air terhadap baku mutu yang berlaku, sehingga dapat mengidentifikasi tingkat pencemaran atau kelayakan air untuk berbagai kebutuhan.

Untuk Tahun 2024, Pelaksanaan Pemantauan air permukaan pada 8 titik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau sebanyak (penentuan titik pantau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Nomor : 39 TAHUN 2021 Tentang Penetapan Titik Pantau Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Untuk Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2021.

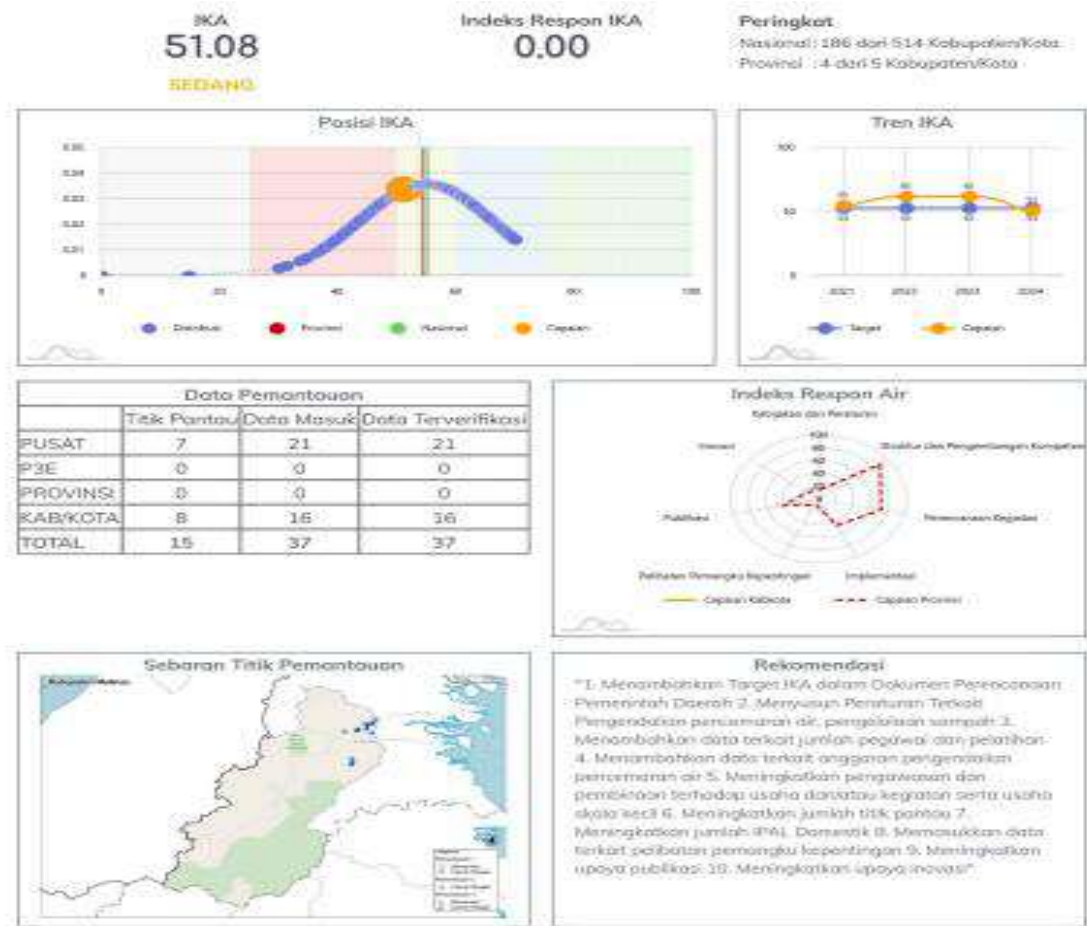
Berikut ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung Indeks Pencemaran.

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})^2 M + (C_i / L_{ij})^2 A}{2}}$$

Metode perhitungan air permukaan menggunakan perhitungan Indeks Pencemaran lebih diperketat lagi berdasarkan surat dari KLHK No. S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 dengan jumlah 8 parameter uji (pH,TSS,DO,BOD,COD,NO3-N,Fecal Coli,Total Phospat) tetapi pada tahun 2024 menggunakan Metode perhitungan PerMen LHK nomor 27 Tahun 2021 dengan Aplikasi IKLH. Berdasarkan realisasi capaian Kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) diketahui bahwa target kinerja tidak tercapai, berdasarkan indeks hasil perhitungan Indeks Pencemaran air dari 8 titik (delapan) sampel pemantauan, 8 (delapan) titik cemar ringan. Pengujian kualitas air pada 8 titik pantau air sungai yaitu (1) Malinau Desa Lidung Kemenci, (2) Semenderut Jembatan Besi Desa Salap, (3) Ran Pos Pantau MA, (4) Mentarang Desa Paking, (5) Mentarang Desa Pulau Sapi RT.4, (6) Sembuak Jembatan Desa Luso, (7) Bengalun Jembatan Besi Desa Sesua, (8) Bengalun Jetty PT. BDMS.

Tabel
Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Air

Mutu Air	Jumlah Titik Sampel yang memenuhi Mutu Air	Prosentase Pemenuhan Mutu Air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks Permutu Air
Memenuhi	2	5%	70	3,78
Cemar Ringan	35	95%	50	47,30
Cemar Sedang	0	0%	30	0,00
Cemar Berat	0	0%	10	0,00
Total	37	100%		51,08
Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)				51,08



Persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.16.5
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu				Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 vs Tahun			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0-100)	Poin	51,08	50	50	62,38	62,38	97,88 %	97,88 %	122%	122%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2024

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2020, 2021 dan 2022 merupakan perbandingan realisasi Indeks Kualitas Air

(Nilai Angka 0-100) 2024 sebesar 51,08 poin dengan realisasi tahun 2020 dan 2021 sebesar 50 poin atau realisasi capaian kinerja sebesar 97,88%, dan realisasi kinerja tahun 2022 dan 2023 sebesar 62,38 poin atau capaian kinerja 1122%.

Dalam upaya menilai efektivitas pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja hingga tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan.

Berikut disajikan tabel yang membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut:

:

Tabel 3.16.6

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0-100)	Poin	51,08	54,05	94,50%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2024

Pada tabel 3.15.6 di atas, target akhir RPJMD dengan indikator indeks kualitas air (IKA) adalah 54,05 poin. Nilai target Indeks Kualitas Air (IKA) di wilayah kabupaten/kota pada Tahun 2024 dengan realisasi 62,38 poin. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai persentase capaian terhadap target RPJMD akhir tahun sebesar 115,41%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan Sangat Baik.

Tabel 3.16.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Regional Provinsi	Standar Nasional	Capaian Kinerja (%)	
						Provinsi	Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Lahan, Air dan Udara	Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0-100)	Poin	51,08	54,31	54,78	94,05%	93,24%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2024



Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan regional provinsi tahun 2024 adalah perbandingan realisasi Indeks Kualitas Air tahun 2024 sebesar 51,08 poin dengan realisasi regional provinsi tahun 2024 sebesar 54,31 poin, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2024 sebesar 94,05% terhadap regional provinsi tahun 2024. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian target indikator kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau untuk Indeks Kualitas Air (IKA) tidak mencapai Realisasi regional Provinsi dengan capaian sebagaimana tersebut di atas. Hal ini dapat dikatakan bahwa pencapaian kinerja Indeks Kualitas Air, berada pada kategori **Baik**.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Realisasi Nasional tahun 2024 adalah perbandingan realisasi Indeks Kualitas Air tahun 2024 sebesar 51,08 poin dengan realisasi Nasional tahun 2024 sebesar 54,78 poin, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2024 sebesar 93,25% terhadap realisasi Nasional tahun 2024. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian target indikator kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau untuk Indeks Kualitas Air (IKA) tidak mencapai Realisasi Nasional dengan capaian sebagaimana tersebut di atas. Hal ini dapat dikatakan bahwa pencapaian kinerja Indeks Kualitas Air, berada pada kategori **Baik**.

Adapun beberapa hal yang mempengaruhi status mutu air di Kabupaten Malinau antara lain :

- a) Belum maksimalnya pengolahan air limbah oleh Usaha pertambangan yang berada di Kabupaten Malinau.
- b) Pola Hidup Masyarakat di bantaran sungai yang masih banyak aktivitas manusia yang menghasilkan limbah domestik. Belum maksimal pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik baik individu maupun Terpadu di Wilayah Perkotaan maupun perdesaan.
- c) Industrialisasi dan aktivitas manusia yang semakin berkembang dan belum adanya pengelohan air limbah dari usaha kecil
- d) Intensitas kegiatan pembangunan yang semakin meningkat dan tingginya intensitas hujan di Hulu sehingga kekeruhah tinggi.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Capaian kinerja pada indikator Indeks Kualitas Air (IKA) terhadap target yang tersusun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang selaras dengan RKPD Tahun 2024 sebesar 53,85 poin terealisasi sebesar 51,08 poin atau 94,86% termasuk dalam pencapaian akuntabilitas kinerja dengan kategori **Baik**.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator-indikator tersebut adalah dengan cara Melakukan **Pemantauan Kualitas Air**.

Sebagai dasar untuk penyediaan data kualitas air yang akan digunakan untuk penghitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yang merupakan komponen dalam penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup setiap tahun melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas air sesuai petunjuk teknis pemantauan yang tercantum dalam peraturan perundangan-undangan yaitu:

- Pemantauan dilaksanakan pada 8 (delapan) titik pantau yang secara umum terdiri dari sungai dan anak-anak sungai yang ada di wilayah Kabupaten Malinau yang menjadi prioritas dengan berbagai pertimbangan diantaranya Sungai dan anak-anak sungai Malinau, sungai yang mengalir dari wilayah administrasi lain, sungai yang menjadi badan air pembuangan limbah usaha/kegiatan, serta sungai yang menjadi prioritas untuk kegiatan pengendalian pencemaran air lainnya. Kedelapan titik sampel yang diambil untuk dilakukan pengujian meliputi: (1) Malinau Desa Lidung Kemenci, (2) Semenderut Jembatan Besi Desa Salap, (3) Ran Pos Pantau MA, (4) Mentarang Desa Paking, (5) Mentarang Desa Pulau Sapi RT.4, (6) Sembuak Jembatan Desa Luso, (7) Bengalun Jembatan Besi Desa Sesua, (8) Bengalun Jetty PT. BDMS.
- Kegiatan pemantauan hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun dan diharapkan dapat mewakili kondisi musim penghujan, musim peralihan dan musim kemarau. Hal ini lebih sedikit (kurang) dari periode pemantauan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu 2 (dua) kali dalam setahun.



- Kegiatan pengujian kualitas air dilaksanakan bekerja sama dengan Laboratorium yang telah terakreditasi yang dalam hal ini dilakukan oleh Laboratorium Balai Riset & Standardisasi Industri (Baristand Industri) Samarinda yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang berlokasi di Jl. M.T. Haryono, Jl. Banggeris Nomor 1 Samarinda, Kalimantan Timur.

Diharapkan melalui kegiatan pemantauan kualitas air ini didapatkan data kualitas air yang valid yang akan digunakan sebagai basis data penghitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA).

Pada Tahun 2024, DLH melaksanakan penghitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sesuai dengan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh KLHK terkait penghitungan Nilai IKLH, dengan beberapa pertimbangan teknis lainnya. Pertimbangan teknis lainnya yang dimaksud adalah terkait dengan jumlah titik lokasi yang digunakan untuk penghitungan nilai IKA. Jumlah titik lokasi yang digunakan sebagai dasar penghitungan IKA adalah 8 (delapan) titik pantau lokasi yang dipantau dengan kriteria sebagai berikut:

- ✓ Sungai Malinau yang terletak di wilayah hulu dan hilir yang berdampak akibat adanya kegiatan usaha dan/atau kegiatan.
- ✓ Sungai yang sumber airnya berada di wilayah Kabupaten Malinau dan melintas hanya di wilayah Kabupaten Malinau.

Dalam hal ini, anak-anak sungai yang mengalir dari wilayah administrasi lain dan berbatasan dengan Kabupaten Malinau tidak diikutkan dalam penghitungan IKA. Hal ini dilakukan agar nilai IKA yang didapatkan dapat merepresentasikan kondisi kualitas air di wilayah Kabupaten Malinau dan tidak dipengaruhi oleh kondisi kualitas air dari sungai di wilayah administrasi lain yang secara langsung tidak dapat dikontrol kualitasnya oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Data Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2024 (data terlampir).

Ada beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian nilai Indeks Kualitas Air antara lain:

- Belum maksimalnya pengolahan air limbah oleh Usaha pertambangan yang berada di Kabupaten Malinau;



- Pola Hidup Masyarakat di bantaran sungai yang masih banyak aktivitas manusia yang menghasilkan limbah domestik;
- Belum maksimalnya pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik baik individu maupun Terpadu di Wilayah Perkotaan maupun perdesaan;
- Industrialisasi dan aktivitas manusia yang semakin berkembang dan belum adanya pengolahan air limbah dari usaha kecil;
- Intensitas kegiatan pembangunan yang semakin meningkat dan tingginya intensitas hujan di Hulu sehingga kekeruhan tinggi;
- Minimnya sumber daya aparatur yang cakap, profesional dan terakreditasi untuk melakukan pengambilan sampel dan uji air sehingga hal ini masih diantisipasi dengan melakukan kerjasama dengan Baristand Samarinda untuk melakukan uji dan pengambilan sampel air;
- Belum optimalnya pengelolaan UPTD laboratorium lingkungan sehingga sampai saat ini laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau belum dapat berjalan dengan baik.

Ada beberapa solusi untuk menjawab kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian nilai Indeks Kualitas Air antara lain:

- Memperketat pengawasan bagi usaha pertambangan dalam pengolahan air limbah;
- Sosialisasi kepada masyarakat yang masih melakukan aktivitas di bantaran sungai;
- Memaksimalkan pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik baik individu maupun Terpadu di Wilayah Perkotaan maupun perdesaan;
- Peningkatan Kapasitas bagi ASN Dinas Lingkungan Hidup;
- Pengadaan alat-alat Laboratorium lingkungan hidup;
- Laboratorium yang terakreditasi dan terregistrasi.

b. Analisis Atas Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.

2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas juga menggambarkan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator Indeks Kualitas Air sebesar Rp. 1.193.536.828,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.310.861.550,- atau capaian realisasi keuangan sebesar 91,05%, dengan menggunakan rumusan perhitungan di atas maka Rasio Efektivitas dan Kriteria Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja untuk indikator kinerja Indeks Kualitas Air termasuk dalam Kriteria Efektif.

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja Indeks Kualitas Air sebesar Rp. 1.193.536.828,- dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 1.193.536.828,- atau capaian realisasi keuangan sebesar 100%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan di atas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam Kriteria Kurang Efisien.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.16.9
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Lahan, Air dan Udara	Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0-100)	116,06%	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	778.135.800	688.534.988	88,48 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2024

Dari tabel 3.16.9 di atas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program dan program – program tersebut didukung oleh sub kegiatan yang memiliki anggaran cukup memadai. Hasil capaian kinerja dan realisasi capaian keuangan pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa

program yang mendukung indikator kinerja berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Pada tahun 2024 capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Air dengan rata-rata realisasi keuangan 94,14%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut di atas adalah Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) serta sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut, Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan Melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, Verifikasi lapangan Untuk memastikan pemenuhan persyaratan Administrasi dan teknis penyimpanan Limbah B3, Fasilitas Pemenuhan Komitmen izin Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan Melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dan Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan / atau Penimbunan.

Dokumentasi

 Pendampingan Pengambilan sampel air Sungai Malinau di wilayah Kecamatan Malinau Kota	 Pendampingan Pengambilan sampel air Sungai Malinau di wilayah Kecamatan Malinau Kota
	 Kegiatan Pengelolaan lab. Lingkungan hidup Sampling di beberapa titik DAS 20 28 Jun 2024 08:48:10 Pemantauan dan Sampling/Pengambilan sampel air

Pendampingan Pengambilan sampel biota air di Sembuak Desa Luso  Pemantauan dan Sampling/Pengambilan sampel air Sungai Malinau di wilayah Kecamatan Malinau Kota	Sungai Malinau di wilayah Kecamatan Malinau Kota  Pemantauan dan Sampling/Pengambilan sampel air Sungai Malinau di wilayah Kecamatan Malinau Kota
 Pemantauan dan Sampling/Pengambilan sampel air Sungai Malinau di Desa Lidung Kemenci	 Pemantauan dan Sampling/Pengambilan sampel air Sungai Mentarang di wilayah Desa Pulau Sapi
 Pemantauan dan Sampling/Pengambilan sampel air Sungai Mentarang di wilayah Desa Pulau Sapi	 Pendampingan Pengambilan sampel dan pengujian air di wilayah Kecamatan Malinau Selatan
 Pendampingan Pengambilan sampel biota air Sungai Malinau di Kecamatan Malinau Kota	 Pendampingan Pengambilan sampel dan pengujian air di wilayah Kecamatan Malinau Selatan



Pendampingan Pengambilan sampel dan pengujian air di wilayah Kecamatan Malinau Selatan



Pendampingan Pengambilan sampel dan pengujian air di wilayah Kecamatan Malinau Selatan



Pendampingan Pengambilan sampel dan pengujian air di wilayah Kecamatan Malinau Selatan



Pendampingan Pengambilan sampel dan pengujian air di wilayah Kecamatan Malinau Selatan

INDEKS KUALITAS UDARA

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah indikator yang mencerminkan tingkat kualitas udara berdasarkan nilai gabungan dari berbagai parameter yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penurunan kualitas udara di wilayah perkotaan telah menjadi perhatian serius, mengingat dampak pencemaran udara yang sangat berbahaya bagi manusia, makhluk hidup lainnya, dan lingkungan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), diperkirakan setidaknya ada 7 juta kematian dini setiap tahunnya akibat paparan polusi udara (WHO, 2023).

Paparan polusi udara, baik di dalam maupun di luar ruangan, telah dikaitkan dengan berbagai penyakit kardiovaskular seperti stroke dan penyakit jantung iskemik, serta kanker. Selain itu, polusi udara juga berpotensi memicu perkembangan penyakit pernapasan, seperti infeksi saluran pernapasan akut dan penyakit paru obstruktif kronis.

Indeks Kualitas Udara dihitung mengacu pada metode Common Air Quality Index (CAQI). Metode CAQI menggunakan kesehatan sebagai pertimbangan utama dalam menentukan kategori. Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama, yakni oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂) dan

nitrogen dioksida (NO₂). Namun merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Dalam proses kalkulasinya, digunakan pendekatan dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar European Union (EU) Directives. Standar kualitas udara EU Directives saat ini masih diperhitungkan sebagai dasar penentuan baku mutu oleh World Health Organisation (WHO). Terdapat pembagian tiga klasifikasi nilai indeks dengan detail yang dapat dilihat pada Tabel a dan Tabel b.

Tabel Standar Kualitas Udara Berdasarkan EU Directives

Kualitas Udara	Nilai Indeks (IEU)
Melebihi baku mutu EU oleh satu atau lebih parameter polutan	>1
Memenuhi rata-rata Standar EU	1
Kondisi lebih baik dari rata-rata persyaratan normal	≤ 1

Tabel Baku Mutu Penentuan Kualitas Udara Menurut EU Directives

Polutan	Baku Mutu EU Directives
NO ₂	Nilai tahunan 40 µg/m ³
SO ₂	Nilai tahunan 20 µg/m ³

Selanjutnya, indeks udara model EU (IEU) dikonversikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU) melalui persamaan sebagai berikut:

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{EU} - 0,1) \right)$$

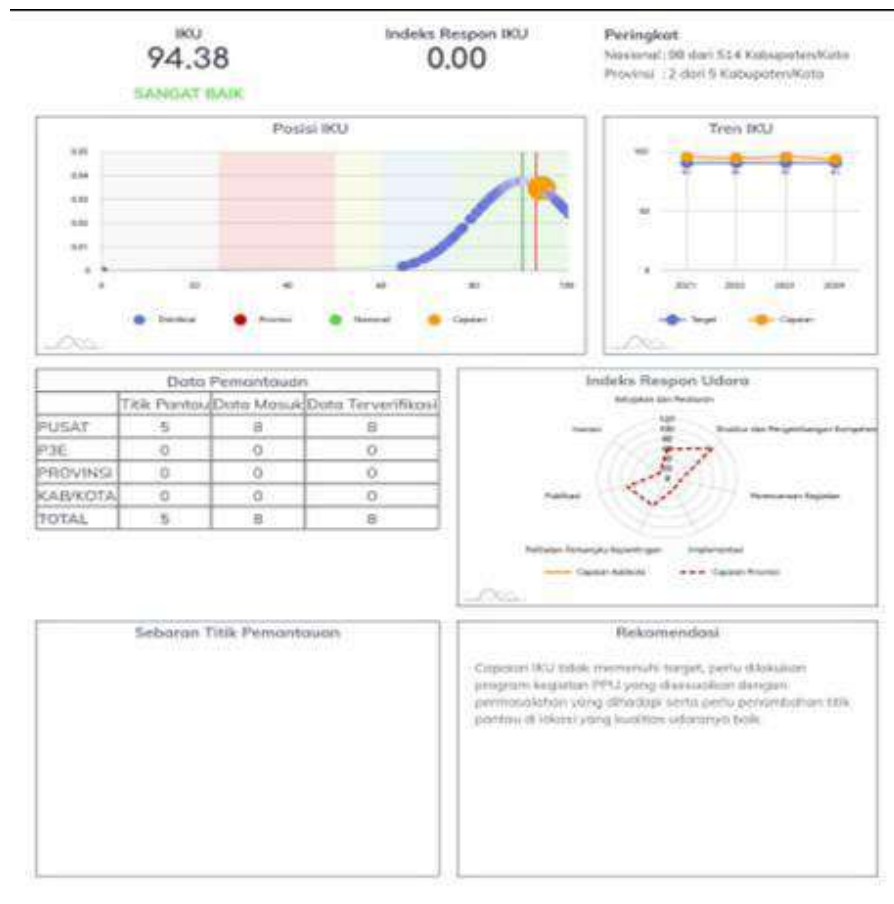
Sedangkan untuk nilai *I_{EU}* didapat dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} - I_{EU} \text{ NO}_2 &= \frac{\text{NO}_2 \text{ rata - rata}}{40} \\ - I_{EU} \text{ SO}_2 &= \frac{\text{SO}_2 \text{ rata - rata}}{20} \\ - I_{EU} &= \frac{I_{EU} \text{ NO}_2 + I_{EU} \text{ SO}_2}{2} \end{aligned}$$

Berdasarkan Lokasi yang telah ditentukan titik pantauanya pada Tahun 2024, Kabupaten Malinau telah melakukan Pemantauan Kualitas Udara menggunakan metode *Manual Passive Sampler*, yaitu dengan memasang alat pemantau dengan durasi pemantauan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun (untuk mewakili musim kemarau dan musim hujan) dengan durasi pemantauan 14 (Empat belas) hari pada musim kemarau dan 14 (Empat Belas) hari pada musim hujan atau selama 28 hari dalam setahun. Adapun titik pantau yang dilakukan di 2024 antara lain: a). Bandara RA Besing (Transportasi), b). SD Kelapis (industry), c). Taman Jojok (pemukiman), d). Kantor Bupati Malinau (Perkantoran) dan menghasilkan NO₂ rata-rata 4,586 dan SO₂ rata-rata 5,128 sehingga perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara adalah:

$$\begin{aligned} I_{EU} \text{ NO}_2 &= \frac{\text{NO}_2 \text{ rata-rata}}{40} & I_{EU} \text{ SO}_2 &= \frac{\text{SO}_2 \text{ rata-rata}}{20} \\ &= \frac{4,586}{40} & &= \frac{5,128}{20} \\ &= 0,11 & &= 0,26 \\ I_{EU} &= \frac{I_{EU} \text{ NO}_2 + I_{EU} \text{ SO}_2}{2} \\ &= \frac{0,115 + 0,256}{2} \\ &= 0,19 \\ IKU &= 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right) \\ &= 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (0,19 - 0,1) \right) \\ &= \mathbf{94,38} \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka diperoleh nilai indeks kualitas udara (IKU) pada tahun 2024 adalah sebesar 94,38 (poin) dari target 91,47 (poin) atau 103,18%. Dengan demikian, karena persentase capaian kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) >100, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Sangat Baik**.



Membandingkan persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.16.10
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu				Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 vs Tahun			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0-100)	Poin	94,38	93,98	96,21	95,20	96,71	99,57 %	101,9 %	100,8 %	102,4 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2024

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 adalah perbandingan realisasi Indeks Kualitas

Udara (Nilai Angka 0-100) tahun 2024 sebesar 94,38 poin dengan realisasi tahun 2020 sebesar 93,98 poin atau realisasi capaian kinerja sebesar 99,57%, realisasi tahun 2021 sebesar 96,21 poin atau realisasi capaian kinerja sebesar 101,9%, realisasi tahun 2022 sebesar 95,20 poin atau realisasi capaian 100,8% dan realisasi tahun 2023 sebesar 96,71 poin atau realisasi capaian 102,4%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 0,4% terhadap capaian tahun 2020, adanya penurunan capaian kinerja tahun 2024 sebesar -1,9% terhadap capaian tahun 2021 dan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2024 sebesar -0,9% terhadap capaian tahun 2022 dan penurunan capaian kinerja tahun 2024 sebesar -2,4% terhadap capaian tahun 2023.

Dalam upaya menilai efektivitas pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja hingga tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan. Berikut disajikan tabel yang membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.16.11
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0-100)	Poin	94,38	91,68	102,9%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2024

Perbandingan realisasi kinerja Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0-100) tahun 2024 sebesar 94,38 poin dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 91,68 poin, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2024 pencapaiannya sebesar 102,9% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026 maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan Sangat Baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk

indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) telah tercapai atau bahkan melebihi target RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Berdasarkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.16.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Regional Provinsi	Standar Nasional	Capaian Kinerja (%)	
						Provinsi	Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Lahan, Air dan Udara	Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0-100)	poin	94,38	92,99	90,13	101,49 %	104,71 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2024

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019- 2024 terdapat indikator komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Pengelolaan sampah. Adapun Realisasi nasional yang dicapai oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Tahun 2024 untuk Indeks Kualitas Udara sebesar 90,13 poin atau 104,71% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 94,38 poin. Sehingga dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian target indikator kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau telah mencapai atau bahkan melebihi realisasi nasional dengan capaian sebagaimana tersebut di atas. Hal ini dapat dikatakan bahwa pencapaian kinerja Indeks Kualitas Udara berada pada kategori Sangat Baik.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Capaian kinerja pada indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) terhadap target yang tersusun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang selaras dengan RKPD Tahun 2024 sebesar 91,47 poin terealisasi sebesar 94,38 poin atau 103,18% termasuk dalam pencapaian akuntabilitas kinerja dengan kategori **Sangat Baik**.

Tercapainya target pada beberapa indikator komponen Indeks Kualitas Udara merupakan suatu capaian yang menunjukkan keberhasilan atas

berbagai upaya dan inovasi yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup. Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator-indikator tersebut meliputi:

- **Pemantauan Kualitas Udara**

Pemantauan mutu udara ambien merupakan salah satu upaya untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan program pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hasil pemantauan mutu udara ambien dapat dijadikan indikator untuk menentukan prioritas program pengendalian pencemaran udara yang perlu dilakukan. Saat ini, metode pemantauan mutu udara ambien yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara yaitu melalui metode otomatis kontinyu (AQMS) dan manual (*passive sampler*).

Menurut SOP Pelaksanaan Pemantauan SO₂ dan NO₂ di udara ambien Tahun 2011, metode *passive sampler* adalah suatu metode yang menggunakan sistem penyerapan gas secara difusi melalui media yang dipaparkan dalam waktu tertentu tanpa menggunakan pompa penghisap dengan memanfaatkan sifat fisis gas yang berdifusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah.

Data kualitas udara merupakan data hasil pengukuran langsung yang mewakili (1) area padat kendaraan (transportasi), (2) area pemukiman, (3) area perkantoran dan (4) area industri pada 427 Kabupaten/Kota yang ada di 34 Provinsi. Pemilihan 4 lokasi yang mewakili 4 jenis aktivitas pada setiap Kabupaten/Kota tidak boleh berada dalam 1 lokasi yang sama, namun minimal berjarak 1 (satu) kilometer dari titik satu ke titik lainnya.

Pemilihan 4 lokasi tersebut adalah:

- a) Transportasi

Lokasi di daerah transportasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh dampak emisi gas buang yang keluar dari kendaraan bermotor terhadap kualitas udara di sekitar jalan raya yang dilakukan pemantauan kualitas udaranya. Jarak titik pengambilan sampel kurang lebih 5 – 10 meter dari bahu jalan.

- b) Pemukiman

Lokasi di daerah pemukiman dipilih untuk mengetahui tingkat pencemaran udara yang diakibatkan oleh adanya emisi gas buang yang keluar dari kegiatan di sekitar pemukiman padat.

c) Perkantoran/pasar/komersil

Lokasi di daerah perkantoran/pasar/komersil adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran/pasar/komersil akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada di sekitar lokasi atau kawasan padat perkantoran/pasar/komersil.

d) Perkantoran/pasar/komersial

Lokasi di daerah perkantoran/pasar/komersil adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran/komersil akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada di sekitar lokasi atau kawasan padat perkantoran/pasar/komersil.

Pengukuran dilakukan secara otomatis dan atau manual dengan kriteria kualitas udara ambien rata-rata tahunan. Parameter yang dipantau adalah NO₂ dan SO₂ dengan durasi pemantauan dalam setahun adalah sebagai berikut:

- a) Passive sampler: minimal 28 hari per tahun (7 hari x 4 kali atau 14 hari x 2 kali);
- b) Manual aktif: minimal 24 hari per tahun (2 kali per bulan @24 jam);
- c) AQMS fixed station: minimal 65% data (238 data harian per tahun);
- d) AQMS mobile station: minimal 20 data harian per bulan (240 data harian per tahun).

- **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan**

Efektifnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan berupa perusahaan tambang batubara, berpengaruh terhadap nilai IKU. jika perusahaan penghasil emisi sumber tidak bergerak melakukan pengelolaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dapat meminimalisir pencemaran pada udara.

- **Penanganan Pengaduan**

Penanganan pengaduan Tahun 2024, dapat direspon sebesar 100% tertangani. Total jumlah pengaduan di Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) pengaduan dan semua pengaduan dapat ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup.

- **Penegakan Hukum**

Penertiban atau penegakan hukum lingkungan yang dilaksanakan dapat mendorong kepada pelaku usaha/kegiatan/perusahaan untuk taat terhadap peraturan yang berlaku. Sehingga, dengan adanya kesadaran kepada pelaku

usaha/kegiatan/perusahaan dapat meminimalisir pencemaran baik terhadap kualitas udara.

Selain upaya yang telah dipaparkan di atas, Dinas Lingkungan Hidup melakukan inovasi-inovasi yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan Kualitas air dan Udara. Salah satu inovasi yang dilakukan salah satunya adalah pembentukan Satgas Pengawas Pos Pantau yang ditempatkan di titik-titik sungai yang berdekatan dengan aktivitas perusahaan atau pertambangan batubara. Satgas ini terdiri dari 15 orang yang bertugas melakukan pemantauan secara rutin terhadap aktivitas pengelolaan limbah cair perusahaan tambang batubara agar sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan limbah batubara yang tertuang dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian nilai Indeks Kualitas Udara antara lain:

- Minimnya sumber daya aparatur yang cakap, profesional dan terakreditasi untuk melakukan pengambilan sampel dan uji Udara sehingga hal ini masih diantisipasi dengan melakukan kerjasama dengan Baristand Samarinda untuk melakukan uji dan pengambilan sampel Udara.
- Belum optimalnya pengelolaan UPTD laboratorium lingkungan sehingga sampai saat ini laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau belum dapat berjalan dengan baik.

Ada beberapa solusi untuk mengatasi kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian nilai Indeks Kualitas Udara antara lain:

- Melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan untuk mengambil sampel uji udara sehingga diperoleh data kualitas udara setiap tahunnya;
- Peningkatan Kapasitas bagi ASN Dinas Lingkungan Hidup;
- Pengadaan alat-alat Laboratorium lingkungan hidup;
- Laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi.

b. Analisis Atas Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas juga menggambarkan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator Indeks Kualitas Udara sebesar Rp. 1.995.230.050,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.2.086.214.072,- atau capaian realisasi keuangan sebesar 95,64%, dengan menggunakan rumusan perhitungan di atas maka Rasio Efektivitas dan Kriteria Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja untuk indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Udara termasuk dalam Kriteria Efektif.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja Indeks Kualitas Udara sebesar Rp. 1.995.230.050,- dari realisasi

anggaran belanja sebesar Rp. 1.995.230.050,- atau capaian realisasi keuangan sebesar 100,00%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan di atas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam Kriteria Kurang Efisien.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.16.13
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Lahan, Air dan Udara	Indeks Kualitas Udara	103,18%	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.086.214.072	1.995.230.050	95,63%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2024

Dari tabel 3.9 di atas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja didukung oleh program dan program – program tersebut didukung oleh sub kegiatan yang memiliki anggaran cukup memadai. Hasil capaian kinerja dan realisasi capaian keuangan pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa program yang mendukung indikator kinerja berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Pada tahun 2024 capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Udara dengan rata-rata realisasi keuangan 95,64%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut di atas adalah Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas

Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pengelola Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/kota, Pemberian Informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat.



Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Tujuan 1: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik (Good Governance)

16. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Pengukuran Tujuan Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik (*Good Governance*) secara luas melalui Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan Indikator kinerja sasaran Nilai SAKIP dan Nilai LPPD, Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran nilai SAKIP dan nilai LPPD dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.17
Evaluasi Pencapaian Sasaran 16
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 %
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	$6 = 5/4 \times 100$
Nilai SAKIP	Nilai	92,46%	69,15	70,12	101,40%
Nilai LPPD	Nilai	-	2.960	-	-%

Sumber : Bagian Organisasi dan Tapem Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2024

NILAI SAKIP

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi AKIP tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, bahwa Pemerintah Kabupaten Malinau memperoleh nilai SAKIP tahun 2024 adalah 70,12 dengan predikat BB.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.17.1

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu				Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 vs Tahun			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nilai SAKIP	Nilai	70,12	56,32	57,14	60,02	62,04	80,31 %	81,53 %	85,95 %	88,47 %

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 adalah perbandingan realisasi Nilai SAKIP tahun 2024 sebesar 70,12 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 56,32 atau realisasi capaian kinerja sebesar 80,31%, realisasi tahun 2021 sebesar 57,14 atau realisasi capaian kinerja sebesar 81,53%, realisasi tahun 2022 sebesar 60,02 atau realisasi capaian kinerja sebesar 85,95% dan realisasi tahun 2023 sebesar 62,04 atau realisasi capaian kinerja sebesar 88,47%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 24,50% terhadap capaian kinerja tahun 2020, kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 22,71% terhadap capaian capaian tahun 2021, kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 16,82 terhadap capaian kinerja 2022 dan kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 13,02 terhadap capaian kinerja 2023.

Dalam upaya menilai efektivitas pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja hingga tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan. Berikut disajikan tabel yang membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.17.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Nilai SAKIP	Nilai	70,12	75,25	93,18%

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja Nilai SAKIP tahun 2024 sebesar 70,12 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 75,25, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2024 persentase capaian nilai SAKIP meningkat sebesar 93,18% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan tujuan mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau menunjukkan bahwa nilai sebesar 70,12 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “sangat Baik” yaitu implementasi SAKIP sudah sangat

baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi pengguna anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi

Tabel
Capaian Kinerja SAKIP Kabupaten Malinau Tahun 2024

KOMPONEN YANG DI NILAI	BOBOT	NILAI 2024
A. Perencanaan Kinerja	30%	26,09
B. Pengukuran Kinerja	30%	18,48
C. Pelaporan Kinerja	15%	11,31
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	14,24
Nilai Hasil Evaluasi	100%	70,12
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Sumber :Kemipan RB Tahun 2024

Tahun 2024 penilaian evaluasi SAKIP Kabupaten Malinau mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun beberapa hal yang mempengaruhi peningkatan atau pencapaian nilai SAKIP 2024 yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Pemerintah kabupaten Malinau telah berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan pohon kinerja dari level Kabupaten sampai Perangkat Daerah sesuai dengan isu strategi. Pohon kinerja telah diinput di e-SAKIP Kabupaten Malinau dan sudah ada langkah dalam memanfaatkan pohon kinerja untuk diterjemahkan dalam PK tahun 2024.

2. Pengukuran kinerja

Pemerintah Kabupaten Malinau telah memiliki dokumen IKU periode 2021-2026 level Kabupaten dan PD yang dilengkapi dengan detail deskripsi atau definisi operasional, sumber data, cara menghitung dan PD penanggung jawab serta telah diunggah pada *esr.menpan.go.id* dan aplikasi e-SAKIP Kabupaten Malinau sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Selain itu, juga telah disusun rencana aksi PD yang digunakan sebagai dasar monitoring dan evaluasi progres kerja dimana pengukuran progres capaian tersebut menggunakan aplikasi E-Sakip Kabupaten malinau.

3. Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Malinau telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023 tingkat kabupaten dan PD. Laporan tersebut telah diunggah pada *esr.menpan.go.id* dengan tepat waktu. Selain itu sebagai bentuk keterbukaan informasi publik laporan kinerja juga diunggah dalam aplikasi e-sakip Kabupaten Malinau. Adapun peningkatan kualitas laporan kinerja dilakukan pendampingan penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah.

4. Evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal

Pemerintah Kabupaten Malinau telah melakukan evaluasi AKIP internal pada seluruh PD. Sudah dilakukan upaya peningkatan kualitas temuan dan rekomendasi dari evaluasi yang membahas kualitas dari implementasi AKIP di PD yang dievaluasi.

Walaupun tahun 2024 nilai SAKIP kabupaten Malinau mengalami peningkatan tetapi masih terdapat beberapa rekomendasi untuk solusi perbaikan penyusunan SAKIP kedepan yaitu:

1. Memastikan kinerja pada level taktikal sampai ke operasional agar sepenuhnya mengawal kondisi kinerja di atasnya.
2. Menyempurnakan crosscutting kinerja lintas PD yang sudah disusun dengan berfokus pada identifikasi setiap keterlibatan PD yang ada untuk mengawal lintas sektoral, baik yang bersifat makro maupun yang menjadi isu strategis.
3. Memastikan pohon kinerja penanganan kemiskinan yang disusun menggambarkan sebab akibat.
4. Melakukan pengecekan atas seluruh target pengukuran kinerja dan memsatkan target kinerja ada pada dokumen PK.

b. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu

dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai SAKIP sebesar Rp. 777.368.734 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 777.368.734 atau capaian realisasi keuangan sebesar 100%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria Kurang Efektif

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan pelatihan penyusunan dokumen SAKIP kepada setiap kasubbag penyusunan program dan staf Perangkat Daerah baik melalui studi belajar ke kabupaten lain yang memiliki nilai SAKIP lebih tinggi (A) dan bimbingan teknis di awal tahun sebelum pelaksanaan penyusunan dokumen SAKIP.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.17.4
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	92,46%	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	2.651.588.910	2.367.355.401	89,28%
			Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	1.348.562.601	982.775.880	72,88%
			Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	2.201.751.800	814.099.535	36,98
			Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	599.404.554	472.483.012	78,83%

Sumber : Bappeda dan Litbang, Inspektorat dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2024

Dari tabel 3.17.4 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program-program. Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dan Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.

NILAI LPPD

Hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 belum diterima dari Kementerian Dalam Negeri sampai awal tahun 2025.

17. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Dari KKN

Pengukuran sasaran terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dengan indikator kinerja sasaran Opini BPK dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran opini BPK dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.18
Evaluasi Pencapaian Sasaran 17
Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Dari KKN

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 %
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	100%

Sumber : BPKD tahun 2024

Tahun 2024 pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator Opini BPK dengan target RPJMD tahun 2024 adalah WTP Realisasi tahun 2024 adalah WTP, sehingga capaian kinerja untuk tahun 2024 adalah 100%.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja Status Laporan Keuangan Daerah terealisasi 100 % artinya opini WTP berhasil dicapai berdasarkan standar pemeriksaan BPK. Sasaran meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan indikator sasaran yaitu Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi sasaran utama dari beberapa target di Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mencapai visi dan tujuan.

Pencapaian WTP opini BPK mencerminkan kinerja pengelola keuangan daerah dilakukan dengan maksimal. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah melakukan penyusunan laporan keuangan daerah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan penyajian yang diungkapkan juga sesuai dengan ketentuan. Penilaian tersebut menjadi indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern telah dilakukan secara efektif. Analisis capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dengan realisasi maupun capaian kinerja seperti yang diharapkan oleh pemerintah daerah.

Opini WTP BPK RI juga menggambarkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dipertanggungjawabkan pelaksanaannya sesuai kaidah pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun stakeholder terkait.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.18.1

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu				Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 vs Tahun			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPKD tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2020, 2021, 2022 dan 2024 adalah perbandingan realisasi opini BPK tahun 2024 adalah WTP dengan realisasi tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah WTP atau realisasi capaian kinerja sebesar 100 % dengan demikian maka hasil

perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai tahun 2024 Kabupaten Malinau masih mendapat Opini BPK adalah WTP.

Dalam upaya menilai efektivitas pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja hingga tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan. Berikut disajikan tabel yang membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.18.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%

Sumber : BPKD tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja opini BPK tahun 2024 adalah WTP dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah WTP, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2024 pencapaiannya sebesar 100% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, capaian kinerja untuk indikator kinerja Status Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau tahun 2024 mencapai 100% yang artinya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berhasil di capai berdasarkan standar pemeriksaan BPK. Pencapaian WTP mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah melakukan penyusunan laporan keuangan daerah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan penyajian yang diungkapkan juga sesuai dengan ketentuan. Penilaian tersebut menjadi indikator kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern telah dilakukan secara efektif. Analisis capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dengan realisasi maupun capaian kinerja seperti yang diharapkan oleh pemerintah daerah.

Opini WTP juga menggambarkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah telah dipertanggungjawabkan pelaksanaannya sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun *stakeholder* terkait.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi atas kualitas laporan keuangan dengan mempertimbangkan indikator :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
3. Kualitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Selain itu, ada 5 kriteria yang menjadi dasar penilaian atas kewajaran atas laporan keuangan antara lain, (1) Keterjadian dan Keberadaan, (2) Penilaian, (3) Hak dan Kewajiban, (4) Kelangkaan, (5) Pengungkapan. Kabupaten Malinau senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan sampai pelaporan.

Keberhasilan dalam pencapaian target bukan berarti tidak ada permasalahan atau kendala. Adapun permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target antara lain :

- a. Data yang tidak akurat/data yang tidak valid
- b. Laporan Keuangan dari setiap SKPD yang lambat atau tidak tepat waktu
- c. Sumber daya manusia pengurus barang OPD/Pengurus Barang masih ada yang kurang memiliki kompetensi dibidang penatausahaan dibidang aset.
- d. Dari sisi data, data aset belum semua OPD tertata dengan baik/belum tertib.
- e. Dari sisi administrasi dan penyimpanan masih belum tertib.

Dalam upaya peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau pada tahun yang akan datang perlu dilakukan alternative maupun strategi sebagai berikut :

- a. Komitmen semua ASN dan *stakeholder* maupun pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Peran APIP dalam pemantauan penerapan SPI di masing-masing OPD perlu dioptimalkan
- c. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan melalui program peningkatan kapasitas aparatur, khususnya aparatur pengelola keuangan, maupun melalui upaya perbaikan sistem dan kebijakan sistem dan kebijakan akuntansi serta manajemen aset.
- d. Perbaikan sistem melalui rencana aksi (*action plan*) agar proses perbaikan yang dilakukan jelas, terarah, terukur dan terpadu. Sehingga kelemahan dalam pengelolaan keuangan tidak terulang dimasa yang akan datang.
- e. Memprioritaskan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset.
- f. Tertib penyampaian laporan keuangan.
- g. Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
- h. Mengadakan pelatihan/bimtek mengenai pengelolaan keuangan daerah pada SKPD.
- i. Menyelenggarakan bimtek dan sosialisasi penyusunan laporan keuangan.
- j. Melakukan sinkronisasi data keuangan setiap bulan dengan OPD terkait.
- k. Melakukan pendampingan ke tiap OPD dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan pendampingan penyusunan laporan aset.
- l. Menyelenggarakan bimtek pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

b. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja opini BPK sebesar Rp.325.948.258.631, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 584.041.128.068 atau capaian realisasi keuangan sebesar 75,39%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja termasuk dalam kriteria Kurang Efektif.

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Realisasi

keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.18.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Dari KKN	Opini BPK	100%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.497.168.279	2.375.958.687	95,15
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	581.547.959.789	323.572.299.944	55,64

Sumber : BPKD tahun 2024

Dari tabel 3.18.4 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah

18. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

Pengukuran sasaran meningkatnya kemandirian keuangan daerah dengan indikator kinerja sasaran persentase PAD terhadap pendapatan daerah, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran persentase PAD terhadap pendapatan daerah dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.19
Evaluasi Pencapaian Sasaran 18
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 %
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	68,18%	6%	4,28%	71,33%

Sumber : BPKD tahun 2024

Tahun 2024 pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator persentase PAD terhadap pendapatan daerah dengan target RPJMD tahun 2023 adalah 6%, realisasi 4,28%, sehingga capaian kinerja untuk tahun 2024 adalah 71,33%.

Persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.19.1

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu				Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 vs Tahun			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	4,28%	-	-	3,74%	3,75%	-	-	87,38 %	87,61 %

Sumber : BPKD tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja persentase PAD terhadap pendapatan daerah tahun 2024 sebesar 4,28% dengan realisasi tahun 2022 sebesar 3,74% atau realisasi capaian kinerja sebesar 87,38% dan realisasi tahun 2023 sebesar 3,75% atau realisasi capaian kinerja sebesar 87,61%, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 0,54% terhadap capaian tahun

2022 dan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 0,53% terhadap capaian tahun 2023.

Dalam upaya menilai efektivitas pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja hingga tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan. Berikut disajikan tabel yang membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.19.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	4,28%	7%	61,14%

Sumber : BPKD tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja persentase PAD terhadap pendapatan daerah tahun 2024 sebesar 4,28% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 7%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2024 pencapaiannya sebesar 61,14% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Formula indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja ini adalah jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikali 100%. Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator kemandirian keuangan daerah serta sebagai wujud semangat desentralisasi pengelolaan keuangan di daerah. Semakin tinggi Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibanding Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun dasar, menunjukkan bahwa kondisi keuangan suatu daerah semakin mandiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi khusus secara nyata dan bertanggungjawab. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Secara umum pencapaian kinerja untuk sasaran pada tahun 2023 baik, meskipun masih terdapat sasaran yang belum mencapai 100%. Keberhasilan tidak terlepas dan penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal ini antara lain:

1. Adanya komitmen yang tinggi dan penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan.
2. Perencanaan dan masing-masing kegiatan telah focus pada apa yang akan dicapai.
3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja.
4. Telah dilaksanakannya rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisik, untuk mengantisipasi kegiatan yang tidak fokus pada hasil.

d. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif

organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja realisasi persentase pad perhadap pendapatan daerah sebesar Rp4,831.739.984, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp4.975.884.500 atau capaian realisasi keuangan sebesar 97,10%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria Efektif

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$\text{Rasio Efesiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja realisasi persentase pad perhadap pendapatan daerah sebesar Rp.4.831.739.984, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp19.779.685.385 atau capaian realisasi keuangan sebesar 24,42%.Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas makaRasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria Sangat Efisien.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Hubungan antara program, capaian kinerja dan realisasi keuangan program tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.19.4
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	68,18%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Daerah	4.975.884.500	4.831.739.984	97,10%

Sumber : BPKD tahun 2024

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Daerah dengan capaian kinerja mencapai angka 68,18% dengan realisasi keuangan 97,10%. Hal ini menjadi indikator bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

19. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pengukuran sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja sasaran nilai indeks kepuasan masyarakat, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran nilai indeks kepuasan masyarakat dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.20
Evaluasi Pencapaian Sasaran 19
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 %
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	97,35%	88	82,30	93,52%

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2024

Tahun 2024 capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja nilai indeks kepuasan masyarakat mencapai 93,52% dari target 88 dan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 82,70. Dari capaian yang diperoleh di tahun 2024 ini maka, kualitas pelayanan publik Kabupaten Malinau Tahun 2024 masuk dalam predikat **“Baik”**.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu:

$$IKM = \frac{\text{Total dari nilai per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$$

Persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.20.1

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu				Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 vs Tahun			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,30	78,28	79,31	80,71	82,75	95,11 %	96,36 %	98,06 %	100,5 %

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 sebesar 82,30 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 78,28 atau realisasi capaian kinerja sebesar 95,11%, realisasi tahun 2021 sebesar 79,31 atau realisasi capaian kinerja sebesar 96,36%, dan realisasi tahun 2022 sebesar 80,71 atau realisasi capaian kinerja sebesar 98,06% dan realisasi tahun 2023 sebesar 82,75 atau realisasi capaian kinerja sebesar 100,5%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 5,13% terhadap capaian tahun 2020, adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 3,77% terhadap capaian tahun 2021, kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 1,97% terhadap capaian kinerja tahun 2022 dan penurunan capaian kinerja tahun 2024 sebesar -0,54% terhadap capaian kinerja tahun 2023.

Dalam upaya menilai efektivitas pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja hingga tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan. Berikut disajikan tabel yang membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.20.2**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,30	88,50	92,99%

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja nilai indeks kepuasan masyarakat tahun 2024 sebesar 82.30 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 88,50, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2024 pencapaiannya sebesar 92,99% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Penyusunan IKM berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai IKM Kabupaten Malinau diperoleh dari OPD yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan pelayanan publik. IKM di Kabupaten Malinau dilaksanakan secara mandiri (OPD melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara langsung tanpa bantuan pihak ketiga).

OPD yang melaksanakan Pelayanan Publik di Kabupaten Malinau dan melaksanakan/ membuat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebanyak 6 OPD UPP dan 18 UPT Bidang Kesehatan berikut nama dan nilai IKM yang diperoleh.

Tabel 3.20.3**Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD
Yang Melaksanakan Pelayanan Publik Tahun 2024**

No	NAMA OPD	NILAI IKM SETELAH DIKONVERSIKAN	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,25	A	Sangat Baik
2	Dinas Penanaman Modal	70,75	C	Kurang Baik

	dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
3	Dinas Pendidikan	81,00	B	Baik
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	89,62	A	Sangat Baik
5	Dinas Kesehatan PPKB	86,17	B	Baik
6	Kecamatan Malinau Utara	84,00	B	Baik
7	RSUD	80,62	B	Baik
8	UPTD PKM Long Alango	81,33	B	Baik
9	UPTD PKM Metut	77,83	B	Baik
10	UPTD PKM Pulau Sapi	77,67	B	Baik
11	UPTD PKM Long Ampung	77,07	B	Baik
12	UPTD PKM Long Loreh	80,81	B	Baik
13	UPTD PKM Long Nawang	77,32	B	Baik
14	UPTD PKM Long Pujungan	87,39	B	Baik
15	UPTD PKM Malinau Kota	80,58	B	Baik
16	UPTD PKM Malinau Sebrang	89,64	B	Baik
17	UPTD PKM Susua	77,02	B	Baik
18	UPTD PKM Setulang	82,13	B	Baik
19	UPTD PKM Tanjung Lapang	93,43	A	Sangat Baik
NILAI IKM KAB. MALINAU		82,30	B	Baik

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2024

Dari data tabel diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa secara umum kualitas pelayanan pada OPD yang melaksanakan pelayanan publik di Kabupaten Malinau dipersepsikan baik oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh yaitu berkisaran di antara 76,75–93,43.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target sasaran antara lain:

- 1) Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan yang lebih berkualitas,
- 2) Penyediaan dan publikasi dokumen standar pelayanan, pengembangan sistem informasi pelayanan, penanganan pengaduan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik.
- 3) Budaya kerja aparatur dalam melayani masyarakat semakin baik.

Dari nilai unsur terendah masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dapat diketahui masalah atau kendala yang ada pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal berbeda-beda. Dari beberapa kendala yang menghambat pencapaian kinerja yang telah disebutkan diatas maka akan dilakukan alternatif solusi kedepan untuk perbaikan yaitu :

1. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan kejelasan dan kepastian petugas pelayanan serta kenyamanan lingkungan.
2. Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan yang masih kurang baik, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kesesuaian pelayanan pada OPD pelayanan publik di Kabupaten Malinau mendatang lebih baik lagi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.

b. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu

dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar Rp. 846.087.100 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.464.279.400 atau capaian realisasi sebesar 82,30% jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 93,50%.

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan pelatihan Sumber Daya Manusia melalui studi belajar ke kabupaten lain yang memiliki nilai Pelayanan publik yang tinggi.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Hubungan antara program, capaian kinerja dan realisasi keuangan program tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.20.4
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	93,52%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 1.464.279.400	Rp846.087.100	82,30%

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2024

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.

20. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa

Pengukuran sasaran meningkatnya penyelenggaraan pembangunan berbasis desa dengan indikator kinerja sasaran persentase peningkatan status desa mandiri, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran persentase peningkatan status desa mandiri dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.21
Evaluasi Pencapaian Sasaran 20
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 %
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	458,17%	17,74%	6,76	30,09%

Sumber : DPMD Tahun 2024

Tahun 2024 pencapaian sasaran meningkatnya penyelenggaraan pembangunan berbasis desa dengan indikator persentase peningkatan status desa mandiri yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 adalah 17,74 dan realisasi 6,76 dengan capaian tahun 2024 sebesar 30,09%.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut

Tabel 3.21.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu				Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 vs Tahun			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	6,76	-	12,04	13,76	71,42	-	178,10%	203,55%	1056%

Sumber : DPMD Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2021,2022 dan 2023 adalah perbandingan realisasi Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri tahun 2024 sebesar 71,43 dengan realisasi tahun 2021 sebesar 12,04 % atau realisasi capaian kinerja sebesar 178,10%, realisasi tahun 2022 sebesar 13,76% atau realisasi capaian kinerja sebesar 203,55% dan realisasi tahun 2023 sebesar 71,42% atau realisasi capaian kinerja sebesar 1056%.

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.21.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	6,76%	21,05%	32,11%

Sumber : DPMD Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 71,43% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 21,05% maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2024 pencapaiannya indikator kinerja persentase peningkatan status desa mandiri sebesar 32,11% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan regional provinsi dan standar nasional dapat disajikan sebagai berikut :

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan berbasis desa dan peningkatan persentase status desa mandiri merupakan hal yang positif dalam upaya pembangunan di tingkat desa. Penyelenggaraan pembangunan berbasis desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan yang berfokus pada kebutuhan dan potensi lokal di tingkat desa.

Desa mandiri adalah desa yang mampu mandiri dalam pengelolaan sumber daya, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan keuangan desa. Desa mandiri juga mampu mengoptimalkan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan berbasis desa dan persentase status desa mandiri dapat dicapai melalui berbagai upaya,

seperti pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, alokasi anggaran yang memadai untuk program-program pembangunan desa, serta pelatihan dan pendampingan bagi aparat desa dalam pengelolaan sumber daya. Dengan adanya penyelenggaraan pembangunan berbasis desa yang baik dan peningkatan jumlah desa mandiri, diharapkan dapat tercipta pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberdayakan masyarakat desa secara menyeluruh.

Indikator "Persentase Peningkatan status Desa Mandiri" dipilih menjadi salah satu indikator kinerja utama kepala daerah karena memberikan gambaran yang jelas tentang progres dalam pemberdayaan dan pembangunan di tingkat desa. Dengan mengukur persentase peningkatan status desa mandiri, kita dapat melihat sejauh mana desa-desa berhasil mandiri dalam pengelolaan sumber daya, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan keuangan desa. Indikator ini memberikan informasi yang komprehensif tentang kemajuan dalam upaya pemberdayaan desa dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan program-program pembangunan berbasis desa. Selain itu, indikator ini juga dapat menjadi dasar untuk alokasi sumber daya dan perencanaan strategis dalam mendukung desa-desa untuk mencapai status mandiri yang lebih baik. Dengan memantau persentase peningkatan status desa mandiri, pemerintah dan berbagai pihak terkait dapat lebih fokus dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada desa-desa yang membutuhkan, serta mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dan inovasi lebih lanjut diperlukan.

formulasi untuk menghitung desa mandiri adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Desa Maju} + \text{Desa Mandiri}}{\text{Jumlah desa Berkembang (per awal tahun)}} \times 100$$

Tabel 3.21.3
Data Perkembangan Kemajuan Status Desa Tahun 2023 Berdasarkan IDM

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	STATUS IDM 2023
1	Mentarang	Long Bisai	Mandiri
2	Mentarang	Pulau Sapi	Mandiri
3	Mentarang	Lidung Kemenci	Mandiri



4	Mentarang	Mentarang Baru	Mandiri
5	Malinau Kota	Batu Lidung	Mandiri
6	Malinau Kota	Malinau Kota	Mandiri
7	Malinau Kota	Pelita Kanaan	Mandiri
8	Malinau Kota	Malinau Hulu	Mandiri
9	Malinau Kota	Malinau Hilir	Mandiri
10	Malinau Kota	Tanjung Keranjang	Mandiri
11	Kayan Hilir	Long Sule	Mandiri
12	Kayan Hulu	Long Nawang	Mandiri
13	Malinau Selatan	Long Loreh	Mandiri
14	Malinau Selatan	Langap	Mandiri
15	Malinau Selatan	Laban Nyarit	Mandiri
16	Malinau Selatan	Sengayan	Mandiri
17	Malinau Utara	Malinau Seberang	Mandiri
18	Malinau Utara	Respen Tubu	Mandiri
19	Malinau Barat	Sesua	Mandiri
20	Malinau Barat	Tanjung Lapang	Mandiri
21	Malinau Barat	Kuala Lapang	Mandiri
22	Malinau Barat	Sempayang	Mandiri
23	Pujungan	Long Pujungan	Maju
24	Kayan Hilir	Data Dian	Maju
25	Kayan Hilir	Long Pipa	Maju
26	Kayan Hilir	Sungai Anai	Maju
27	Kayan Hilir	Long Metun	Maju
28	Kayan Hulu	Nawang Baru	Maju
29	Kayan Hulu	Long Temuyat	Maju
30	Malinau Utara	Kaliamok	Maju
31	Malinau Utara	Kelapis	Maju
32	Malinau Barat	Long Bila	Maju
33	Malinau Barat	Taras	Maju
34	Sungai Boh	Dumu Mahak	Maju
35	Sungai Boh	Mahak Baru	Maju
36	Kayan Selatan	Long Ampung	Maju
37	Kayan Selatan	Metulang	Maju
38	Mentarang Hulu	Temalang	Maju
39	Malinau Selatan Hilir	Setulang	Maju
40	Malinau Selatan Hilir	Punan Gong Solok	Maju
41	Mentarang	Paking	Berkembang
42	Mentarang	Harapan Maju	Berkembang
43	Pujungan	Long Ketaman	Berkembang
44	Pujungan	Long Pua	Berkembang
45	Pujungan	Long Jelet	Berkembang
46	Pujungan	Long Aran	Berkembang



47	Pujungan	Long Peliran	Berkembang
48	Kayan Hulu	Long Betaoh	Berkembang
49	Kayan Hulu	Long Payau	Berkembang
50	Malinau Selatan	Bila Bekayuk	Berkembang
51	Malinau Selatan	Nunuk Tanah Kibang	Berkembang
52	Malinau Selatan	Pelencau	Berkembang
53	Malinau Selatan	Paya Seturan	Berkembang
54	Malinau Selatan	Punan Rian	Berkembang
55	Malinau Utara	Luso	Berkembang
56	Malinau Utara	Putat	Berkembang
57	Malinau Utara	Salap	Berkembang
58	Malinau Utara	Seruyung	Berkembang
59	Malinau Utara	Belayan	Berkembang
60	Malinau Utara	Sembuak Warod	Berkembang
61	Malinau Utara	Lubak Manis	Berkembang
62	Malinau Utara	Semengaris	Berkembang
63	Malinau Barat	Long Kenipe	Berkembang
64	Malinau Barat	Punan Bengalun	Berkembang
65	Malinau Barat	Sentaban	Berkembang
66	Sungai Boh	Long Lebusan	Berkembang
67	Sungai Boh	Agung Baru	Berkembang
68	Sungai Boh	Data Baru	Berkembang
69	Kayan Selatan	Long Uro	Berkembang
70	Kayan Selatan	Lidung Payau	Berkembang
71	Kayan Selatan	Sungai Barang	Berkembang
72	Bahau Hulu	Long Alango	Berkembang
73	Mentarang Hulu	Lung Fala	Berkembang
74	Mentarang Hulu	Lung Kebinu	Berkembang
75	Mentarang Hulu	Lung Mekatif	Berkembang
76	Mentarang Hulu	Lung Simau	Berkembang
77	Mentarang Hulu	Lung Berang	Berkembang
78	Mentarang Hulu	Lung Sulit	Berkembang
79	Mentarang Hulu	Lung Semamu	Berkembang
80	Mentarang Hulu	Long Gafid	Berkembang
81	Mentarang Hulu	Long Liku	Berkembang
82	Malinau Selatan Hilir	Setarap	Berkembang
83	Malinau Selatan Hilir	Punan Setarap	Berkembang
84	Malinau Selatan Hilir	Batu Kajang	Berkembang
85	Malinau Selatan Hilir	Gong Solok	Berkembang
86	Malinau Selatan Hilir	Long Adiu	Berkembang
87	Malinau Selatan Hilir	Punan Long Adiu	Berkembang
88	Malinau Selatan Hulu	Long Lake	Berkembang

89	Malinau Selatan Hulu	Punan Mirau	Berkembang
90	Malinau Selatan Hulu	Metut	Berkembang
91	Malinau Selatan Hulu	Nahakramo	Berkembang
92	Malinau Selatan Hulu	Tanjung Nanga	Berkembang
93	Sungai Tubu	Long Pada	Berkembang
94	Pujungan	Long Lame	Tertinggal
95	Pujungan	Long Bena	Tertinggal
96	Pujungan	Long Belaka Pitau	Tertinggal
97	Sungai Boh	Long Top	Tertinggal
98	Bahau Hulu	Long Uli	Tertinggal
99	Bahau Hulu	Long Berini	Tertinggal
100	Bahau Hulu	Long Tebulo	Tertinggal
101	Bahau Hulu	Apau Ping	Tertinggal
102	Bahau Hulu	Long Kemuat	Tertinggal
103	Malinau Selatan Hulu	Long Rat	Tertinggal
104	Malinau Selatan Hulu	Halanga	Tertinggal
105	Malinau Selatan Hulu	Long Jalan	Tertinggal
106	Sungai Tubu	Long Nyau	Tertinggal
107	Sungai Tubu	Long Titi	Tertinggal
108	Sungai Tubu	Long Ranau	Tertinggal
109	Sungai Tubu	Rian Tubu	Tertinggal

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa

serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Selain faktor-faktor yang mendukung keberhasilan di atas masih terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan pada tahun 2024 realisasi capaian tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor pendukung capaian kinerja jumlah desa yang berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan indeks desa membangun per tahun dibagi jumlah desa berkembang (per awal tahun) dikali seratus persen antara lain:

1. Pemberdayaan Ekonomi: Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa dapat berkontribusi besar terhadap peningkatan jumlah desa yang memenuhi kriteria desa mandiri. Hal ini meliputi pengembangan usaha ekonomi, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap modal usaha.
2. Infrastruktur dan Akses Pelayanan: Penyediaan infrastruktur dasar dan akses pelayanan publik yang memadai di desa dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung terciptanya desa mandiri.
3. Partisipasi Masyarakat: Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa, termasuk dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan, merupakan faktor penting dalam mencapai status desa mandiri.
4. Keterlibatan Pemerintah Daerah: Dukungan dan keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan, pelatihan, dan sumber daya bagi desa-desa merupakan faktor penting dalam meningkatkan jumlah desa yang memenuhi kriteria desa mandiri.
5. Alokasi Anggaran yang Tepat: Pengalokasian anggaran yang memadai dan efektif untuk program-program pembangunan berbasis desa dapat mendukung pencapaian status desa mandiri. Dengan adanya faktor-faktor pendukung ini, diharapkan jumlah desa yang memenuhi kriteria desa mandiri dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Beberapa faktor penghambat capaian kinerja jumlah desa yang berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan indeks desa membangun antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun tenaga kerja, dapat menjadi penghambat dalam upaya pengembangan desa menuju status mandiri.
2. Kendala Teknis: Kendala teknis dalam pelaksanaan program pembangunan, termasuk infrastruktur dan pelayanan publik, dapat menghambat peningkatan jumlah desa yang memenuhi kriteria desa mandiri.
3. Kurangnya Partisipasi Masyarakat: Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa dapat menjadi penghambat dalam mencapai status desa mandiri.
4. Perubahan Kebijakan dan Regulasi: Perubahan kebijakan dan regulasi yang tidak konsisten dapat mempengaruhi kelancaran program pembangunan di tingkat desa.
5. Kurangnya Dukungan Pemerintah Daerah: Kurangnya dukungan dan keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan, pelatihan, dan sumber daya bagi desa-desa juga dapat menjadi faktor penghambat.

Dengan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat ini, langkah-langkah perbaikan dan strategi pengembangan dapat dirancang untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah akan dilakukan monitoring secara berkala ke setiap desa yang menjadi target desa mandiri.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada

outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja persentase peningkatan status desa mandiri sebesar Rp 47.517.000, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 50.000.000 atau capaian realisasi keuangan sebesar 95,03%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria Efektif

Efesiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efesiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Tingkat efesiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$\text{Rasio Efesiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tahun 2024 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja persentase peningkatan status desa mandiri sebesar Rp188,660.800, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp.1.973.581.475 atau capaian realisasi keuangan sebesar 9,55%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria Sangat Efisien.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan

bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.21.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	458,1%	Program Penataan Desa	50.000.000	47.517.000	95,03%

Sumber : DPMD Tahun 2024

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program penataan desa dengan capaian kinerja mencapai angka 458,1%% dengan realisasi keuangan 95,03%.

Dokumentasi Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa



C. REALISASI ANGGARAN

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah didasari atas komitmen bahwa anggaran yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan alokasi dan fungsinya dengan dukungan pendanaan melalui penyerahan sumber-sumber pendapatan daerah.



Tabel 3.22
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Konsolidasi)
Per 31 Desember 2024

Rekening				Uraian	Jumlah		
A	K	J	O		Anggaran	Realisasi	%
4				PENDAPATAN DAERAH	2.978.590.945.411,00	3.038.008.994.971,30	101,99
4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH	67.388.114.129,00	129.238.919.073,30	191,78
4	1	01		Pendapatan Pajak Daerah	15.135.396.658,00	22.868.887.208,82	151,10
4	1	02		Pendapatan Retribusi Daerah	2.633.005.100,00	3.239.654.329,00	123,04
4	1	03		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.620.000.000,00	4.058.750.422,70	112,12
4	1	04		Lain-Lain PAD yang Sah	45.999.712.371,00	99.071.627.112,78	215,37
4	1	05		Zakat	0,00	0,00	0,00
4	2			PENDAPATAN TRANSFER	2.904.702.831.282,00	2.904.624.728.541,00	100,00
				Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.704.065.339.000,00	2.687.782.483.668,00	99,40
4	2	01		Dana Bagi Hasil	1.725.871.655.000,00	1.725.871.656.000,00	100,00
4	2	01		Dana Alokasi Umum	845.581.055.000,00	834.468.033.864,00	98,69
4	2	01		Dana Alokasi Khusus - Fisik	61.041.492.000,00	59.607.098.205,00	97,65
4	2	01		Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	71.571.137.000,00	67.835.695.599,00	94,78
				Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	139.235.308.000,00	139.235.308.000,00	100,00
4	2	02		Dana Insentif Daerah	19.578.092.000,00	19.578.092.000,00	100,00
4	2	02		Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
4	2	02		Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00
4	2	02		Dana Desa	119.657.216.000,00	119.657.216.000,00	100,00
				Transfer Pemerintah Daerah	61.402.184.282,00	77.606.936.873,00	126,39
4	2	03		Dana Bagi Hasil	40.712.198.986,00	57.044.884.225,00	140,12
4	2	03		Bantuan Keuangan	20.689.985.296,00	20.562.052.648,00	99,38
4	3			LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	6.500.000.000,00	4.145.347.357,00	63,77
4	3	01		Hibah	0,00	0,00	0,00
4	3	02		Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
4	3	03		Pendapatan Lainnya	6.500.000.000,00	4.145.347.357,00	63,77
5				BELANJA DAERAH	3.518.023.121.343,66	2.837.282.828.174,51	80,65
5	1			OPERASI	2.014.699.970.645,31	1.676.996.436.068,51	83,24
5	1	01		Pegawai	802.464.796.562,20	688.316.596.879,00	85,78
5	1	02		Barang dan Jasa	997.874.511.525,20	799.515.774.978,51	80,12
5	1	03		Bunga	0,00	0,00	0,00
5	1	04		Subsidi	59.121.101.840,00	51.310.643.145,00	86,79
5	1	05		Hibah	151.704.307.873,91	136.193.421.066,00	89,78
5	1	06		Bantuan Sosial	3.535.252.844,00	1.660.000.000,00	46,96
5	2			MODAL	1.012.267.910.498,67	778.192.369.399,00	76,88
5	2	01		Tanah	14.153.202.610,00	3.508.012.723,00	24,79
5	2	02		Peralatan dan Mesin	222.470.159.381,00	202.048.599.512,00	90,82
5	2	03		Gedung dan Bangunan	296.749.623.208,67	196.814.944.083,00	66,32
5	2	04		Jalan, Irigasi dan Jaringan	472.561.780.299,00	371.686.896.181,00	78,65
5	2	05		Aset Tetap	390.580.000,00	273.000.000,00	69,90
5	2	06		Aset Lainnya	5.942.565.000,00	3.860.916.900,00	64,97
5	3			TIDAK TERDUGA	113.455.355.723,88	4.485.577.411,00	3,95
5	3	01		Tidak Terduga	113.455.355.723,88	4.485.577.411,00	3,95
5	4			TRANSFER, BANTUAN KEUANGAN, DAN BAGI HASIL	377.599.884.475,80	377.608.445.296,00	100,00
5	4	01		Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	1.776.840.175,80	1.776.465.175,00	99,98
5	4	02		Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00
5	4	03		Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5	4	04		Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	375.823.044.300,00	375.831.980.121,00	100,00
5	4	05		Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Kepada Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
				SURPLUS/DEFISIT	-539.432.175.932,66	200.726.166.796,79	-37,21
6				PEMBIAYAAN DAERAH (PEMBIAYAAN NETTO)	539.432.175.932,66	533.875.913.718,66	98,97
6	1			PENERIMAAN PEMBIAYAAN	539.432.175.932,66	533.875.913.718,66	98,97
6	1	01		Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	539.432.175.932,66	533.875.913.718,66	0,00
6	1	02		Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6	1	03		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
6	1	04		Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
6	1	05		Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00	0,00
6	1	06		Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00
6	1	07		Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00
6	1	08		Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00	0,00
6	1	09		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6	1	10		Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	2			PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
6	2	01		Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00



6	2	02	Penyertaan Modal/Investasi Daerah	0,00	0,00	0,00
6	2	03	Pembayaran Pinjaman - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
6	2	04	Pembayaran Pinjaman - Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00	0,00
6	2	05	Pembayaran Pinjaman - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00
6	2	06	Pembayaran Pinjaman - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00
6	2	07	Pembayaran Pinjaman - Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00	0,00
6	2	08	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6	2	09	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
			SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) RASIO KEMANDIRIAN	0,00	734.602.080.515,45	

Sumber Data : BPKD Kabupaten Malinau 2024

Tabel 3.23
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

TUJUAN/SASARAN/ INDIKATOR SASARAN / PROGRAM			CAPAIAN KINERJA 2024	ANGGARAN		CAPAIAN KEUANGAN %	EFESIANSI ANGGARAN	
				ANGGARAN	REALISASI		Rp	%
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing Tinggi								
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat							
	Angka Usia Harapan Hidup		101,53%					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		RP 74.510.932.403	74.510.932.403	100%	Rp.0	0%
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Rp 84.354.621.463	Rp 84.354.621.463	100%	Rp.0	0%
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Rp 2.137.288.550	Rp 2.137.288.550	100%	Rp.0	0%
		Program sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Rp 250.401.000	Rp 250.401.000	100%	Rp.0	0%
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Rp 553.641.000	Rp 553.641.000	100%	Rp.0	0%
		Program pengendalian Penduduk		Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	100%	Rp.0	0%
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Rp 687.000.000	Rp 687.000.000	100%	Rp.0	0%
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Rp 550.300.000	Rp 550.300.000	100%	Rp.0	0%
	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat							
	Angka Rata-Rata Harapan Sekolah		96,58%					
		Program Pengelolaan Pendidikan		Rp 160.895.743.969	Rp 160.895.743.969	100%	Rp.0	0%
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat							
	Pengeluaran perkapita		107,08%					
		Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		Rp 862.464.000	Rp 862.464.000	100%	Rp.0	0%
		Program standarisasi perlindungan konsumen		Rp 73.543.000	Rp 73.543.000	100%	Rp.0	0%
Menciptakn Suasana Kondusif Yang Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia								
	Terciptanya Kehidupan Yang Aman, TenTeram Dan Harmonis Dan Serta Bebas Bencana							
	Angka Kriminalitas		0,20%					
		Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Rp 3.092.695.324	Rp 2.897.774.646	93,69%	Rp. 194.920.678	6,30%
	Indeks Resiko Bencana		101,42%					
		Program Penanggulangan Bencana		Rp 16.731.470.902	Rp 14.028.384.144	83,84%	Rp. 2.703.086.758	16,15%



TUJUAN/SASARAN/ INDIKATOR SASARAN / PROGRAM		CAPAIAN KINERJA 2024	ANGGARAN		CAPAIAN KEUANGAN %	EFESIANI ANGGARAN	
			ANGGARAN	REALISASI		Rp	%
Meningkatnya kesetaraan gender							
	Indeks Pembangunan Gender	97,07%					
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Rp 100.000.000	100.000.000	100%	Rp.0	0%
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	100%	Rp.0	0%
Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter Dan Budaya Masyarakat							
	Indeks Kerukunan Beragama	98,13%					
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Rp 300.000.000	299.742.000	99,91%	Rp. 258.000	0,086%
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Dan Karakteristik Daerah							
Meningkatnya Produktifitas Sektor Sektor Ekonomi Primer Berorientasi Pada Potensi dan Karakteristik Lokal							
	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB	188%					
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		Rp 26.650.243.900	Rp 14.074.291.270	53,00%	Rp.12.575.952.630	47,18%
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Rp 13.391.777.050	Rp 12.710.619.400	94,91	Rp.681.157.650	5,08%
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Rp 499.970.400	Rp 323.911.596	65,00%	Rp.176.058.804	35,21%
	Program Penyuluh Pertanian		Rp 1.309.029.000	Rp 1.207.796.811	92,00%	Rp.101.232.189	7,73%
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Rp 349.998.850	Rp 320.768.600	92,00%	Rp.29.230.250	8,35%
	Program Perizinan Usaha Pertanian		Rp 2.058.759.000	Rp 36.349.231,00	1,77%	Rp.2.022.409.769	98,23
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Rp 525.000.000	Rp 514.454.435	97,94	Rp.10545.565	2,01%
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Rp 2.155.066.950	Rp 2.129.923.650	98,83	Rp.25.143.300	1,16%
Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah							
	Kontribusi Industri, Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB	82,5%					
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri		Rp 3.130.085.427	Rp 2.647.357.902	84,58%	Rp. 482.727.525	15,42%
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Rp 2.547.103.426	Rp 2.187.084.917	85,87%	Rp. 360.018.509	14,13%
	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	100%					
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Rp 9.346.426.286	Rp 6.817.000.671	72,94%	Rp. 2.529.425.615	27,06%
	Program Pemasaran Pariwisata		Rp 659.256.450	Rp 567.317.435	86,05%	Rp. 91.939.015	13,94%
Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil dan Mikro yang Berkualitas							
	Persentase Peningkatan Koperasi berkualitas	9,2%					
	Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian		Rp 388.969.000	Rp 271.628.267	69,83%	Rp. 117.340.733	30,16%
	Persentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil	14,28%					



TUJUAN/SASARAN/ INDIKATOR SASARAN / PROGRAM			CAPAIAN KINERJA 2024	ANGGARAN		CAPAIAN KEUANGAN %	EFESIANI ANGGARAN	
				ANGGARAN	REALISASI		Rp	%
		program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)		Rp 2.848.437.250	Rp 2.670.967.410	93,77%	Rp. 177.469.840	6,23%
		Meningkatnya Ketahanan Pangan						
		Indeks Ketahanan Pangan	97,93%					
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Rp 620.085.372	Rp 492.381.000	99,09 %	Rp. 127.704.372	20,60%
		Program Penanganan Kerawanan Pangan		Rp 50.780.000	Rp 43.676.500	98,22 %	Rp. 7.130.500	13,99%
		Menurunnya Angka Pengangguran						
		Tingkat Pengangguran Terbuka	124,20%					
		Program Perencanaan tenaga kerja		Rp 100.000.000	95.003.018	95,00%	Rp.4.996.982	4,10%
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja		Rp 1.550.600.900	Rp 1.353.500.319	87,29%	Rp.197.100.581	12,71%
		Program Penempatan Tenaga Kerja		Rp 210.482.000	Rp 183.000.820	86,94%	Rp.27.481.180	13,05%
		Meningkatnya Investasi Daerah						
		Nilai Investasi Daerah	2.459%					
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Rp 417.400.000	Rp 345.178.520	82,70%	Rp.72.221.480	17,30%
		Mewujudkan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan Daerah						
		Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur Berwawasan Lingkungan						
		Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	55,58%					
		Program Penyelenggaraan Jalan		Rp 121.490.273.030	Rp 116.197.785.017	95,64%	Rp. 5.292.488.013	4,35%
		Persentase Pemukiman Yang Layak	102,58%					
		Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah		Rp 1.881.765.600	Rp 797.768.944	42,39%	Rp.1.083.996.656	57%
		Rasio Rumah Layak Huni	37,97%					
		Program pengembangan Permukiman		Rp 250.000.000	Rp 12.320.000	4,93%	Rp.237.680.000	95,07%
		Persentase Desa Yang Terhubung Moda Transportasi	100%					
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Rp 4.892.479.012	Rp 4.261.077.075	87,09%	Rp.631.401.937	12,90%
		Persentase Penduduk Berakses Air Minum	99,77%					
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		Rp 26.625.380.183	Rp 20.179.739.997	75,79%	Rp.6.445.640.186	24,20%
		Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi	231%					
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		Rp 26.617.122.157	Rp 21.033.836.596	79,02%	Rp.5.583.285.561	20,98%
		Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisoliran Daerah						
		Persentase Desa yang Terlayani Telekomunikasi	101,86%					
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik		Rp 818.154.350	Rp 723.952.802	88,49%	Rp.94.201.548	11,51%



TUJUAN/SASARAN/ INDIKATOR SASARAN / PROGRAM			CAPAIAN KINERJA 2024	ANGGARAN		CAPAIAN KEUANGAN %	EFESIANI ANGGARAN	
				ANGGARAN	REALISASI		Rp	%
		Program Aplikasi Informatika		Rp 7.528.981.170	Rp 5.970.812.335	79,30%	Rp.1.558.168.835	20,70%
Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup								
Meningkatnya Kualitas Lahan, Air Dan Udara								
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	100%					
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		Rp 9.095.518.398	Rp 7.089.390.171	77,94%	2.006.128.227	22,05%
		Indeks Kualitas air	94,86%					
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Rp 778.135.800	688.534.988	88,48 %	Rp.89.600.812	11,51%
		Indeks Kualitas Udara	103,18%					
		Program PengendalianPencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Rp 2.086.214.072	Rp 1.995.230.050	95,63%	Rp.90.984.022	4,36%
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik (Good Governance)								
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah								
		Nilai SAKIP	101,40%					
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Rp 2.651.588.910	Rp 2.367.355.401	89,28%	Rp.284.233.509	10,72%
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Rp 1.348.562.601	Rp 982.775.880	72,88%	Rp.365.786.721	27,12%
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi		Rp 2.201.751.800	Rp 814.099.535	36,98	Rp.1.387.652.265	63,02%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp 599.404.554	Rp 472.483.012	78,83%	Rp.126.921.542	21,17%
Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN								
		Oini BPK	100%					
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Rp 2.497.168.279	Rp 2.375.958.687	95,15	Rp.121.209.592	4,85%
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Rp 581.547.959.789	Rp 323.572.299.944	55,64%	Rp.275.975.659.845	44,36%
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah								
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	71,33%					
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Rp 4.975.884.500	Rp 4.831.739.984	97,10%	Rp.144.144.516	2,99%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik								
		Indeks Kepuasan Masyarakat	93,52%					



TUJUAN/SASARAN/ INDIKATOR SASARAN / PROGRAM				ANGGARAN		CAPAIAN KEUANGA N %	EFESIANI ANGGARAN	
				CAPAIAN KINERJA 2024	ANGGARAN	REALISASI	Rp	%
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp 1.464.279.400	Rp 846.087.100	82,30%	Rp.618.192.300 42,21%
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa					
			Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	30,09%				
			Program Penataan Desa		Rp 50.000.000	Rp 47.517.000	95,03%	Rp.2.483.000 4,97%

BAB IV

PENUTUP

Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2024 yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Malinau, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Kabupaten Malinau. Meskipun disadari bahwa laporan ini belum sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan para *stakeholder* dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau selama tahun 2024 baik menyangkut keberhasilan maupun ketidakberhasilannya.

Di masa mendatang Pemerintah Kabupaten Malinau akan senantiasa berusaha untuk melakukan perbaikan untuk lebih menyempurnakan pelaporan kinerja ini. Berbagai hasil yang telah diraih oleh Kabupaten Malinau selama ini akan selalu dijadikan modal berharga untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang terjadi dijadikan pelajaran berharga untuk melangkah menuju Malinau yang lebih baik di hari esok.

Mengingat masih ada kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Malinau pada tahun 2024, dalam rangka peningkatan kinerjanya, pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Malinau untuk tahun-tahun mendatang akan tetap difokuskan pada :

- Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Good Government*).
- Perbaikan dan peningkatan dalam pelayanan publik.
- Peningkatan kapasitas personil dan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik.
- Penegakan hukum dan perundang-undang, serta perbaikan dalam sistem informasi kinerja pemerintah daerah.
- Peningkatan kualitas perencanaan kinerja.
- Penyempurnaan mekanisme pengumpulan data kinerja.

Dengan tersusunnya Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun



Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran strategis yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, akan terus kami upayakan melalui kerja keras secara sinergis, inovatif dan kolaboratif bersama masyarakat dan semua pihak.

